

**KUNJUNGAN SENAT CEKO: MPR BERHARAP KERJASAMA INDONESIA-CEKO MENINGKAT**

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI

EDISI NO.09/TH.XII/SEPTEMBER 2018



**KEBEBASAN BERPENDAPAT**

## Tak Boleh Ada Larangan, Apalagi Persekusi

**18 Nasional**  
Gempa Lombok: Perlu Dukungan  
Penuh Pemerintah Pusat

**39 Selingan**  
Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana

**54 Sosialisasi**  
Merawat Kebhinnekaan  
Melalui Festival Seni Budaya

ISSN 0854-6371  
9 770854 637158





**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT

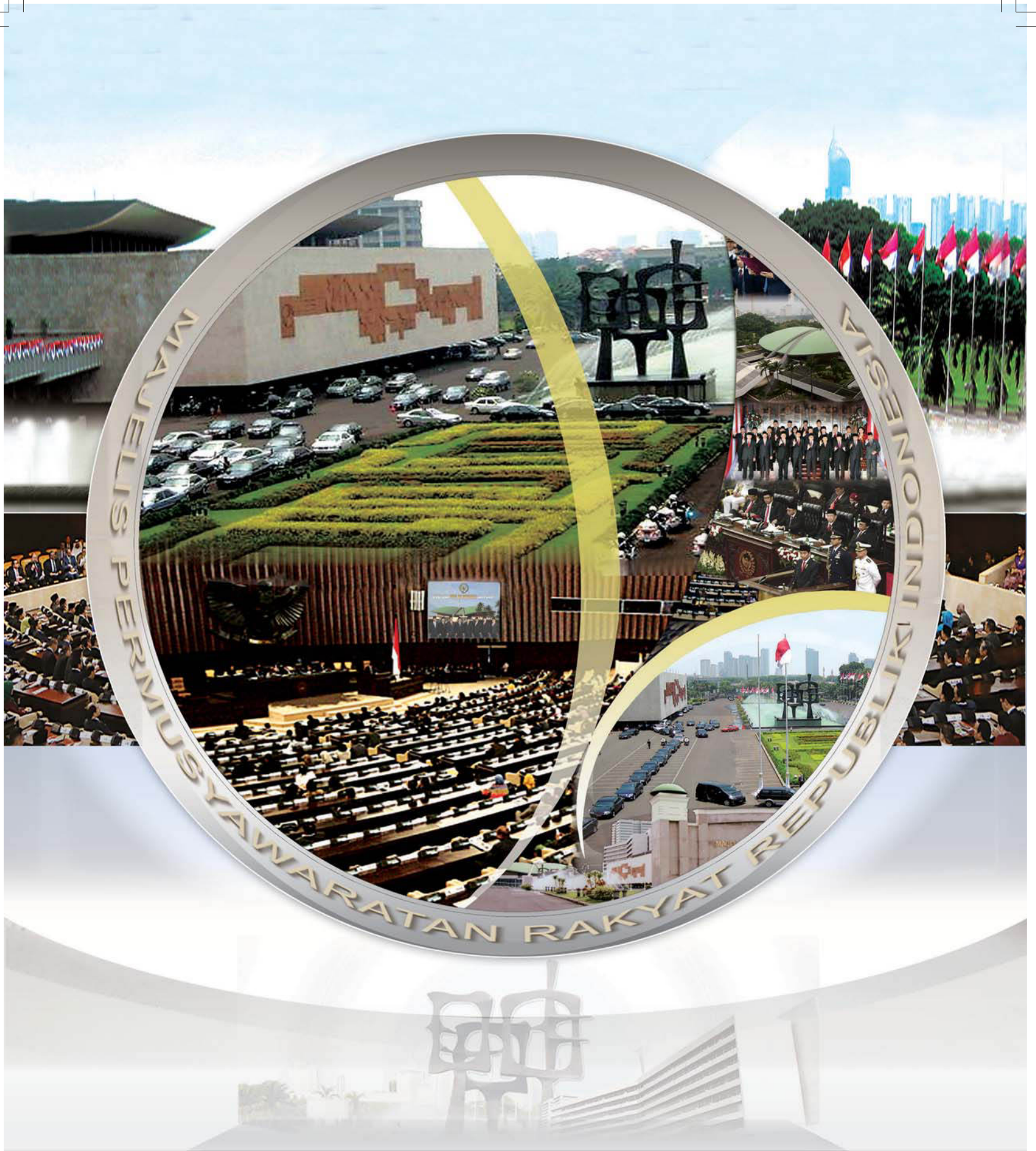


**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT





**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



# Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.XII/SEPTEMBER 2018



## 10 BERITA UTAMA

### Kebebasan Berpendapat

Pada prinsipnya kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai aturan yang berlaku.



## 28 Nasional

### Kunjungan Ketua Senat Republik Ceko



## 54 Sosialisasi

### Ketua MPR Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

MAJELIS EDISI NO.09/TH.XII/SEPTEMBER 2018



76 Profil  
Ayub Khan



COVER  
Edisi September 2018  
Kreatif: Jonni Yasrul

Pengantar Redaksi .....	04
Kolom .....	05
Opini .....	06
Gema Pancasila .....	36
Bicara Buku .....	38
Selingan .....	39
Aspirasi Masyarakat .....	47
Debat Majelis .....	48
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Catatan Tepi .....	80

## Karikatur



ILUSTRASI: SUSTHANTO





**Budi Muliawan**  
Koordinator Reportase

## Pengantar Redaksi

# Kebebasan Berpendapat dan Mengeluarkan Pikiran

**U**NDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat atau berkumpul. Jaminan itu tertuang dalam Pasal 28 E ayat 2 dan 3. Pasal 28 ayat (2) menyebutkan: "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Kemudian pasal 28 ayat (3) menyatakan: "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pemerintah mengatur soal kebebasan berpendapat sebagai turunan dari UUD NRI Tahun 1945 melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan PP No. 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Dari perangkat aturan itu maka jelaslah bahwa negara menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat. UU No. 9 Tahun 1998 menyebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Bukan cuma perorangan, hak berpendapat itu juga berlaku untuk kelompok.

Belakangan persoalan kebebasan berpendapat ini mengemuka seiring dengan aktivitas masyarakat yang semakin intens menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dari media televisi dan media sosial muncul berita pertentangan berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Sebut saja, penghadangan dan penolakan untuk menggelar

deklarasi dan diskusi. Apakah kegiatan tersebut salah? Apakah diperbolehkan aturan atau tidak? Apakah kegiatan itu konstitusional atau tidak?

Persoalan menjadi lebih rumit lagi apabila melihat fakta konten media sosial kita saat ini. Melalui media sosial, pengguna bisa menyuarakan pendapat dan pikiran. Pengguna bisa mengungkapkan keluh kesah, kritik, atau sentimen negatif. Kemudian muncullah informasi *hoax* yang menimbulkan kegaduhan. Masyarakat saling hujat di internet.

Seiring berjalannya waktu, kebebasan berpendapat di era reformasi ini mulai mengkhawatirkan. Apalagi bersamaan dengan adanya internet ketika corong kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran sudah tidak terbandung lagi. Kebebasan berpendapat seperti sebuah pisau. Bila digunakan dengan baik bisa menjadi berkah, tapi bila disalahgunakan malah membawa musibah.

Saatnya untuk mendudukkan kembali arti kebebasan berpendapat. Kita ingin merepresentasikan reformasi dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Negara pun harus menjamin hak mengemukakan pendapat disertai kewajiban-kewajibannya agar terselenggara dengan baik.

Di sisi lain, aparat harus bertindak secara tepat. Aparatur penegak ketertiban dan hukum harus bersikap dan bertindak jelas, tegas, dan independen. Apapun langkah aparat, adil dan netral harus menjadi pegangan. Jika aparat adil dan netral maka amanlah negeri ini.

Dalam konteks itulah, *Majelis* edisi September ini mengangkat persoalan hak kemerdekaan berpendapat dan menyampaikan pikiran. □



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

Selfi Zaini

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, M. Rizal,

Suryani, Tugiyana, Heri Herawan,

Maifrizal

### REDAKTUR PELAKSANA

Muhamad Jaya

### KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

### REDAKTUR FOTO

Sucipto, Supriyanto,

Euis Karmilah

### REPORTER

Ana Suzana, Mery S. Magdalena,

Yenita Revi, Sugeng Cahyono

### FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

### PENANGGUNG JAWAB

### DISTRIBUSI

Elen Magdalena

### KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

### STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,

Armansyah, Dhita Fitasari

Junaid

### SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

### ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id





**Baharuddin Arifonang**

Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

## Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

**D**ALAM kehidupan masyarakat, demonstrasi masih lumrah dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan atau menyalurkan pendapat. Khususnya oleh kalangan masyarakat tertentu. Katakanlah misalnya mahasiswa atau buruh.

Bahkan di kedua kelompok masyarakat ini masih muncul pemelo bahwa mahasiswa dan buruh erat kaitannya dengan demo atau demonstrasi. Bukanlah mahasiswa atau buruh namanya kalau bukan berdemonstrasi. Keduanya memang lama menjadi “kekuatan” atau “kelompok penekan” dalam lingkungan masyarakat. Meski kadarnya seringkali mengalami naik turun.

Ada kalanya berlangsung secara besar-besaran. Adakalanya menurun ke titik nadir. Gambaran yang paling spektakuler misalnya terlihat di tahun 1966, tahun 1977, dan di tahun 1998 yang sampai menghempaskan “penguasa” negara.

Mungkin saja tidak dalam bentuk menyalurkan pikiran atau pendapat. Melainkan hanya sekedar kerumunan massa semata. Katakanlah misalnya dikala melihat tontonan atau kampanye di dalam pemilihan umum. Tapi tetap saja dapat menghadirkan resiko. Melahirkan efek sampingan seperti kecelakaan atau kerusakan.

Perkara kemerdekaan mengeluarkan pendapat sesungguhnya telah dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan sejak awal. Melalui Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 misalnya memuat secara jelas tentang hal ini: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang. Bahkan melalui Perubahan UUD 1945 dilengkapi dengan Bab XA Hak Asasi Manusia yang di Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 F menyangkut tentang hal ini.

Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,

Pasal 28E ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sejumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang hal itu telah dirumuskan. Untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul misalnya di susun Undang Undang Partai Politik dan Undang Undang Keormasan. Demikian pula halnya dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, antara lain dengan undang-undang pers dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur tentang hal ini.

Dalam praktiknya undang-undang yang telah disusun itu tidak mampu menampung kemajuan dalam kehidupan umat manusia. Demikian pula halnya konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Lihatlah misalnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, seperti sekarang ini. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat melalui media sosial seperti *youtube*, *facebook*, *instagram*, dan lainnya telah melanda kehidupan di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia.

Sejalan dengan itu, media massa yang dikenal sebagai “arus utama” seperti koran dan televisi mendapatkan pesaing yang amat berarti. Betapapun demonstrasi mahasiswa tidak diberitakan di koran atau televisi, dalam kenyataannya sampai juga ke kantong dan tangan anggota masyarakat yang luas.

Sehubungan dengan itu, kajian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya sejalan dengan UUD NRI 1945 perlu dilakukan secara terus-menerus. Agar tujuan bernegara tetap di arah yang tepat. □

ILUSTRASI: SUSTHANTO



## Kenapa Lombok Tak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional?

**G**EMPA dengan guncangan terbesar sekitar 7,0 skala richter (SR) terjadi pada Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WITA cukup memprihatinkan buat rakyat Indonesia, terutama rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa yang berpusat di 18 km barat laut Lombok Timur, NTB, pada kedalaman 32 km meluluhlantakkan beberapa wilayah di Lombok. Selain menyebabkan kerugian materi, juga menyebabkan korban jiwa yang tak sedikit. Serta melumpuhkan roda perekonomian di Lombok, terutama sektor pariwisata.

Gempa bumi yang terjadi pada 5 Agustus lalu itu merupakan gempa utama dari rangkaian gempa bumi di Pulau Lombok yang diawali gempa berkekuatan 6,4 SR pada akhir Juli lalu. Belum lagi hilang keterkejutan dan belum dari traumatis yang diidap oleh para korban gempa, ternyata puluhan gempa susulan terus terjadi. Hingga 20 Agustus gempa susulan masih terasa, meski intensitas guncangannya tidak lagi sekuat gempa sebelumnya.

Pada 6 Agustus, dalam konferensi persnya, Kepala Pusat Data, Informasi (Pusdatin) dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan bahwa laporan awal menunjukkan lebih dari 50% bangunan di Kabupaten Lombok Utara hancur akibat gempa. Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, lebih dari 80% bangunan di Lombok Utara rusak atau hancur.

Sejak awal gempa hingga gempa susulan yang guncangannya masih terasa hingga 20 Agustus, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, 259 orang meninggal dunia, 1.033 luka berat dan ringan, serta 270.168 warga mengungsi. Di Bali, dua orang dilaporkan meninggal, yaitu seorang warga Denpasar dan 1 lagi wisatawan asal Jawa Barat.

Mengingat begitu besarnya dampak bencana gempa Lombok ini maka muncul usulan agar pemerintah menetapkan status bencana



ISTIMEWA

nasional untuk bencana gempa Lombok. Namun, ada juga pihak lain yang menganggap tak perlu ditetapkan bencana nasional. Tapi, pemerintah agaknya punya alasan sendiri enggan menetapkan kasus Lombok ini sebagai bencana nasional. Karena, konsekuensi ditetapkan status bencana nasional diyakini bisa merugikan negara.

Pemerintah tampaknya pengalaman dalam hal penetapan status bencana di suatu daerah. Salah satunya bencana letusan Gunung Agung di Bali tahun lalu. "Begitu pemerintah menetapkan bencana letusan Gunung Agung sebagai bencana nasional maka langsung berdampak pada travel warning," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kematriman Luhut B. Pandjaitan, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun pihak BNPB menyatakan, ada persyaratan tertentu yang harus terpenuhi untuk penetapan status bencana nasional. Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bencana nasional ditetapkan jika di lokasi bencana terdapat banyak korban, daerah terdampak luas, dan aparat pemerintah daerah juga lumpuh total. Lainnya, pemerintah daerah juga menjadi korban dan lumpuh total sehingga fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan.

Jadi, menurut Sutopo, peningkatan status gempa bumi Lombok menjadi bencana nasional tidak diperlukan. Sebab, penanganan para korban yang terkena musibah sudah berskala nasional.

Di pihak lain berpendapat, bencana Lombok sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satunya usulan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Menurut HNW, penetapan bencana nasional tidak akan memengaruhi sektor pariwisata di Lombok. Malah dunia internasional akan semakin mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi situasi pasca-gempa dengan adanya penetapan bencana nasional. □

DER

## Kasus Korupsi Menjerat 41 Anggota DPRD Kota Malang

**A**PARATUR penegak hukum yang terkait kasus korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK sudah habis-habisan berupaya meminimalisir kejahatan korupsi. Berbagai metode penangkapan, mulai dari yang standar sampai operasi tangkap tangan (OTT), serta *show off* pelaku korupsi lengkap dengan seragam khas tersangka korupsi oleh KPK, namun ternyata semua langkah ini tidak juga membuat jera para pelaku korupsi.

Meski begitu keras dan luar biasanya teknik penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum di Indonesia, namun belum juga mampu meminimalisir kuantitas kejahatan korupsi. Sudah berapa banyak kepala daerah hingga anggota DPR, DPRD, menteri dan juga pimpinan

lembaga negara terjerat KPK. Yang teranyar adalah penahanan 41 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA2015.

Dalam kasus korupsi berjamaah ini 41 anggota DPRD dididuk KPK. Ini akumulasi penyelidikan dan penahanan anggota DPRD Kota Malang sejak 9 Agustus 2017 hingga 3 September 2018. Berawal dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK di Kota Malang, dan penetapan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono sebagai tersangka pada 11 Agustus 2017.

Pasca penahanan Arief, kasus suap pembahasan APBD-P makin berkembang dan meluas. Dalam pemeriksaan, Arief 'beranyani' bahwa



ISTIMEWA



uang korupsi yang diterimanya sebagian dibagikan kepada para anggota DPRD Kota Malang. KPK-pun kembali melakukan penyelidikan dan serangkaian penggeledahan yang difokuskan di DPRD Kota Malang.

Hasilnya, pada 21 Maret 2018, KPK menetapkan para tersangka baru, yakni Walikota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Saat memeriksa para tersangka dalam persidangan terhadap 18 tersangka tersebut, KPK menemukan kasus baru, yakni gratifikasi APBD 2015 senilai Rp 5,8 miliar, dan kasus pengadaan lahan TPA Sampah Supit Urang senilai Rp 300 juta.

KPK pun kembali melakukan penyelidikan dan pada 3 September 2018 KPK menetapkan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang. Total KPK telah menetapkan tersangka kasus korupsi dan melakukan penahanan terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang. Kabar tentang tertangkapnya 41 anggota DPRD tersebut sontak membuat jagad Indonesia gempar, marah, dan sekaligus miris terhadap kasus yang mencoreng panggung politik nasional.

Di Kota Malang berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan mengecam keras kejahatan korupsi

dilakukan 41 wakil mereka di DPRD. Mereka menuntut pemerintah mengawal proses transisi dan agar secepatnya dilakukan pergantian anggota DPRD dan melakukan pengawasan melekat kepada anggota baru agar tidak terulang kembali.

Kasus tersebut membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi mengatakan bahwa membangun kepercayaan, apalagi sebagai pejabat, memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, jika kepercayaan tersebut sudah didapat harus dijaga, baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif. "Jagalah kepercayaan rakyat tersebut untuk kebaikan rakyat di daerahnya dan juga dalam konteks yang luas, negara," ujarnya di Jawa Timur, Kamis (6/9/2018).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (4/9/2018), mengungkapkan keprihatinannya atas kasus yang melibatkan 41 wakil rakyat di Kota Malang itu. "Ini pelajaran buat semua, juga peringatan buat para kepala daerah dan para wakil rakyat, jangan berbuat seperti itu. Bagaimanapun karir akan habis, masuk penjara, malu, sudahlah itu peringatan kita semua," katanya. □

DER

## Polemik Napi Koruptor Dilarang Nyaleg

**K**EJAHATAN korupsi bukan hanya kejahatan pidana, tapi juga merupakan kejahatan kemanusiaan. Uang yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya adalah uang negara yang notabene uang rakyat. Dampak negatif menimpa rakyat yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi sangat luar biasa, sehingga korupsi sering disebut sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Makin luar biasa lagi, karena pelaku korupsi kebanyakan pejabat publik dan wakil rakyat. Karena merupakan kejahatan luar biasa dengan dampak yang juga luar biasa maka pemerintah pada 3 Juli 2018 resmi mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana atau napi korupsi maju menjadi calon legislatif.

Larangan tersebut tertera di pasal 4 ayat (3) PKPU berbunyi: 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'. Substansi yang ditekankan dalam PKPU itu adalah mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, aturan pencalonan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra dari publik bahkan terjadi penolakan dari sejumlah pihak, namun aturan ini harus berjalan. "Dengan adanya aturan tersebut, parpol benar-benar harus memastikan calegnya bukan mantan napi kasus korupsi," katanya.

Namun, banyak pihak yang menyayangkan bahwa peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut Ketua Bawaslu Abhan berpegangan kepada UU Pemilu yang tidak melarang mantan koruptor nyaleg sedangkan KPU tetap berpegang kepada PKPU No.20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor maju nyaleg.



ISTIMEWA

Dualisme pemahaman aturan tersebut membuat masyarakat khawatir proses berjalannya pemilu akan banyak masalah. Dan, ternyata memang sudah ada gejolak diawali dengan pengajuan gugatan uji materi PKPU No. 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan diajukan oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk eks napi korupsi yang ingin maju nyaleg.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melihat bahwa mengacu kepada aturan perundangan bahwa argumen KPU dan Bawaslu sudah tepat sehingga hal tersebut membutuhkan jalan tengah.

"Untuk itu, pemerintah meminta MA segera memutus perkara tersebut agar KPU dan Bawaslu memiliki payung hukum yang jelas dalam menyikapi mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai caleg apakah peraturan KPU itu dibenarkan atau tidak," ujar Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Setelah dilakukan pengkajian, ditelaah dan dibahas oleh para hakim MA, maka pada 13 September 2018, MA mengeluarkan keputusan hasil uji materi PKPU No. 20 Tahun 2018, terutama pasal yang menyebut mantan napi korupsi tidak boleh maju nyaleg. Setelah melakukan sidang uji materi, jelas juru bicara MA Suhadi, majelis hakim MA berpendapat, PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, MA memutuskan, mantan napi korupsi boleh mendaftar sebagai caleg pada Pemilu 2019.

Menyikapi keputusan MA itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, KPU harus hati-hati sebab masalah tersebut sangat sensitif. Untuk merevisi PKPU, menurut Viryan, tidak sembarangan, ada tahapan-tahapannya. Dan, tahapan-tahapan itu tidak boleh diabaikan yakni, harus ada pleno, melakukan uji publik, harus RDP dengan DPR dan ada langkah-langkah tertentu yang harus dibahas. □

DER



# Perspektif Lembaga MPR RI untuk Masa Depan

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga luar biasa yang telah melewati empat era dalam perjalanan sejarah bangsa, yakni: Era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi yang sekarang sedang benjalan.

Dulu, pada awal disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, MPR RI memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi negara saat itu, MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Di era Orde Baru, MPR RI adalah lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi, kewenangan MPR sangat luar biasa. Selain berwenang mengubah dan menetapkan UUD, MPR RI juga memberi mandat kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta MPR juga memiliki wewenang melantik dan memberhentikan Presiden.

Pada 1998 era Reformasi 1998 bergulir. Untuk mengakomodir keinginan rakyat yang dimotori oleh gerakan masif mahasiswa seluruh Indonesia yang menuntut adanya perubahan besar-besaran di negara Indonesia maka terjadilah perubahan UUD 1945. Dalam perubahan tersebut, posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihilangkan, selanjutnya menjadi setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

Lalu setelah 20 tahun reformasi bergulir, dan MPR RI memasuki usia ke-73, mau dibawa kemanakah MPR ke depan? Bahwa MPR adalah salah satu lembaga atau organ negara (begitu bahasa-bahasa para ahli) merupakan bagian dari sistem tata negara yang dibentuk oleh konstitusi. Tentu ditetapkannya MPR RI sebagai satu organ dasar negara oleh konstitusi adalah atas dasar kehendak rakyat yang bersepakat.

Dalam menetapkan organ dasar negara itu tentu ada maksud dan tujuannya. Yaitu, *pertama*, organ tersebut (MPR) secara

kelembagaan harus memiliki posisi penting dan strategis di antara badan-badan atau alat kelengkapan yang ada dalam sistem tata negara sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh konstitusi ataupun peraturan perundangan. Dari segi *positioning* perannya harus maksimal. Tidak boleh ada satu lembaga yang perannya ternyata tidak maksimal atau perannya lemah.

*Kedua*, MPR RI dengan wewenang dan tugas-tugasnya tentu keberadaannya dituntut oleh konstitusi — yang notabene merupakan mandat dari rakyat — adalah untuk mengawal serta menyukseskan seluruh kewenangan dan tugas-tugasnya. Jadi, selama ini, dari 1945 hingga kini, 2018, atau selama 73 tahun, MPR RI makin ke sana sebenarnya arahnya makin ke depan.

MPR harus bisa menempatkan diri pada posisi strategis dalam konteks pelaksanaan wewenang dan tugasnya, dalam kehidupan bernegara, semakin bisa dirasakan masyarakat. Semua itu akan terjadi apabila bangsa ini menempatkan lembaga-lembaga Negara, termasuk MPR, pada posisi yang sesuai dengan perkembangan politik, perkembangan demokrasi, dan perkembangan kebutuhan tata negara-negara yang ada. Artinya, tata negara yang kita punya adalah terbuka, tidak tertutup, termasuk untuk dilakukan penyesuaian. Jadi, maknanya, konstitusi bisa saja menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik politik, demokrasi, maupun tata negara.

Jadi, dalam melaksanakan wewenang yang dimandatkan oleh rakyat, peran MPR harus bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Lebih spesifik lagi bisa dirasakan langsung oleh rakyat itu sendiri bahwa memang MPR itu terasa betul peran, kiprah, dan manfaatnya.

*Ketiga*, sebagai sebuah sistem, pasti dibangun sesuai dengan karakteristik bangsa itu sendiri. Demikian juga keberadaan MPR tentu sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, sehingga keberadaan



Oleh:  
**Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.**  
 Sekretaris Jenderal MPR RI



MPR akan terasa sekali oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mau dibawa kemanakah MPR ke depan? Idealnya adalah disesuaikan dengan karakteristik Indonesia dan sesuai dengan sistem yang khas Indonesia.

Intinya, sepanjang bangsa ini masih mengakui bahwa karakteristik Indonesia yang ada dalam ideologi bangsa yang sudah merupakan kesepakatan bersama itu tidak berubah, maka MPR juga akan tetap selalu sesuai dengan karakteristik bangsa tersebut. Kesesuaiannya di situ, yakni MPR sebagai salah satu organ dari ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi, dan konstitusi itu rujukannya adalah filosofi bangsa, dan filosofi itu adalah ideologi bangsa.

Namun, jika MPR tidak sesuai dengan karakteristik bangsa maka akan banyak dan terus-menerus bermunculan berbagai pertanyaan besar dari rakyat. MPR itu seperti apa?, mau dibawa kemana MPR?, dan idealnya bagaimana? Ini akan menimbulkan efek fatamorgana apabila jarak antara yang ideal dan nyata, atau antara *das sein* dan *das sollen* semakin panjang, dan MPR akan semakin jauh dari harapan.

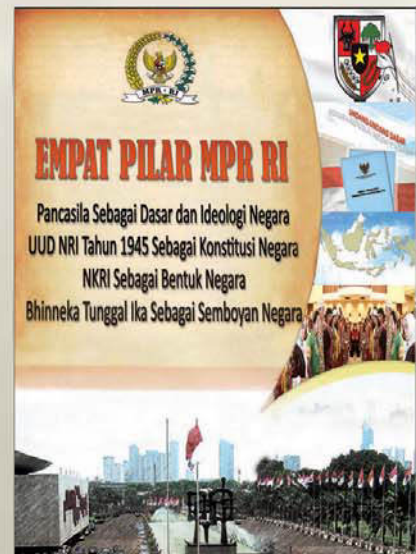
Dalam bentuk fisiknya, sejauh ini MPR selalu berupaya berada pada jalur karakteristik bangsa yang sesuai dengan konstitusi, antara lain MPR RI melakukan berbagai kegiatan, terutama yang terkait

dengan agenda-agenda kegiatan MPR, seperti Pekan Konstitusi, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Agenda-agenda itu adalah dalam proses menuju MPR ke depan.

Berbagai metode sosialisasi, seperti seminar, diskusi, Lomba Cerdas Cermat, lomba *Academic Constitutional Drafting*, dan lain sebagainya bertujuan mengajak rakyat untuk kembali memahami konstitusi Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan Pekan Konstitusi yang rutin diselenggarakan MPR RI setiap tahun, memiliki makna sebagai *learning process*, terutama buat generasi muda untuk menuangkan pikiran, gagasan, dan cara pandang terkait bangsa ini ke depan melalui konstitusi.

Karena konstitusi adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Konstitusi memiliki nilai strategis, terutama generasi muda, karena menggerakkan pikiran-pikiran generasi muda melalui berbagai kegiatan lomba dalam rangkaian acara Pekan Konstitusi, yakni Constitutional Drafting, Debat Konstitusi untuk mahasiswa, dan Lomba Cerdas Cermat untuk siswa SMA sederajat.

Tujuannya agar setiap warga negara harus memahami konstitusi. Karena kesadaran berkonstitusi hanya bisa dicapai kalau warga negara paham. Tugas MPR adalah untuk memasyarakatkan konstitusi Indonesia kita. □



#### Implementasi Sila-sila Pancasila

- 
  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
  - Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
  - Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- 
  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
  - Berhenti memaki, mulailah memakai hati
  - Berhenti curiga, mulailah menyapa
- 
  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
  - Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
  - Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- 
  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
  - Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
  - Berhenti bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
- 
  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
  - Stop diskriminasi, mulailah toleransi
  - Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



# Kebebasan Berpendapat **Tak Boleh Ada Larangan, Apalagi** Persekusi

Pada prinsipnya kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai aturan yang berlaku.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**EJATINYA kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran merupakan hak mendasar pada manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui hak asasi yang melekat pada manusia ini melalui deklarasi hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1945. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran dituangkan dalam pasal 19 dan pasal 20 deklarasi tersebut.

Dalam pasal 19 ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.”

Lalu, pasal 20 ayat (1) deklarasi hak asasi manusia itu menyatakan “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat”. Sedangkan ayat (2) menegaskan: “Tidak ada seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan”.

Negara Indonesia juga memberi jaminan hak kepada warga negara untuk menyatakan pendapat dan mengeluarkan pikiran secara bebas.

Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, menjamin hak asasi warga negara itu. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pada masa Orde Baru, pemerintah bertindak represif. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran untuk mengkritik pemerintah Orde Baru merupakan sesuatu yang tabu. Pemerintah membungkam kebebasan berpendapat. Meski demikian, tidak sedikit aktivis yang tetap menyuarakan kritik melawan tirani dengan berbagai risiko.

Setelah Presiden Soeharto jatuh pada 1998 sebagai penanda awal reformasi, orang mulai bebas menyampaikan pendapat dan pikiran tanpa harus dihantui rasa takut. Setiap orang bebas mengeluarkan aspirasi dan kritik serta tuntutan kepada pemerintah demi membela hak-hak rakyat. Reformasi memberi ruang yang cukup luas bagi setiap orang untuk berpendapat dan menyampaikan pikiran secara bebas.

Namun belakangan ini kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran menjadi polemik di masyarakat. Hak mendasar bagi manusia itu mulai dipertanyakan. Ini terkait dengan beberapa kasus yang





dianggap mengebiri hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. Pemicunya adalah penghadangan gerakan tagar 2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Penghadangan tak hanya terjadi pada gerakan #2019GantiPresiden semata, tapi juga penolakan diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung dan aktivis Ratna Sarumpaet di Lampung.

Penghadangan terhadap gerakan itu terjadi di Surabaya pada Minggu (26/8/2018). Sebelumnya, penghadangan juga terjadi di Pekanbaru. Bahkan, massa mendatangi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Banyak yang menilai penghadangan merupakan wujud dari kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran yang berujung pada persekusi.

Belum lagi kebebasan menyampaikan

pendapat, pikiran, dan aspirasi melalui media social, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, dan lainnya. Kadang-kadang kebebasan berpendapat di media sosial menjurus pada ujaran kebencian, *hate speech*, saling hujat, *hoax*, fitnah, menyebar kabar burung, dan lainnya. Lalu, bagaimana mendudukkan persoalan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran ini?

### Kebebasan Yang Kebablasan?

Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengakui, kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran serta kritik saat ini merupakan salah satu buah dari reformasi. Kebebasan berpendapat itu sendiri sebenarnya sudah dijamin konstitusi dan undang-undang. Namun, dia melihat dalam era reformasi ini

ada ekspresi kebebasan yang terlalu berlebihan, seperti tampak dalam penggunaan media sosial.

"Kita melihat di sebagian masyarakat ada ekspresi kebebasan yang terlalu berlebihan atau bahkan mungkin kebablasan, sehingga muncul berita-berita *hoax*, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya," katanya kepada *Majelis*.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, juga mengungkapkan, kebebasan berpendapat sekarang ini seolah-olah tanpa batas. Apalagi kebebasan berpendapat saat ini berkaitan dengan pemanfaatan media informasi dan teknologi yang semakin canggih, seperti media sosial sehingga seolah-olah kebebasan berpendapat tanpa batas.

"Saya menyebutnya, kita memasuki alam





Jazuli Juwaini

liberalisasi berekspresi dan berpendapat. Ini mengkhawatirkan karena alam liberalisasi itu tanpa memberikan ruang untuk menjaga hak-hak dan kepentingan, baik individu maupun kelompok. Alam liberalisasi berpendapat dan berekspresi ini sangat minim aturan main. Secara sadar atau tidak, alam liberalisasi berpendapat itu justru menjebak kita dalam kebebasan itu sendiri,” paparnya kepada *Majelis*.

Padaahal, sambung Andreas, hak serta kepentingan rakyat perlu dilindungi. Begitu pun kepentingan bangsa dan negara juga harus dilindungi. Kepentingan rakyat, bangsa dan negara adalah juga untuk melindungi kepentingan individu. Inilah hakikat kebebasan sesuai apa yang dicita-citakan dalam perjuangan reformasi.

Berbeda dengan Jazuli dan Andreas, pakar hukum tata negara, Refly Harun, tidak melihat kebebasan saat ini sudah kebablasan. “Saya rasa bukan kebablasan, tapi yang lebih tepat kita semua masih belajar berdemokrasi. Tapi jangan lantas karena kita masih belajar berdemokrasi sehingga boleh berbuat semaunya. Intinya, semua harus sesuai dengan koridor UU dan hukum yang berlaku,” jelasnya kepada *Majelis*.

Dalam demokrasi itu, lanjut Refly, satu hal yang harus dipahami adalah bagaimana menghargai perbedaan pendapat dan bagaimana membangun perbedaan

pendapat yang konstruktif. Kebebasan berpendapat memang sangat dijunjung tinggi di alam demokrasi. Tapi, harus sesuai dan menghormati UU serta hukum.

“Kita boleh mengkritik sekeras-kerasnya pendapat orang. Tapi, kita tidak boleh menyerang pribadinya. Yang dikritisi adalah gagasannya. Seharusnya dalam melemparkan kritik juga ditunjukkan di mana letak kesalahannya dan apa alternatif solusinya,” tuturnya.

Bagi Refly, media sosial memang sangat rentan sebagai sarana kebebasan yang tidak bertanggungjawab, meskipun ada juga

yang menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Karena dunia maya maka banyak orang tidak bertanggungjawab. Apalagi masyarakat sekarang ini mudah sekali marah. Pelampiasan rasa marah itu diungkapkan di media sosial.

Karena itu, menurut Refly, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan sebagai efek jera kepada mereka yang menggunakan media sosial dengan tidak bertanggung jawab. “Hukum harus ditegakkan dan kita sebagai orang terdidik harus belajar berdemokrasi secara beradab. Penegakan hukum harus diterapkan bagi yang melanggar. Jangan berikan toleransi kepada mereka yang melanggar,” tegasnya.

### Kebebasan Yang Bertanggungjawab

Sebenarnya, penyampaian pendapat dan pikiran sudah diatur dalam UU. Sebagai turunan dari Pasal 28 E UUD NRI Tahun 1945, lahirlah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) UU itu berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan pasal 2 ayat (2) UU itu menegaskan: “Setiap warga negara, secara



Refly Harun

perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum bisa berupa unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Warga negara yang akan menyampaikan pendapat di muka umum memperoleh perlindungan hukum dengan syarat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka kepolisian dapat membubarkan kegiatan tersebut.

Jazuli menegaskan, dengan UU itu pada prinsipnya kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku. Sepanjang ekspresi berpendapat dan penyampaian aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab maka tidak boleh ada larangan apalagi sampai dalam bentuk persekusi.

“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengingatkan, mengedukasi, dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar dalam penyampaian pendapat dan aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab,” ucapnya.

Jazuli menjelaskan, pasal 28 E yang memberi jaminan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat dan pikiran bukanlah pasal yang berdiri sendiri. Pasal ini dikaitkan dengan pasal 28 J, bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Artinya, pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

“Inilah esensi dari kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, setiap orang dalam melaksanakan kebebasan harus tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta aturan-aturan yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita tidak mengenal kebebasan yang

sebebas-bebasnya tanpa aturan atau bahkan kebebasan yang kebablasan,” jelasnya.

Aparatur penegak hukum wajib melindungi, memfasilitasi dan mengamankan setiap pelaksanaan hak kebebasan warga masyarakat. Namun, pada saat yang sama, aparaturnya juga harus bertindak untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. “Dalam posisi ini, aparaturnya harus bertindak adil, imparial, atau tidak berpihak pada kelompok manapun di masyarakat, serta tegas terhadap upaya yang mengganggu atau melanggar hak dan kebebasan warga Negara, serta mengganggu ketertiban dan keamanan,”

jika ada yang melakukan kesalahan. Intinya, penegakan UU dan hukum harus tegas, tidak pandang bulu dan berlaku untuk semua,” imbuhnya.

Sementara Andreas mengkaitkan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran dalam konteks Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Andreas menyebutkan bahwa Pemilu dan Pilpres hanyalah satu fase dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia memperkirakan dalam (kampanye) Pilpres, kebebasan berpendapat dan berekspresi akan semakin marak. “Jika tidak ada pengaturan yang lebih detail seputar kebebasan berpendapat dan



Andreas Hugo Pareira

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kata Jazuli.

Refly Harun juga sependapat bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin konstitusi. Tapi, dalam pelaksanaannya kebebasan itu tidak secara bebas sebebas-bebasnya. Ada koridornya, yaitu UU dan tidak boleh melanggar hukum. “Sepanjang kita tidak melanggar UU dan hukum, ya sah saja kebebasan berpendapat kita lakukan. Dan, negara menjamin hal itu,” katanya.

“Hukum harus tegas. Demokrasi ibarat sebuah pertandingan dan permainan. Dalam permainan itu ada koridor yang harus dipatuhi. Hukum itu wasit sekaligus bertindak

berekspresi maka liberalisasi berpendapat dan berekspresi akan terus terjadi,” ujarnya.

Andreas mengharapkan, masyarakat dan juga pemerintah bisa menjaga agar liberalisasi berpendapat dan berekspresi ini tidak liar dan ekstrim. Caranya, dengan meminimalisir bahkan menghilangkan informasi yang tidak benar atau *hoax*, dan menghilangkan upaya mendiskreditkan serta memfitnah pihak lain.

“Itu semua harus dijaga dan dibatasi sedini mungkin dan semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan luka terlalu pedih dan lama setelah Pilpres selesai nanti,” katanya. □

Tim Majelis



# Kebebasan Berpendapat dan Indeks Demokrasi Indonesia

Secara keseluruhan indeks demokrasi Indonesia pada 2017 mengalami peningkatan. Namun, salah satu variabel dalam indeks demokrasi itu, yakni kebebasan berpendapat justru mengalami penurunan.



**B**AGI negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan salah satu ruh dan pilar tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya secara cerdas dan bertanggungjawab. Jika tidak ada kebebasan berpendapat, apapun alasan kalau kebebasan berpendapat itu dikebiri maka tak akan ada demokrasi. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat menjadi hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).

Apalagi di era keterbukaan sekarang ini. Semua warga negara Indonesia berhak dan berwenang untuk menyatakan pendapat dan pikirannya secara bebas yang dijamin konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Ditilik dari sejarahnya, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Kemerdekaan mengemukakan pendapat itu tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB dalam pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 deklarasi itu berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandangi batas-batas wilayah."

Sedangkan pada pasal 20 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia itu menyatakan: "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat". Pasal (2) menegaskan: "Tidak ada seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan".

Sebagai turunan dari Pasal 28 E UUD NRI Tahun 1945, lahirlah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) UU itu berbunyi: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sedangkan pasal 2 ayat (2) UU itu menegaskan: "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum bisa berupa unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Warga negara yang akan menyampaikan pendapat di muka umum memperoleh perlindungan hukum dengan syarat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka kepolisian dapat membubarkan kegiatan tersebut.

## Lalu bagaimana kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia itu saat ini?

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu variabel indeks demokrasi. Demokrasi bisa diukur dengan berbagai variabel seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, peran peradilan yang independen. Dari variabel-variabel itulah diperoleh indeks demokrasi Indonesia.

Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar mengukur indeks demokrasi Indonesia. BPS telah lama menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bekerjasama dengan



**Maswadi Rauf**

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkumham), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BPS juga melibatkan tim ahli yang terdiri antara lain Prof. Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, Prof Musdah Mulia dari UIN, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, dan Syarif Hidayat dari LIPI.

Hasilnya, secara keseluruhan indeks demokrasi Indonesia meningkat. Namun, variabel kebebasan berpendapat menurun. Angka indeks demokrasi Indonesia pada 2017 mencapai 72,11 (dari skala 0 – 100). “Secara umum angka Indeks Demokrasi In-



**Syarif Hidayat**

donesia mengalami kenaikan, tetapi variabel seperti kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat menurun,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, pada pertengahan Agustus lalu.

Angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 mencapai angka 72,11 lebih tinggi dibandingkan IDI tahun 2016 sebesar 70,09. Menurut Suhariyanto, capaian kinerja demokrasi Indonesia dalam IDI tersebut masih berada pada kategori “sedang” atau antara indeks 60 – 80, di bawah kategori “baik” dan di atas kategori “buruk”.

Perubahan angka IDI dari tahun 2016 ke 2017 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil yang naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,84 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 63,05 menjadi 72,49). Variabel yang mengalami penurunan adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peradilan yang independen.

Sejumlah indikator yang memerlukan perhatian khusus, antara lain masih ditemukan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan yang terpilih terhadap anggota DPRD provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, serta inisiatif DPRD.

Hasil BPS ini tidak jauh beda dengan temuan The Economist Intelligence Units (The EIU). The Economist juga mengeluarkan indeks demokrasi tahunan. Dalam indeks yang mereka rilis, Indonesia mengalami penurunan skor signifikan dari peringkat ke-48 menjadi ke-68. Selain Indonesia, satu lagi negara demokrasi terbesar di Asia yang mengalami penurunan drastis adalah India. “Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran setelah pemilihan gubernur di Jakarta,” sebut The EIU dalam keterangan tertulis pada awal 2018.

Bahkan indeks demokrasi Indonesia berada di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 43 dalam skala global. Sedangkan untuk skala regional, Timor Leste berada di peringkat tujuh. Sementara itu, Filipina berada di urutan ke-51, dan Malaysia berada di peringkat ke-59. Kamboja di



**Suhariyanto**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

peringkat ke-124, Myanmar peringkat ke-120, Thailand di peringkat ke-107 dan Vietnam berada di peringkat 140.

Salah satu cermin melihat kebebasan berpendapat yang menurun adalah terkait dengan penyalahgunaan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, betapa mudah orang bisa memakai pasal UU ITE ini untuk menjerat seseorang. UU yang disahkan oleh DPR pada 20 Oktober 2016 itu justru memperburuk iklim kebebasan berpendapat.

Era saat ini, dibanding periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi masa suram penyalahgunaan pasal karet UU ITE. Pasal dalam UU ITE ini, misalnya terkait dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, terus digoreng oleh para pelapor, dari politisi hingga warga sipil biasa. Berdasarkan data yang dihimpun Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sebuah organisasi nirlaba yang mendorong kebebasan berekspresi dan berpendapat, sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014, hingga kini ada lebih 150-an laporan pidana UU ITE ke kepolisian. Dalam satu bulan minimal ada dua laporan dan maksimal 15 laporan ke kepolisian. Sebagai perbandingan, di era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2009, ada 61 laporan kepolisian. Dalam sebulan minimal ada satu laporan dan maksimal 9 laporan ke kepolisian. □

**BSC**





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Hidayat Nur Wahid**, Wakil Ketua MPR RI

## Negara Harus Adil Cegah Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

**U**NDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat atau berkumpul. Jaminan itu tertuang dalam Pasal 28 E ayat 2 dan 3. Pemerintah mengatur soal kebebasan berpendapat sebagai turunan dari UUD NRI Tahun 1945 melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini menyebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Bukan cuma perorangan, hak berpendapat itu juga berlaku untuk kelompok.

Kebebasan berpendapat ini menjadi persoalan ketika terjadi penghadangan dan penolakan, bahkan persekusi terhadap orang dan kelompok yang ingin menggelar deklarasi dan diskusi. Apakah kegiatan

tersebut melanggar aturan kebebasan berpendapat? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga politisi PKS beberapa waktu lalu. Petikannya:

**Terkait dengan hak mengemukakan pendapat dan pikiran, bagaimana Bapak melihat kasus penghadangan, penolakan, dan persekusi terhadap deklarator #2019GantiPresiden Neno Warisman di Pekanbaru, musisi Ahmad Dhani di Surabaya, atau Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung?**

Secara prinsip kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Tapi, hak asasi manusia dalam konteks NKRI jelas memiliki rambu-rambu. Bukan menjadi hak asasi manusia yang bersifat liberal dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.

Karena itu hak asasi manusia di Indonesia harus menghormati hak asasi manusia lain dan mempertimbangkan aturan hukum, termasuk agama dan budaya yang berlaku di Indonesia.

Jadi, kebebasan berpendapat dalam konteks hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh UU. Tapi, kebebasan berpendapat itu tidak boleh kemudian dijadikan sebagai sarana untuk menghadirkan pelanggaran hukum, anarki, atau perilaku yang tidak sesuai dengan agama dan budaya di Indonesia.

Adapun kasus penolakan, penghadangan, dan persekusi terhadap Neno Warisman, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan lainnya, kalau mereka dianggap melanggar aturan maka bukan massa yang melakukan pembubaran, apalagi massa bayaran yang memprovokasi, melainkan aparat kepolisian. Bukan massa yang dibiarkan melakukan persekusi. Ketika massa

dibiarkan melakukan persekusi maka massa itu sendiri sudah melakukan tindakan melanggar hukum. Sebagai negara hukum seharusnya hukum ditegakkan dan menilai apakah kegiatan seperti dilakukan Neno Warisman dan lainnya itu masih dalam koridor kebebasan berpendapat atau sudah bertentangan dengan kaidah dan prinsip HAM yang berlaku di Indonesia.

**Apakah kasus-kasus penolakan, penghadangan, dan persekusi itu menjadi ancaman untuk hak kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran?**

Iya, (kasus-kasus) itu adalah bagian yang mengancam kebebasan berpendapat. Karena semua itu tujuan akhirnya adalah menakut-nakuti kemudian membungkam agar suara yang kritis tidak lagi terdengar. Kalau

membuat media. Apalagi era teknologi informasi sekarang ini. Dulu belum ada media sosial. Kini, dengan media sosial, setiap orang bisa menjadi pembuat sekaligus penyebar berita, bahkan bisa merekayasa berita, dan itu sangat liberal.

Karena itu, agar semuanya tidak bertentangan dengan UUD dan UU, serta tidak melanggar HAM, maka perlu sosialisasi yang baik menyangkut UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sosialisasi itu penting agar masyarakat memiliki rujukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan suasana lebih demokratis dan bebas, orang bisa mencari dan mengirim berita dengan bebas. Agar tidak menjadi anarkis dan liberal, sosialisasi UU keterbukaan informasi publik dan UU ITE

melalui media publik. Artinya, itu adalah bentuk lain dari pemberangusan juga.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat, seharusnya pemerintah menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya, tidak berlaku berat sebelah. Misalnya, mereka yang mengkritik sedikit saja dianggap melanggar hukum. Pemerintah juga berlaku adil dengan mewajibkan lembaga pers normal melaksanakan kode etik jurnalistik, yaitu berita yang seimbang dan menampilkan dua sisi. Dengan cara itu, kebebasan berpendapat bukan hanya dimiliki para pendukung pemerintah saja, sementara mereka yang kritis diberangus.

**Bagaimana mendudukkan kembali agar kebebasan berpendapat tetap sesuai dengan amanah pasal 28 UUD**



terjadi pemandulan dan orang takut bersuara lagi lalu siapa yang akan bersuara kritis di Indonesia? Artinya, kebebasan itu seharusnya dikembalikan kepada arti kebebasan itu sendiri. Janganlah kebebasan itu hanya untuk para pendukung dan mereka yang memuji pemerintah, sedangkan mereka yang kritis dilakukan pembungkaman dan persekusi.

**Bagaimana jika dibandingkan dengan kebebasan berpendapat pada masa sebelumnya?**

Dulu, untuk membuat sebuah media harus memiliki SIUP terlebih dahulu dan SIUP itu sangat sulit didapat kecuali mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Sekarang, kebebasan berpendapat itu sudah amat liberal. Tidak ada ketentuan SIUP sehingga semua orang bebas untuk

menjadi sangat penting.

**Sejauh ini apakah negara sudah menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat?**

Sejauh ini negara sudah menjamin kebebasan berpendapat sebagai perintah UUD dan berlaku sejak era reformasi. Di era reformasi ini tidak ada lagi media yang dibredel. Di satu sisi negara memang memberi jaminan kebebasan berpendapat. Tapi, persoalannya, ketika kebebasan berpendapat di tingkat individual dan mereka bukan menjadi bagian pemerintah dan mengkritik pemerintah, maka kebebasan berpendapat masih butuh perjuangan lebih serius lagi. Apalagi sekarang semua media hampir diborong pemerintah, individu menyampaikan pendapatnya mungkin hanya bisa melalui jaringan media sosial bukan

**NRI Tahun 1945?**

Pertama, aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat perlu disosialisasikan dengan baik agar masyarakat mengetahui batas-batas kebebasan berpendapat itu. Ini penting agar tidak terjadi kebebasan yang kebablasan. Kedua, pemerintah melalui aparat hukum benar-benar hadir sebagai pengawal kebebasan berpendapat sehingga tidak terjadi tindakan anarkis. Selain itu harus adil dan tidak berpihak. Ketiga, perlunya keteladanan negara dalam hal kebijakan yang benar-benar hadir sehingga orang bisa melihat bahwa kita memiliki kebebasan berpendapat tanpa harus menjadi kebebasan yang liberal. Negara juga harus hadir untuk mencegah dan menghadapi pelanggaran atau persekusi yang terjadi. □



## Tinjau Lokasi Gempa di Lombok

# Ketua MPR Perlu Dukungan Penuh Pemerintah Pusat



Perlu dukungan penuh pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak bencana gempa di Lombok. Dan, Presiden sudah mengeluarkan Inpres untuk penanganan langsung bencana gempa Lombok.

**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan meninjau lokasi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah mendarat sekitar pukul 09.20 WITA di Bandara Praya, Lombok, Senin (28/8/2018), Zulkifli Hasan langsung menuju RSUD Kota Mataram. Dalam kunjungan ini Ketua MPR didampingi Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, anggota MPR Alimin Abdullah, Sekjen PAN Eddy Suparno, Deddy "Miing" Gumelar.

Tiba di RSUD Kota Mataram, Zulkifli Hasan disambut Walikota Mataram Achyar Abduh. Di rumah sakit, Zulkifli mendatangi pasien di tenda-tenda yang didirikan untuk merawat pasien. Untuk menghindari reruntuhan jika terjadi gempa, RSUD mendirikan tenda-tenda di halaman rumah sakit untuk perawatan pasien.

Gempa bumi di Mataram yang terjadi sejak 26 Juli lalu masih diikuti

gempa susulan. Pasien dan keluarga agaknya trauma dengan gempa sehingga memilih dirawat di tenda-tenda. Apalagi gedung rumah sakit tampak dalam kondisi retak-retak.

Zulkifli menemui pasien di ruang rawat inap pasien ICU dan stroke. Zulkifli sempat berdialog dengan pasien ibu Sadiyah. "Yang sabar ya...", hibur Zulkifli Hasan. Dia juga menyapa masyarakat yang sedang berobat di rumah sakit ini.

Dari rawat inap ICU dan stroke, Zulkifli juga melihat secara langsung ruang darurat untuk operasi. Sejak terjadi gempa, ruang operasi rumah sakit tidak berfungsi. RSUD Kota Mataram mendapat bantuan dari Pemda Jawa Timur berupa enam kontainer. Kontainer itulah kemudian diubah menjadi ruang operasi.

"Masalah trauma pasien dan keluarganya ini perlu segera diatasi. Mereka tidak mau dirawat di dalam gedung. Rumah sakit pun pindah pelayanannya di lapangan, di tenda-tenda," kata Zulkifli. Padahal secara teknis Kementerian PUPR menyebutkan gedung rumah sakit aman. Namun, masyarakat masih trauma.

Zulkifli mengatakan, perlu penanganan khusus karena pelayanan masih dilakukan di tenda-tenda. Zulkifli mengapresiasi penanganan selama ini namun dia mengharapkan seluruh stakeholder ikut terlibat karena bencana ini adalah soal kemanusiaan.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Setelah dari RSUD Kota Mataram, Zulkifli langsung beranjak ke lokasi gempa. Ketua MPR didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi melihat langsung reruntuhan bangunan akibat

gempa di Dusun Krujuk, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara. Selain meninjau lokasi gempa, Ketua MPR juga menyapa warga setempat yang bertahan di lokasi.

Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah terparah terkena gempa. Banyak bangunan hancur. Jumlah korban jiwa di daerah ini juga cukup besar dibanding daerah lainnya, yaitu mencapai 466 korban jiwa.

"Kita semua melihat dan menyaksikan bencana gempa yang terjadi di NTB ini sungguh besar. Jadi, tidak betul kalau dikesankan kecil. Bencana ini menimbulkan korban jiwa 500 lebih. Kita masih bersyukur karena kalau melihat lokasi seperti ini mungkin jumlahnya bisa ribuan korban jiwa. Karena total rumah yang rusak berat saja mencapai 70 ribu lebih," kata Zulkifli Hasan di Dusun Krujuk.

Melihat besarnya dampak gempa di Lombok ini, Ketua MPR meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk menanggulangi bencana ini. "Kita minta dukungan penuh pemerintah pusat, apalagi sudah ada Inpresnya. Kalau tidak salah anggaran untuk



penanggulangan bencana Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun. Dana itu bisa untuk bencana gempa di Lombok, saya kira bisa pulih kembali,” ujarnya.

Selain untuk membangun kembali rumah dan sekolah, Zulkifli juga meminta perhatian atas bangunan madrasah dan pondok pesantren yang rusak. “Kita juga minta perhatian khusus dari Kemenag untuk pondok pesantren di NTB ini,” pintanya.

Sementara Gubernur NTB TGB Zainul Majdi mengatakan, saat ini sedang berlangsung proses verifikasi rumah-rumah yang rusak untuk mendapatkan bantuan. Verifikasi sudah hampir mencapai 100%. Pemerintah pun telah menyiapkan rekening. Kemudian masing-masing kepala keluarga akan ditransfer uang bantuan. Rumah yang mengalami rusak berat mendapat bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. “Sudah ada (kepala



keluarga) yang ditransfer bantuan,” ujarnya.

Zainul Majdi mengungkapkan, data verifikasi terakhir yang diterima dari BNPB sekitar 17 ribu rumah yang rusak akibat gempa. Setelah proses verifikasi itu bantuan

langsung ditransfer ke kepala keluarga. Gubernur memperkirakan proses pemberian bantuan sampai selesai semua memakan waktu satu bulan. □

BSC

## MPR Serahkan Bantuan Untuk Korban Gempa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan melihat secara langsung lokasi pengungsian korban gempa di posko Kekait, Lombok Barat, Senin (28/8/2018). Di lokasi pengungsian, Ketua MPR menyerahkan bantuan kepada korban gempa berupa selimut, tenda, dan uang tunai.

“Kami prihatin dengan bencana gempa di Lombok Barat. Karena itu kami datang langsung untuk ikut merasakan apa yang dialami masyarakat Lombok Barat. Mudah-mudahan kedatangan kami bisa sedikit membantu dan menghibur,” kata Zulkifli. Ketua MPR didampingi anggota MPR Alimin Abdullah, Syafruddin, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, Sekjen PAN Eddy Suparno, dan Deddy Mi’ing Gumelar.

Kepada pengungsi dalam pertemuan di tenda, Ketua MPR berjanji akan menyampaikan persoalan yang dihadapi pengungsi kepada pihak terkait di Jakarta untuk segera melakukan penanganan. Zulkifli mengungkapkan, untuk rumah yang rusak

berat mendapat bantuan dari pemerintah. “Sekarang status darurat sudah lewat, dan mulai masa transisi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat belum masuk kategori bencana nasional. Meski demikian Presiden sudah mengeluarkan Inpres untuk penanganan langsung bencana alam. “Mohon sabar sedikit ya ibu-ibu...,” pinta Zulkifli.

Sementara itu Bupati Lombok Barat Fauzan Halid mengungkapkan sebanyak 53.000 rumah rusak. Dari jumlah itu, 23 ribu rumah rusak berat, rusak sedang 15 ribu, sisanya rusak ringan. Penanganan pada masa darurat adalah menjamin kebutuhan primer, seperti air bersih. Masa darurat sudah lewat. Pada masa transisi ini fokus pada verifikasi rumah rusak, sehingga pada awal September sudah ada rumah yang dibangun.

“Dari pemerintah bantuan 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan rusak ringan Rp 10 juta. Semua bantuan itu atas dasar SK Bupati,” katanya. □

## Dialog Empat Pilar MPR

# Penyelenggaraan Pemilu 2019 Harus Ekstra Hati-hati

Penyelenggaraan Pemilu 2019 diminta ekstra hati-hati, karena masih banyak persoalan perlu diselesaikan di seputar Pileg dan Pilpres 2019.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**G**ONJANG GANJING menyoal caleg mantan koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak yang akan bertarung pada Pileg 2019 telah reda. Tetapi, persoalan lain yang diperkirakan akan membalut kontestasi Pileg dan Pilpres 2019 sesungguhnya belum selesai.

Untuk itu, jauh-jauh hari Ketua Komisi II DPR RI yang juga anggota Fraksi Partai Golkar MPR Zainudin Amali mengingatkan agar para penyelenggara Pileg dan Pilpres 2019 bersikap ekstra hati-hati. Karena pemilihan umum yang akan berlangsung pada 17 April 2019 itu adalah pemilu lima kotak pertama yang akan dilalui bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengelola pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II secara bersamaan.

Sikap kehati-hatian itu, kata Zainudin, sangat penting untuk menghindari munculnya kegagalan penyelenggaraan pemilihan umum. Karena satu kegagalan dalam pelaksanaan pemilu akan menyebabkan kegagalan-kegagalan lain. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyiapkan

segala sesuatunya dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

“Dari dua simulasi yang sudah dilakukan di Bogor dan Tangerang, waktu yang disyaratkan oleh UU, yaitu selama satu hari, tidak bisa dipenuhi. Ini patut menjadi perhatian, KPU harus segera menemukan jalan keluar soal tafsir pelaksanaan pemilu yang memiliki batas waktu selama satu hari”, kata Zainudin Amali.

Pernyataan itu disampaikan Zainudin Amali saat menjadi narasumber pada Dialog Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR, DPR, DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/8). Selain Zainudin Amali, diskusi yang membahas tema: ‘Menuju Pemilu 5 Kotak’, itu juga menghadirkan pembicara Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain menyoal waktu, kata Zainudin, KPU juga masih memiliki pekerjaan rumah terkait peraturan turunan dari UU No. 7 tahun 2017. Baik yang berbentuk PKPU maupun Peraturan Bawaslu. Misalnya saja soal

putusan MK tentang DPD.

“Simulasi yang dilakukan di Banten dan Bogor menunjukkan pelaksanaan pemilu melewati batas waktu yang disyaratkan oleh UU, yaitu satu hari. Ini harus dicarikan jalan keluarnya agar ke depan tidak menjadi batu sandung bagi pihak tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilihan,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurutnya, peluang terjadinya perselisihan soal pemilu akan muncul setelah diketahui siapa pemenangnya. Karena itu, sejak dini KPU meminta kepada Komisi II DPR RI untuk duduk bersama, membahas berbagai persoalan yang mungkin akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Undang-Undang mensyaratkan peserta pemilu yang sah itu adalah mereka yang sudah memiliki e-KTP. Tetapi di daerah Papua dan Papua Barat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. “Jadi, saat ini di depan mata sudah ada dua persoalan yang harus segera dipecahkan. *Pertama*, soal waktu bagi pelaksanaan pemilu; dan *kedua*, soal E-KTP,” kata Wahyu Setiawan. □

MBO



## Final Constitutional Drafting

# Pelita Harapan Kalahkan Padjadjaran dan Gajah Mada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**E**NAM perguruan tinggi mengikuti 'Putaran Final Constitutional Drafting MPR' yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 28 Agustus 2018. Keenam perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Diponegoro. Mereka lolos seleksi dari 16 perguruan tinggi yang mengirimkan naskah akademik.

Sebagai acara yang bergengsi bagi mahasiswa fakultas hukum (FH), acara yang digelar secara rutin oleh MPR itu sangat diminati oleh para mahasiswa. Danu Pratama, peserta dari Universitas Indonesia, mengatakan, timnya mempersiapkan diri sejak 3 bulan lalu. Selama tiga bulan, ia bersama rekan lainnya rutin melakukan pertemuan untuk diskusi, bertanya ke dosen pembimbing, dan membaca buku terkait seperti buku mengenai perundang-undangan, dan hukum tata negara karya pakar dari Prof. Maria Farida Indrati dan Prof. Jimmly Asshidiqie. "Rutin bertemu, diskusi, dan mematangkan materi", ujarnya.

Tim dari Universitas Indonesia itu tak hanya mempersiapkan materi dalam presentasi, namun juga mempersiapkan mental agar tidak gugup saat berlomba. "Untuk itu kami saling support satu dengan yang lain",

ungkapnya.

Menurut Danu, acara yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) MPR itu dinilai sangat bagus. Bisa jadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan kepada MPR. "Ini menunjukkan MPR terbuka bagi masyarakat", paparnya.

Bagi dosen pembimbing, 'Constitutional Drafting' juga sebagai acara yang bagus. Tak heran bila dosen FH Universitas Diponegoro, Lita Tiesta, yang mendampingi tim kampusnya, menyebut mahasiswa yang dibimbing melakukan persiapan jauh-jauh hari. Di kampus yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, itu ada Himpunan Mahasiswa Tata Negara. Dari himpunan mahasiswa itulah sudah dipersiapkan tim lomba dan mereka melakukan regenerasi. "Kita melakukan latihan terus-menerus", ujarnya. Salah satu latihan disebutkan, para mahasiswa mendatangi dosen sesuai kapasitasnya.

Selama mengikuti 'Constitutional Drafting', Lita merasa bangga sebab Universitas Diponegoro selalu masuk dalam putaran final di Jakarta. Lita menyebut, acara yang digelar oleh MPR itu bisa melatih mahasiswa mengenai kinerja lembaga negara dan mengasah keilmuan yang dikuasai. "Dari sini mereka paham bagaimana membuat perundang-undangan yang baik", ungkapnya.

Dalam lomba itu, para peserta akan diuji

naskah akademiknya oleh Prof. Maria Farida Indrati dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat; Prof. John Adrian Titaley dari Universitas Pattimura, Ambon, Maluku; Prof. Masrukhi dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah; Dr. Hamdan Zoelva dari Lembaga Pengkajian MPR, dan Dr. Refly Harun pakar hukum tata negara.

Selepas diuji oleh pakar, Baidi Meiriyadi dari FH Universitas Jambi mengatakan, acara yang diikuti itu mampu membuka cakrawala untuk meningkatkan pengetahuan perundang-undangan. "Ini sangat bagus untuk memahami mekanisme proses di DPR", ungkapnya. Disebut pertanyaan dari penguji sangat menantang. "Ya karena mereka kompeten di bidangnya", ujarnya.

Satu-satunya tim dari luar Jawa itu mengakui persiapan untuk menuju Jakarta telah dipersiapkan sejak 3 bulan lalu. Selama mempersiapkan diri mereka mendalami ilmu perundang-undangan. "Selain itu juga mengikuti isu aktual yang terjadi di MPR", ujar pria yang bercita-cita jadi wakil rakyat itu.

Perasaan yang sama juga dikatakan oleh anggota tim Universitas Jambi lainnya, Annisa Khairiyah dan Herlin Noviyanti. Annisa mengatakan, dirinya mengapresiasi lomba itu. Menurutnya, wadah untuk mengembangkan ilmu yang ditekuni dan mengetahui proses penyelenggaraan negara. Bagi Herlin, acara itu mampu

memberikan pengalaman dan membuka cakrawala berpikir bagi generasi muda.

Keduanya mengakui pertanyaan yang diajukan oleh penguji terkadang sulit, variatif, namun sangat membangun. “Membuat kita berpikir”, ungkapnya. Bagi mereka, dewan juri yang berada di hadapannya diakui sangat memotivasi. “Orang-orang penting dan sering muncul di televisi”, akunya. Mereka mengakui ada rasa gugup, namun hal demikian bisa diatasi saat menjawab pertanyaan.

Sebagai penguji, Hamdan Zoelva mengakui, peserta ‘Constitutional Drafting’ ada yang penguasaan materinya bagus, namun ada pula yang dirasa masih kurang. “Untuk mahasiswa S1 penguasaan mereka sudah sangat bagus”, ujarinya. Kekurangan yang ada disebutkan dalam penguasaan ilmu



perundang-undangan. “Ilmu perundang-undangannya masih ada yang kurang”, ungkapnya. Ilmu ini, menurut Hamdan, sangat penting dalam ‘legal drafting’. Meski demikian dirinya menyebut bagi mahasiswa S1 sudah sangat luar biasa dalam menyusun makalah, kerangka teori, dan seterusnya. “Meski kadang kerangka teorinya tidak nyambung dengan rumusan normanya”, akunya.

‘Constitutional Drafting’ yang diselenggarakan oleh MPR disebut mantan Ketua MK itu sebagai acara yang banyak gunanya. “Untuk menyerap aspirasi dari anak-anak muda tentang bagaimana MPR sebaiknya”, katanya. Bagi mahasiswa acara itu diakui sebagai sarana untuk memahami prestasi akademik, serta upaya mengetahui tentang penyelenggaraan konstitusi dan kelembagaan negara. “Bagi MPR sendiri acara ini bisa menjadi masukan. Sekecil apapun masukan dari generasi muda itu ada gunanya”, paparnya.

Refly Harun menyebut, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari lomba itu. *Pertama*, soal kemampuan berbicara di depan publik. “Dengan lomba yang perlu dipoles bagaimana kita bisa bicara dengan luwes dan tidak kaku”, ungkapnya. Diakui, dari sisi oral peserta rata-rata lancar ngomongnya, namun diakui pula gesture mereka kadang bukan seperti orang yang lagi presentasi. “Mungkin masih ada rasa gugup,” sebutnya.

*Kedua*, dari sisi substansi, dengan lomba seperti ini substansi yang digagas oleh mahasiswa bisa berkembang lebih jauh. Refly mengakui, dari segi substansi peserta sangat terpengaruh oleh keinginan MPR yang selama ini dibaca di media, yakni MPR ingin dikuatkan, membuat haluan negara. “Nah ini secara langsung mempengaruhi mereka sehingga membuat mereka dalam



lomba ini tidak berani keluar, out of the box”, ucap pria asal Palembang, Sumatera Selatan, itu. Padahal, menurutnya, lomba itu bagian dari ‘academic drafting’. Dikatakan, dalam ‘academic drafting’ sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik itu tak menjadi masalah. “Sepertinya mereka khawatir”, ungkapnya. Meski demikian dirinya memaklumi kekhawatiran itu, sebab kadang-kadang juri punya value sendiri. “Bagi saya pribadi kalau mereka mau ‘out of the box’, mengemukakan teori dan komposisi baru, itu tak ada masalah”, ucapnya.

Terlepas dari itu, alumni FH Universitas Gadjah Mada itu menyebutkan, antara peserta dan MPR ada timbal balik. Bagi peserta bisa semakin mengasah kemampuan. “Di kampus mereka diseleksi dan berjenjang”, ujarinya. Dari sinilah akan memacu motivasi untuk belajar. Sedang bagi MPR, kegiatan ini sebagai upaya untuk menjalin kerja sama dengan kampus se-

hingga ada ‘link and match’. “Hal demikian membuat kampus tidak menjadi menara gading”, tuturnya. Untuk MPR manfaat dari lomba adalah bisa mendapat perpekstif akademik. “Walaupun mahasiswa S1 tetapi yakinlah pendapatnya bernas”, akunya.

Kepala Bagian Pengelolaan Data Kajian Setjen MPR, Tommy Andana, mengatakan, presentasi 6 kampus dalam ‘Constitutional Drafting’ merupakan tahap kedua dari tahapan pertama yang sudah dilakukan. Dipaparkan, tujuh bulan sebelumnya, MPR memberitahu kegiatan itu kepada perguruan tinggi, baik lewat media massa maupun pemberitahuan langsung ke kampus-kampus. Dalam pemberitahuan itu disebut syarat mengirimkan naskah dengan ketentuan yang ada dengan tema UU Tentang MPR.

Dalam masa tujuh bulan ada 17 naskah dari 16 perguruan tinggi yang masuk. Naskah yang ada disebut oleh Tommy diseleksi oleh pakar untuk melihat kualitas, isi, dan substansi, serta penulisan apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. “Dari situ kemudian diperingkat”, ujarinya. Setelah diperingkat ada enam naskah yang layak untuk dipresentasikan. “Nah di tahap kedua inilah tahap presentasi dilakukan,”paparnya.

Penilaian yang dilakukan, menurut Tommy, dihitung secara kumulatif antara hasil penulisan dan presentasi. “Pemenangnya akan diumumkan pada puncak HUT MPR pada 29 Agustus 2018”, ungkapnya. Dan, ketika pada 29 Agustus 2018 diumumkan, pemenangnya adalah juara I Universitas Pelita Harapan, juara II Universitas Padjadjaran, dan juara III Universitas Indonesia. □

AWG



Dialog Live TV

# Zulkifli Hasan: Politik MPR Adalah Politik Kebangsaan

MPR adalah milik rakyat. Di tahun politik, MPR tetap berada di tengah, menerapkan politik kebangsaan dan kebhinnekaan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

INDONESIA saat ini sedang berada dalam tahun politik, yakni Pilkada serentak 2018 yang ternyata berjalan sukses tanpa konflik berarti, dan sebentar lagi akan menghadapi pemilu serentak, yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Pilpres 2019 adalah momen yang paling dikhawatirkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebab, potensi konfliknya sangat tinggi dengan dua kubu pendukung capres dan cawapres yang sama-sama besar. Bahkan, aroma 'perseteruan' dukung mendukung Pilpres 2019 sudah makin terasa saat ini dan makin terasa panas mendekati hari H pelaksanaan Pilpres.

Pertarungan rivalitas antar dua kubu pendukung bahkan sudah sangat ramai dan panas di media sosial, seperti facebook, twitter, instagram dan berbagai grup WhatsApp. Walaupun berada di ranah dunia maya tak menutup kemungkinan perseteruan berpotensi turun ke dunia nyata, hal tersebut semestinya harus dicegah sejak dini.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan)

mengungkapkan bahwa MPR RI sangat concern akan hal-hal tersebut. Sebagai 'Rumah Rakyat Indonesia', MPR juga memiliki arah politik untuk menghadapi tahun politik yang dirasakan makin panas tersebut. Arah politik MPR adalah politik kebangsaan, yakni apapun pilihannya tapi semua tetap satu bangsa dengan Merah Putih yang sama.

"MPR mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pilpres 2019 adalah kontestasi politik yang biasa saja di Indonesia, dan rutin diselenggarakan setiap lima tahun. Karena sudah biasa maka semestinya untuk menghadapi semuanya biasa saja, ikutilah semua prosesnya, pilihlah sesuai hati masing-masing. Jangan dianggap terlalu luarbiasa sehingga memandang yang beda pilihan itu lawan dan musuh bebuyutan yang harus dimusnahkan, jangan seperti itu. Boleh beda pilihan asal jangan saling berkelahi," katanya, dalam acara bincang-bincang 'Coffe Break' dengan tema 'Peran MPR di Tahun Politik' yang ditayangkan live TV One, di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Zulhasan mengungkapkan, rumus memilih

Presiden tanpa konflik sebenarnya sederhana saja, antara lain jika rakyat merasa kepemimpinan Presiden yang sekarang baik, bagus dan memenuhi harapan masyarakat, pilih saja lagi untuk periode berikutnya. Namun, jika dirasakan semakin membuat rakyat susah, tidak ada perubahan sama sekali maka memilih Presiden baru juga tidak ada masalah. Itu semua adalah proses demokrasi yang biasa saja.

"Kami di MPR berusaha dengan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia agar memahami tahun politik dengan bijak dengan bingkai persatuan dan NKRI. Contohnya, kemarin sampai malam, Rabu, 29 Agustus, MPR merayakan HUT ke-73 dengan tema besar: 'Syukur dan Doa Bersama'. Intinya mengajak rakyat Indonesia untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT untuk Indonesia dan berdoa bersama agar ke depan Indonesia baik-baik saja, aman, tenteram tanpa konflik dan berdoa bersama untuk Indonesia sejahtera," ujarnya. □

DER

## Diskusi Empat Pilar MPR

# Saat Ini Terjadi Ledakan Partisipasi Politik

Partisipasi politik juga ditandai dengan penggunaan media sosial dengan konten politik. Partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik ini.

**D**I INDONESIA saat ini sedang terjadi ledakan partisipasi politik. Ini tampak dari penggunaan media sosial, seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya berkaitan dengan konten politik. Penggunaan media sosial di Indonesia termasuk terbesar di dunia. Partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik ini.

Demikian dikatakan pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, Ph.D., dalam diskusi bertema: “Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Humas MPR ini juga menghadirkan narasumber anggota MPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding.

Nyarwi menjelaskan, partisipasi politik adalah substansi atau inti dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. “Tagar 2019 Ganti Presiden atau tagar 2019 Tetap Bersaudara, merupakan satu metamorphosis partisipasi politik. Partisipasi bertemu antara yang *online* dan *offline*, atau antara media sosial dan kenyataan (real). Ini positif karena partisipasi kelas menengah yang sebelumnya malu-malu sekarang muncul dan menguat. Bahasa-bahasa politik tidak lagi dengan bahasa standar, yang formal, ilmiah. Tapi bahasa visual, seperti meme,” jelasnya.

Karena itu, Nyarwi menegaskan bahwa saat ini terjadi ledakan partisipasi politik di Indonesia. Ini dapat dilihat dari pengguna media sosial, termasuk facebook, twitter, di Indonesia terbesar di dunia. “Karena memang ledakan partisipasi politik sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Ini harus di-*manage*. Ledakan partisipasi politik ini bisa positif, artinya partai politik memanfaatkan partisipasi politik, misalnya mengambil peran dalam narasi. Atau menggaet aktor-aktor penting untuk masuk dalam partai politik,” kata Nyarwi yang juga Direktur Presidential Studies—DECODE UGM.

“Saya optimistis ledakan partisipasi politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

di Indonesia, seperti terlihat dalam aktivitas diskusi, platform politik, bisa memberi manfaat positif. Artinya, orang peduli dengan dunia politik. Itu sudah satu poin. Karena itu, tingkat kepercayaan pada partai politik perlu ditingkatkan. Bonus demografi dan kelas menengah akan membuat riuh perpolitikan,” sambungnya.

Sebagai perbandingan, partisipasi politik di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya. Negara-negara lain risau karena rendahnya partisipasi politik. “Partisipasi dalam pemilu negara lain, rata-rata tidak sampai 60%. Partisipasi dalam pemilu 50% saja sudah tinggi, seperti di Italia. Partisipasi politik di Indonesia yang 70% sudah tinggi sekali,” ucapnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, partisipasi politik menjadi ukuran bagi demokrasi. Kalau partisipasinya besar

dianggap demokrasi lebih baik. Tapi kalau partisipasinya rendah maka menjadi lampu kuning bagi demokrasi. Partisipasi bisa menjadi ukuran legitimasi sebuah kekuasaan.

“Saya kira para politisi harus secara cerdas dan kreatif menggunakan instrumen media komunikasi, seperti media sosial untuk menggerakkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban memilih. Medsos harus menjadi instrumen,” katanya.

Apalagi 30% pemilih adalah generasi milenial. “Karena itu, kita harus berkampanye dan melakukan pendidikan dengan mengetahui karakter dan harapan generasi ini. Mereka ini mobile, suka internet, yang praktis, berbau hobi, uang cash sudah tidak terlalu tertarik. Ciri-ciri mereka harus dipahami. Mereka juga mudah berpindah. Satu saat bisa ke Jokowi, tapi bisa pindah ke Prabowo,” paparnya. □

BSC



Kabupaten Lombok Utara

# Cak Imin Kunjungi dan Bantu Korban Gempa Lombok

Dalam sehari, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar mengunjungi beberapa titik tempat pengungsian korban gempa Lombok. Cak Imin ingin di Pulau Seribu Masjid itu pembangunan infrastruktur dipercepat, terutama sekolah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**I BANGUNAN berdinding bambu, beratap ijuk kelapa, serta beralas tikar plastik, terlihat ratusan anak-anak berkumpul. Bangunan yang berada di tanah lapang Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu adalah bangunan sekolah darurat.

Tempat yang biasa mereka gunakan untuk belajar roboh akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sambil menunggu gedung sekolah dibangun kembali, masyarakat dan relawan mendirikan bangunan darurat agar ratusan anak tetap bisa belajar.

Pada Jumat, 7 September 2018, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar berkunjung ke sekolah darurat itu. Kedatangan pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu disambut dengan gembira oleh anak-anak dan masyarakat sekitar.

"Saya bersyukur bisa bertemu adik-adik semua", ujarnya. "Kalian harus tetap semangat", tambahnya. Dirinya senang melihat anak-anak SD Negeri 3 Sigar Penjalin itu tetap semangat meski tempat belajarnya serba terbatas. Dia berharap, semua tetap semangat di tengah musibah gempa yang

baru dialami. "Ini ujian agar kita sabar", tuturnya. Kejadian yang dialami disebut sebagai ujian ketaqwaan. Dengan kondisi seperti itu anak-anak akan mengalami rasa tak nyaman bila turun hujan.

Menyikapi hal demikian, Cak Imin meminta agar pemerintah mengambil langkah cepat dalam memulihkan Lombok pasca gempa. Dia menegaskan infrastruktur agar segera dibangun. "Prioritaskan bangunan sekolah", ujarnya. Dia mengharapkan, sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan cepat dibangun sehingga anak-anak bisa segera recovery dalam dunia pendidikan.

Sekolah darurat yang ada, menurut mantan Ketua PB PMII, itu harus dipikirkan apalagi saat musim hujan. "Hujan akan segera tiba, untuk itu bangunan sekolah darurat harus mendapat pengganti yang memadai", paparnya. Sambil menunggu rehabilitasi bangunan sekolah, Cak Imin menegaskan, harus ada tenda-tenda aman dari hujan. "Saya harap, rehabilitasi sekolah betul-betul menjadi prioritas", ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan yang terlibat pemulihan pasca gempa Lombok. Mereka datang dari berbagai

tempat. "Mudah-mudahan semua perjuangan dan solidaritas jadi amalan yang diterima Allah", ucapnya.

Ia mengatakan, kedatangan dirinya selain untuk bersilaturahmi juga memberi bantuan kepada para korban gempa. Kepada anak-anak, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sekolah. Kepada masyarakat juga diberikan bantuan. Dia berharap di masa darurat, para relawan dan masyarakat terus berkomunikasi dengan dirinya agar bantuan terus diperhatikan. Kepala SD Negeri 3 Sigar Penjalin, Lalu Jumli, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Cak Imin. "Mudah-mudahan kedatangan beliau bisa membawa masyarakat di sini ke depannya menjadi lebih baik", harapnya.

Masyarakat Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, NTB, biasa menunaikan sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat sunnah lainnya di Masjid Darul Falah. Namun, selepas gempa yang melanda Lombok beberapa waktu lalu, masjid megah di desa itu mengalami kerusakan cukup berat. Akibatnya, masjid yang berkubah hijau itu tak bisa digunakan.

Sebagai gantinya masyarakat di sana



mendirikan masjid darurat di salah satu lapangan desa. Wujud masjid darurat itu seluas lapangan bola voli dengan bentuk bangunan beratap dan beralaskan terpal berwarna hijau dengan dikelilingi oleh terpal setinggi 1 meter. Di sekeliling masjid, selain ada bilik-bilik kamar untuk MCK juga ada kran-kran untuk wudhu.

Pada Jumat itu, 7 September 2018, umat Islam menjalankan kewajiban sholat Jumat. Hadir dalam sholat Jumat itu selain masyarakat juga ada Cak Imin. Selepas sholat Jumat, takmir mengumumkan kepada masyarakat bahwa di tengah jamaah hadir Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan itu, takmir juga mengungkapkan kepada tamunya itu bahwa gempa yang terjadi telah melumpuhkan aktivitas masyarakat Lombok Utara.

Menanggapi semua yang terjadi di Lombok, Cak Imin di hadapan jamaah sholat Jumat mengatakan kehadiran dirinya ke Lombok untuk melihat secara langsung apa yang terjadi. "Setelah melihat langsung, saya merasakan apa yang dirasakan oleh para korban gempa Lombok", ungkapnya.

Menurut alumni UGM itu, musibah yang menimpa harus kita terima dengan lapang dada, tawakal, dan terus berbenah. Baginya, musibah yang terjadi bisa jadi merupakan cara Allah untuk meningkatkan derajat umatnya. "Agar membangkitkan kehidupan dan kebahagiaan", ujarnya. Dia mengatakan,

sementara lagi umat Islam akan merayakan Tahun Baru Islam. Tahun baru Islam itu diharapkan menjadi tonggak kebangkitan masyarakat Lombok.

Dari penanganan gempa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, diakui sangat bagus. Bantuan dari berbagai pihak disebut menunjukkan kita semua sebagai keluarga. "Mereka dan para relawan telah meng-amalkan apa yang diperintahkan oleh agama", tuturnya. Meski demikian, ditegaskan perlunya percepatan pembangunan fasilitas umum di wilayah korban Lombok. "Infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat harus dipercepat pembangunannya", tegasnya.

Pembangunan fasilitas umum penting apalagi menghadapi musim hujan. Untuk itu, Cak Imin mengatakan, akan benar-benar memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan gempa Lombok dengan menyampaikan masalah itu langsung kepada Presiden dan pihak-pihak terkait. "Saya juga akan menyerukan kepada bangsa-bangsa di dunia agar membantu korban gempa Lombok", ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan, bangsa ini sudah mempunyai pengalaman dalam menangani korban bencana alam. "Saya pernah menjadi tim penanganan bencana tsunami di Aceh", ungkapnya. "Semua bisa ditangani dengan baik", tambahnya.

Bantuan dari luar dirasa penting, namun dia juga menekankan pentingnya masyarakat korban gempa Lombok menunjukkan semangat untuk bangkit. "Di sini penting juga untuk menunjukkan sikap bangkit", ujarnya. "Bila yang di sini semangat maka masyarakat di luar juga akan lebih semangat untuk membantu", tambahnya.

Selepas mengunjungi korban gempa di Dusun Murpayung, Cak Imin menuju Dusun Lendang Galuh, di desa yang sama. Di dusun ini kondisinya serupa dengan yang ada di Dusun Murpayung. Di tempat ini pria asal Jombang, Jawa Timur, itu selain bertatap muka dengan para korban gempa juga memberi sumbangan.

Korban gempa tidak hanya terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Di Lombok Barat, gempa yang terjadi juga menimbulkan korban dan kerugian. Untuk itu, ia mengunjungi korban gempa yang berada di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Seperti di tempat sebelumnya, dia mengajak semua untuk sabar dan tawakal dalam menghadapi bencana. Meski demikian dirinya mengajak mereka untuk bangkit. Dia menuturkan, Allah mempunyai niat baik dalam setiap kejadian. "Setelah bencana, kita bangkit sebagai bangsa yang maju dan siap menghadapi berbagai tantangan", paparnya. □

AWG



## Kunjungan Ketua Senat Republik Ceko

# MPR Berharap Kerjasama **Indonesia-Ceko** Meningkat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Ketua Senat Ceko datang ke Indonesia membawa rombongan pengusaha. Mereka ingin hubungan Indonesia-Ceko meningkat dalam berbagai bidang.**

**T**ERIMA KASIH atas kunjungan yang mulia", ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyambut Ketua Senat Republik Ceko Milan Stech. "Semoga menjadi kunjungan yang menyenangkan", tambahnya. Stech pada 17 September 2018 bersama puluhan anggota delegasi lainnya diterima Pimpinan MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan itu Wakil Ketua MPR E. E Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid serta anggota MPR dari Fraksi Golkar Idris Laena, anggota MPR dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono, ikut menyambutnya.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan hubungan kedua negara telah berjalan selama 25 tahun, dan selama ini berjalan baik. "Kami meyakini kunjungan Yang Mulia akan memperkuat hubungan, tidak hanya antarpemerintah namun juga antarpemerintah dan masyarakat", harap pria asal Lampung itu.

Kepada Stech dan anggota Senat Ceko lainnya, Zulkifli Hasan

memberitahu bahwa di MPR ada 10 fraksi dan satu kelompok DPD. "Mereka ini berhasil lolos dalam Pemilu", ujarnya seraya menjelaskan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

Zulkifli Hasan mengungkapkan pada 1998 di Indonesia terjadi reformasi. Dalam era reformasi terjadi amandemen UUD Tahun 1945. Akibatnya, ada perubahan undang-undang dasar. Menurut Zulkifli Hasan, amandemen yang terjadi membawa perubahan pada kedudukan MPR. "Sebelum reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi", ujarnya. Dalam posisi yang demikian membuat MPR mempunyai kewenangan menyusun haluan negara dan memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden.

Setelah amandemen, kewenangan itu tak lagi dimiliki oleh MPR. Kekuasaan yang ada didistribusikan ke berbagai lembaga Negara, seperti DPR, DPD, MK, KY, BPK, MA, dan Presiden. "Semua setara", paparnya. Meski demikian, Zulkifli Hasan menjelaskan, fungsi MPR tetap, yakni bisa mengubah konstitusi serta melantik dan memberhentikan presiden.

Dalam acara yang diliput oleh beragam media itu, Zulkifli Hasan mengabarkan kepada Stech bahwa Indonesia adalah negara beragam, baik itu suku, bahasa, agama, dan budaya. Mereka terbagi dalam 700 bahasa, 6 agama resmi, dan tersebar di 17.000 pulau.



**Milan Stech dan Zulkifli Hasan**



"Indonesia adalah negara yang luas, penerbangan dari Aceh sampai Papua memerlukan waktu 9 jam", ungkapinya.

Dari keberagaman itulah, kata mantan Menteri Kehutanan itu, MPR-lah yang menjaganya. "Salah satu tugas MPR adalah menjaga keragaman yang ada agar saling menghormati, menghargai, mendukung, dan toleransi", ucapnya. "Kami berbeda tetapi bersatu", tambahnya.

Sebagai bangsa yang beragam, dia menyebut dasar negara, pandangan hidup, dan filosofi Indonesia adalah Pancasila. Seluruh warga negara mempunyai hak yang sama. "Siapa saja berhak menjadi apa saja", tuturnya.

Stech dalam kunjungan itu merasa terhormat. Dia mengucapkan terima kasih atas sambutan yang disebutkan sempurna.

Seperti halnya Zulkifli Hasan, dalam kesempatan tersebut Stech juga memaparkan bentuk Senat Ceko. Stech menyebutkan, anggota senat jumlahnya mencapai 81 orang. "Mereka berasal dari berbagai sayap dan aliran politik", ujarnya. "Mereka bisa lolos ke parlemen karena politisinya berpengalaman", tambahnya.

Hubungan Indonesia-Ceko juga diakui Stech berjalan baik. "Tidak terbebani masa lampau", ungkapnya. Ceko, negaranya, menghargai perjuangan Indonesia dalam ikut mendukung perdamaian dunia. Apa yang terjadi di Indonesia, menurut Stech, juga terjadi di Ceko, yakni ada reformasi. Reformasi yang terjadi di negara yang bertetangga dengan Jerman itu membawa dampak perubahan ekonomi yang baik. Ekonomi di sana mampu meningkatkan

derajat warganya. "Sehingga banyak orang Ceko bepergian ke berbagai tempat wisata di Indonesia, Bali misalnya", ungkapnya.

Meski jarak kedua negara jauh, namun berbagai perwakilan kedua negara ada. Ia berharap, hubungan kedua negara ditingkatkan. Banyak produk Indonesia yang masuk ke Ceko, baik langsung maupun lewat Uni Eropa. Karenanya dia mengharapkan agar produk-produk negaranya juga banyak masuk ke Indonesia.

Stech bangga kedua negara mampu meningkatkan kerjasama dan mengembangkan peluang yang ada. "Buktinya pejabat kedua negara saling berkunjung", sebutnya. Dia yakin MPR bisa mendukung peningkatan kerjasama kedua negara. □

**AWG**



## Diskusi Empat Pilar

# Secara Hukum Mantan Napi Korupsi Boleh Menjadi Caleg

Masalah boleh tidaknya mantan napi korupsi, mantan bandar narkoba, dan eks narapidana kejahatan seksual menjadi caleg dibahas dalam Diskusi Empat Pilar. Beragam pendapat pun muncul.

**S**EBELUM diputus oleh Mahkamah Agung, keberadaan caleg mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai forum diskusi. Salah satunya adalah diskusi Empat Pilar yang berlangsung di Media Center MPR, DPR, dan DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks

“Kita sudah sepakat bahwa dasar negara kita adalah hukum, sedangkan etika itu adanya di atas hukum. Semestinya KPU tidak perlu sampai ke sana”, ujar Komarudin Watubun.

Sesuai hukum yang berlaku, mantan napi korupsi boleh menjadi caleg pada Pemilu 2019, dengan syarat mereka mengumumkan statusnya itu melalui media massa.

seseorang itu tidak gampang. Butuh waktu lama, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Setiap pejabat negara selalu disumpah sebelum memegang kekuasaannya. Karena itu, PDI Perjuangan selalu concern terhadap persoalan kebangsaan, apalagi saat ini kita sedang diusik persoalan persatuan”, kata Komarudin lagi.

Sementara itu anggota DPD dapil Bangka Belitung, Bahar Buasan, mengatakan, daripada berpolemik menyoal boleh tidaknya mantan napi korupsi menjadi caleg, dia memilih melakukan pendidikan politik kepada generasi muda. Melalui Rumah Aspirasi Buasan, ia melakukan pendidikan politik terhadap generasi muda lintas agama dan etnik. Bahkan guru-guru yang mengajar pun sengaja dilibatkan dari berbagai agama dan daerah. “Agar pada saatnya, ketika mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Parlemen, Senayan, Senin (3/9).

Dialog dengan tema: “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif” itu menghadirkan narasumber Komarudin Watubun, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, serta Bahar Buasan, anggota MPR kelompok DPD dari dapil Bangka Belitung.

Bagi Komarudin Watubun, sengkaret menyoal calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak tidak perlu terjadi, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tugasnya dengan baik, menjadi wasit yang adil bagi semua pemain. Tidak perlu mendengar dan mengikuti arus opini di tengah masyarakat, apalagi sampai terlibat masuk ke persoalan etik.

Keputusan tersebut harus dihormati semua pihak, termasuk KPU, sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Persoalan caleg mantan terpidana korupsi, kata Komarudin, sudah selesai sebelum PKPU diundangkan. Bahkan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan mantan napi untuk ikut pileg. Yaitu, putusan MK tahun 2016, terkait uji materi UU No. 10 tahun 2016. Seharusnya, KPU tidak membuat persyaratan caleg yang bertentangan dengan putusan MK.

Untuk menghindari anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi, PDI Perjuangan sendiri, menurut Komarudin, sudah melakukan pendidikan politik kepada para caleg. Tetapi, ia mengakui, untuk mengubah perilaku

yang baik”, ujar Bahar Buasan.

Munculnya sejumlah nama mantan koruptor menjadi caleg pada pemilu 2019, menurut Bahar, menunjukkan bahwa parpol masih mementingkan kemenangan pada kontestasi pemilu dibanding mengedepankan kader-kader yang bersih. Karena dibanding caleg-caleg muda, mantan-mantan koruptor ini lebih berpotensi meraih kemenangan, karena memiliki basis massa dan modal yang lebih besar.

“Karena itu, saya concern menyiapkan orang-orang yang lebih baik agar pada saatnya mereka bisa menggantikan kita. Itu adalah tanggung jawab kita semua”, sebut Bahar. □

MBO

Diskusi Fraksi Partai Golkar

# Fraksi Partai Golkar MPR Bahas Industri 4.0

Silaturahmi dalam rangka Kemerdekaan RI bicara tentang ekonomi, tatanan hukum, keagamaan, dan revolusi industri 4.0.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**F**RAKSI Partai Golkar MPR RI menggelar Silaturahmi Proklamasi Kemerdekaan ke-73 RI dengan tema "Optimisme Menatap Masa Depan" di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/8/2018). Silaturahmi dibuka Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Silaturahmi Kemerdekaan ini membahas beberapa tema, yaitu ekonomi, hukum, dan demokrasi, kehidupan beragama, serta penguatan informasi dalam Era 4.0. Narasumber silaturahmi adalah Dr Enny Sri Hartati, MSi, Prof Dr Satya Arinanto, SH, MH, Prof Dr Azyumardi Azra, dan Menkominfo Ir Rudiantara.

Hadir dalam diskusi ini Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin ST, MM serta sejumlah elit Partai Golkar di MPR/DPR dan pengurus DPP, di antaranya Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus, Rambe Kamarul Zaman, Agun Gunandjar Sudarsa, Idris Laena, Roem Kono, Ace Hasan Syadzily, dan lainnya.

"Dengan silaturahmi dalam rangka kemerdekaan RI ini kita ingin memberi penguatan terhadap agenda nasional ke

depan. Silaturahmi ini bicara tentang ekonomi, tatanan hukum, keagamaan, dan revolusi industri 4.0," kata Airlangga di lokasi.

"Intinya kita menginginkan kehidupan politik ekonomi tatanan masyarakat ke depan itu sifatnya optimistis. Jadi, seperti capaian Asian Games. Kalau bangsa kita bersatu, bangsa kita optimistis, prestasinya luar biasa," ujar Menteri Perindustrian ini.

Airlangga berharap, dengan diadakannya silaturahmi kemerdekaan ini maka dapat meningkatkan kesiapan Partai Golkar dalam menghadapi agenda-agenda ke depan. Tak hanya agenda terkait Pileg dan Pilpres tetapi juga agenda-agenda besar lainnya.

"Jangan hanya fokus pada satu dua agenda. Memang ada agenda besar Pileg, Pilpres ke depan. Tapi kita buktikan nanti sesudah adanya Asian Games, ada even di Bali pertemuan IMF, kemudian World Bank. Kemudian ke depan ada lagi pemilu, sehingga seluruhnya ini secara paralel kita kerjakan," tambahnya.

Dalam sambutannya, Airlangga mengapresiasi silaturahmi yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR ini. "Kami apresiasi,

terutama untuk membawa optimisme menatap masa depan. Silaturahmi ini penting karena ini adalah satu mekanisme pengkajian sistem berbangsa dan bernegara. Saya berharap, silaturahmi ini memberi masukan pada badan pengkajian dan lembaga pengkajian guna mendukung tugas pokok MPR," jelasnya.

Salah satu yang dibahas adalah kemajuan teknologi informasi yang menghasilkan revolusi industri tahap keempat (4.0). Menkominfo Rudiantara pada kesempatan itu menguraikan kemajuan teknologi informasi terkait revolusi industri tahap keempat (4.0). Ini ditandai dengan tumbuhkembangnya industri digital atau *start up*, antara lain *e-commerce*. Tantangan pemerintah di bidang teknologi informasi ke depan semakin kompleks.

"Selain dituntut penerapan pelayanan publik berbasis teknologi, juga bagaimana perkembangan kemajuan teknologi informasi berperan mengatasi masalah-masalah riil, seperti kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi," katanya. □

BSC



## Promosi Doktor di Undip Semarang

# Warga Muhammadiyah Sudah Melaksanakan Pancasila

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, persyarikatan yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Dahnil yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mengajukan disertasi doktrinya dengan judul: "Penggunaan Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Etika Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM."

Dalam disertasiya, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE., ME., antara lain mengatakan, perjuangan kalangan UMKM di lingkung-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi sikap keluarga besar Muhammadiyah yang telah menghargai nilai-nilai dalam Pancasila. Menurut Zulkifli Hasan, persyarikatan yang didirikan K. H. Ahmad Dahlan itu sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Salah satunya seperti yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan ekonomi umat.

"Warga Muhammadiyah mengembangkan ekonominya bukan semata karena ingin kaya dan sejahtera sendiri. Mereka terpacu ingin maju dan sejahtera, karena berharap bisa bersodaqoh, membantu sesamanya yang belum beruntung. Itu artinya, ada nilai keadilan sosial yang ingin dicapai dan diusahakan oleh warga Muhammadiyah", ujar Ketua MPR.

Sikap warga Muhammadiyah itu, menurut Zulkifli, sesuai dan selaras dengan kondisi sekarang. Karena itu, sudah waktunya bangsa Indonesia mencontoh apa yang dilakukan warga Muhammadiyah. Yaitu, melaksanakan segala aktivitasnya untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai menghadiri ujian promosi doktor Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat (24/8). Ikut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tanjung, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kalau sebuah masyarakat terangkat secara ekonomi, kata Zulkifli, sudah pasti nasib masing-masing individunya pun terangkat. Kondisi tersebut, menurut Zulkifli, membuktikan adanya keadilan sosial. Itu artinya warga Muhammadiyah sudah melaksanakan Pancasila, bukan lagi hanya sekedar dihafalkan atau diwacanakan saja.

Cara-cara seperti itu, kata Zulkifli, patut diapresiasi dan ditiru seluruh bangsa Indonesia. Karena upaya yang sudah dilakukan warga Muhammadiyah tersebut sangat sesuai dengan semangat gotong royong yang diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia.

an warga Muhammadiyah banyak dipengaruhi oleh Alqur'an, Surat Al Maun ayat 1-7, dan surah Al Azhar ayat 1-3. Warga Muhammadiyah berjuang agar sukses dalam bisnis, tidak semata didasari niat untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga memiliki motif sosial, bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya, melalui jalan bersedekah.

Karena itu, sebagai sebuah organisasi, saat ini Muhammadiyah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pasalnya, sebagai persyarikatan yang memiliki aset sangat banyak, tapi ternyata masih banyak juga warga Muhammadiyah yang masih belum sejahtera. Dan, itu harus segera dientaskan dari kemiskinannya.

Ujian promosi doktor yang dilalui Dahnil tidak berjalan seserius sebagai mana lazimnya. Beberapa kali, para menguji dan para tamu terdengar melepas tawa. Terlebih ketika para penguji mengaitkan acara sidang dengan kondisi politik mutakhir. Antara lain soal mundurnya Menteri Sosial Idrus Marham, dan perang *tagar* antara #GantiPresiden dan #DuaPeriode. □

MBO

# Jaga Momentum Kesuksesan Asian Games

Setelah menyumbang puluhan emas dalam Asian Games, keberadaan silat menjadi perhatian banyak pihak. Ada rencana mengembangkannya menjadi silat professional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



**W**AKIL Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Jumat, 14 September 2018, kedatangan delegasi Federasi Beladiri Profesional Indonesia. Kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Taufan itu diterima oleh Muhaimin Iskandar di ruang kerjanya, Lt. 7, Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.

Kedatangan Taufan yang didampingi oleh pengurus federasi beladiri lainnya itu untuk menyampaikan aktivitas yang telah dan akan dilakukan. Dalam kesempatan tersebut Taufan menyebutkan perlunya memanfaatkan kebangkitan olahraga di Indonesia selepas menjadi tuan rumah Asian Games

XVIII. “Khususnya cabang silat”, ujarnya. Silat dalam Asian Games, selain sebagai cabang olahraga yang menyumbang emas terbesar bagi Kontingen Indonesia, cabang olahraga ini juga disebut sebagai pemersatu bangsa. Karena, menurut Taufan, salah satu pesilat telah memersatukan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pelukan yang sama. Dari sinilah mereka bangga pada silat.

Mereka mempunyai keinginan agar olahraga beladiri yang ada bisa menjadi industri tontonan dan hiburan sehingga bisa menghasilkan sesuatu. “Untuk itu kami ingin menggabungkan musik dan beladiri”, ujarnya. Lalu pada kesempatan itu, mereka mempertontonkan video pertandingan silat kepada pria asal Jombang, Jawa Timur, itu.

Mendapat kunjungan dari para penggemar beladiri, pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Setelah mendapat pemaparan tentang silat dan beragam sisinya, dia mengajak mereka untuk menjaga momentum dari suksesnya pelaksanaan Asian Games,

baik sebagai tuan rumah maupun peserta. “Jangan kehilangan momentum yang telah kita raih”, ujarnya.

Menyemarakkan, menggiatkan, dan memprofesionalkan silat, menurut Muhaimin, merupakan langkah mencanggihkan apa yang sudah dimiliki. Silat merupakan budaya asli Indonesia yang hidup sejak dulu kala di masyarakat dengan jutaan peminatnya. “Jadi kita mencanggihkan apa yang sudah ada”, tuturnya.

Untuk menjadikan silat menjadi tontonan dan pertunjukan seperti tayangan yang ada di televisi, diakui oleh Muhaimin Iskandar, ada problem yang mesti dilalui. Sponsor disebut salah satu tantangan. Untuk itu dia mengharapkan agar mereka menyakinkan kepada pihak sponsor bahwa apa yang hendak dipentaskan, dipertandingkan, itu menguntungkan. Dirinya berharap agar event seperti itu melibatkan banyak pihak sehingga mampu menyedot perhatian banyak orang. “Kalau bagus, sponsor pasti akan datang”, ujarnya. □

AWG



**UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat**

# Ospek UIN Syarif Hidayatullah

Zulkifli Hasan hadir saat mahasiswa baru UIN melakukan 'ospek', dan memberi motivasi agar mahasiswa jangan suka mengeluh.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EJAK pagi di Lapangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 30 Agustus 2018, berkumpul ribuan mahasiswa. Di antara sekian banyak mahasiswa itu, terdapat 6200 orang di antaranya mahasiswa baru. Keberadaan mereka di sana dalam rangka mengikuti penutupan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), sebuah kegiatan yang dulu disebut Ospek. Dalam acara penutupan Ospek itu digelar berbagai macam pertunjukan seni dan budaya, serta membuat bendera Merah-Putih raksasa yang disusun dari potongan-potongan karton.

Acara yang digelar di tengah terik matahari itu tak sekadar seni dan budaya yang dipersembahkan, namun juga ada orasi ilmiah, baik dari kalangan mahasiswa maupun Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Puncak dari acara itu adalah orasi kebangsaan disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Saat Zulkifli Hasan tiba di tempat acara disambut dengan oleh gemuruh oleh para mahasiswa. Mereka melambaikan tangan kepada pria asal Lampung itu. Setelah dipersilahkan oleh panitia, Zulkifli Hasan menyampaikan orasi kebangsaan. Setelah memberi salam, ia mengucapkan selamat kepada mereka yang telah diterima di UIN.

"Ini merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia", ujarnya. Untuk itu, mereka harus bersyukur bisa diterima di UIN. "Bila kalian bersyukur maka Allah akan menambah nikmat", tambahnya. Karena masih banyak lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi karena berbagai macam alasan. "Bisa jadi karena alasan ekonomi, bisa pula karena tidak lolos seleksi", ucapnya.

Memasuki dunia baru, perguruan tinggi, Zulkifli Hasan mendorong mereka untuk mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Untuk itu, dia berharap, ke depan mereka lebih baik daripada dirinya. "Saya yang lulusan PGAN saja bisa menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua MPR, apalagi kalian yang kuliah di sini", harapnya.

Untuk menjadi yang lebih baik, Zulkifli Hasan menyarankan, agar para mahasiswa menjadi orang yang tangguh, tak suka mengeluh, dan tidak hobi menyalahkan orang lain. "Kita habisi sikap-sikap yang negatif", paparnya.

Dalam dunia yang selalu terbuka, Zulkifli Hasan menyarankan agar mahasiswa memegang prinsip kejujuran, integritas, dan tak manipulatif. "Kejujuran adalah modal penting kita di tengah masyarakat", tegasnya. "Kita berbuat yang wajar-wajar saja, jangan manipulatif", tambahnya.

Bangsa ini, tegas Zulkifli Hasan, dilahirkan oleh orang-orang cerdas. "Sehari setelah Indonesia merdeka, bangsa ini memiliki UUD Tahun 1945", ujarnya. Dalam UUD itu ada nilai-nilai kemanusiaan. "Bangsa lain baru mempunyai nilai-nilai kemanusiaan sepuluh tahun kemudian", ujarnya.

Kepada mereka, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa yang saat ini duduk berpanas-panasan, kelak akan bisa jadi apa saja. "Kalian bisa jadi apa saja", ujarnya. "Saya doakan ada yang menjadi kepala daerah, ulama, profesor, menteri, bahkan presiden", ucapnya. Semua itu bisa dicapai tergantung apa yang kita lakukan. "Kalau mau maju tergantung dengan apa yang diperjuangkan", tuturnya. "Jangan tergantung pada orang lain", tambahnya.

Zulkifli Hasan menyebut, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh sumber daya manusianya. Ia menyebut, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang bisa menjadi negara maju meski minim bahkan tak memiliki sumber daya alam. Untuk itu, dia menekankan pentingnya pendidikan. "Jangan sia-siakan waktu belajar. Belajarlah sungguh-sungguh," tegasnya. Lalu untuk menguasai dunia, tandas Zulkifli Hasan, selain menguasai ilmu pengetahuan juga harus memiliki jaringan. □

**AWG**

## Diskusi Empat Pilar MPR

# Minimalisir Isu SARA dalam Kontestasi Politik

Politisasi SARA akan selalu ada dalam setiap Pemilu. Padahal isu SARA sangat membahayakan NKRI. Perlu keterlibatan semua pihak untuk meminimalisir isu SARA.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**OLITISASI atau isu SARA pasti akan selalu ada dalam setiap pemilihan (kepala daerah sampai presiden). Politisasi SARA tidak menjadi perhatian dalam UU Pemilu. Sanksi hukuman penggunaan isu SARA dalam kampanye juga ringan. Padahal politisasi SARA ini sangat membahayakan NKRI.

Demikian terungkap dalam Diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan MPR dengan tema: "Pemilu dan Kebhinnekaan" di Ruang Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2018). Diskusi menghadirkan narasumber Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha dan pengamat politik Lingkaran Madani, Ray Rangkuti.

Syaifullah Tamliha menyebutkan, isu SARA akan selalu ada dalam setiap kontestasi politik (pemilihan kepala daerah sampai presiden). Bahkan dalam pemilihan Presiden Amerika, isu SARA tetap ada. Kemenangan Presiden Amerika Serikat tidak lepas dari isu SARA. Kemenangan Donald Trump karena gereja dan pendeta turun langsung secara *door to door*. Gereja mendukung Trump karena Hillary Clinton berjanji akan menyetujui UU perkawinan sejenis. Orang-orang Kristen khawatir dengan kebijakan Hillary itu. "Itu adalah SARA juga. Efektivitas isu SARA tidak dapat dikesampingkan," kata Syaifullah.



Menurut dia, isu SARA di Indonesia semakin memanaskan ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Itulah bibit terbesar dalam persoalan SARA. Artinya, ada jualan agama. Setelah itu isu SARA ini terus bermunculan. "Kalau saya mencermati, sepertinya ada perang antara kelompok sekuler dan kelompok agama. Indonesia, seperti kata Bung Karno, bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama," ujarnya.

Tamliha menambahkan, politisasi SARA sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. "Karena itu perlu keterlibatan semua pihak untuk menjaga dan meminimalisir isu-isu SARA," ucapnya.

Tidak jauh berbeda, Ray Rangkuti mengatakan, ancaman politisi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang. Politik uang akan berhenti atau hanya dilokasir di daerah di mana politik uang itu terjadi. Kalau politik uang terjadi di Jakarta maka tidak berefek di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. "Efek politik uang bisa dilokalisir. Artinya, bangsa ini tidak retak karena politik

uang," katanya.

Sebaliknya, politisasi SARA seperti contoh Pilkada DKI Jakarta 2017, bisa berdampak ke daerah-daerah lain. Sebagai bangsa, isu SARA itu bisa membuat Indonesia terbelah. Meski tidak memecah secara geografi (ada daerah yang mau memisahkan diri karena SARA), tetapi rakyat bisa terbelah menjadi dua kategori, yaitu masyarakat muslim dan kafir. Kafir ini tidak sejalan dengan pilihan orang muslim. "Ini berbahaya. Karena itu politisasi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang," tegasnya.

Percikan isu SARA di satu daerah, lanjut Ray Rangkuti, akan menyebar dengan cepat ke daerah-daerah lain. Sayangnya politisasi SARA tidak menjadi perhatian dalam UU Pemilu, karena isu SARA dianggap bukanlah ancaman. Dalam UU Pemilu, hanya ada satu pasal tentang larangan penggunaan isu SARA dalam kampanye Pemilu. Sanksinya pun ringan, hanya hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 1,5 juta.

"Karena itu politisasi SARA selalu dimainkan dalam setiap pemilu karena sanksinya ringan. Pemilu menjadi wahana untuk menggunakan SARA. Tapi, setelah pemilu, jangan memakai isu SARA karena ancamannya adalah UU anti diskriminasi dan KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun," pungkasnya. □

BSC



Abdul Kholik Ibrahim

## Pahlawan **Bagi** Para Petani

**S**IDANG Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 2018 telah berlalu. Tetapi kenangan dan kebanggaan bisa mengikuti acara tersebut masih dirasakan oleh Abdul Kholik Ibrahim (40). Ia merasa beruntung menjadi salah seorang dari sedikit masyarakat Indonesia yang berkesempatan mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara langsung di Kompleks MPR, DPR dan DPD RI, pada Kamis 16 Agustus 2018.

Abdul Kholik Ibrahim adalah salah satu petani teladan yang dipilih oleh Kementerian Pertanian berkat kegigihan dan keteladanannya membantu sesama petani khususnya dan masyarakat Kota Banjar pada umumnya. Berkat upayanya membangun dunia pertanian, kini petani dan masyarakat di Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, bisa menikmati buah kerja keras anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Wawan Setiawan dan Nokumayah.

"Paling tidak dalam satu bulan masyarakat bisa menghemat hingga Rp 300 ribu. Mereka tidak perlu lagi membeli sayur-mayur ke pasar, cukup memetik dari hasil tanaman di pekarangan rumahnya saja", kata Abdul

Kholik saat bercakap dengan wartawan *Majelis* di ruang Redaksi *Majelis* di sela kegiatannya menyimak Sidang Paripurna MPR beberapa waktu lalu.

Bukan cuma sayur dan kebutuhan rumah tangga saja yang bisa dinikmati warga masyarakat Desa Rejasari, berkat kegigihan Abdul Kholik mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Ikamaja (Ikatan Alumni Magang Jepang), masyarakat di desanya juga bisa menikmati infrastruktur jalan yang mulus. Itu terjadi karena banyak pejabat daerah berkunjung ke lokasi P4S, sehingga Pemda setempat merasa perlu membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di sana, termasuk juga penerangan jalan raya.

Perjuangan Abdul Kholik Ibrahim mendirikan P4S tak lepas dari kenyataan adanya Ironi Negeri Agraris. Karena di negeri yang menyatakan dirinya sebagai negara pertanian ini ternyata petaninya kurang mendapat perhatian. Para petani yang jumlahnya sangat banyak dibiarkan berjuang sendirian. Buktinya, para petani sangat sulit mendapat ilmu dari para penyuluh pertanian. Karena alasan itulah pada 2006 Kholik berikhtiar mendirikan P4S,



dengan harapan bisa membantu meningkatkan kemampuan petani dalam hal bercocok tanam.

"Intinya saya ingin mendirikan sebuah lembaga yang bisa menjadi pusat pelatihan bagi para petani. Baik untuk berbagi ilmu dengan petani sekitar maupun berkumpul dengan para petani untuk sharing. Prinsipnya petani belajar ke petani", ujar Kholik.

Seperti lazimnya kisah-kisah perjuangan, langkah Kholik untuk bisa membantu para petani tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala yang merintang. Para petani yang lebih dulu berkecimpung di dunia pertanian memandang sebelah mata terhadap upaya yang dilakukan Kholik.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





Bahkan bibinya sendiri tetap bergeming saat sang keponakan mengajak bercocok tanam untuk sekedar mencukupi kebutuhan keluarga. Alasannya, tangannya panas sehingga tak cocok untuk melakukan tanam-menanam.

“Alasan seperti itu sering diucapkan orang, tapi seiring berjalannya waktu, saya berkesimpulan tak ada tangan panas, tapi yang ada tangan malas. Buktinya, mereka yang dulu tidak mau menerima ajakan, kemudian bisa menanam setelah melihat tetangganya sukses menanam sayu-mayur untuk keluarga”, kata Kholik lagi.

#### Ke Jepang

Kholik sendiri sudah sejak lama mengenal dan berkecimpung dalam dunia pertanian.

Sebagai anak petani, keseharian Kholik tak bisa dipisahkan dari ladang dan sawah. Bermain lumpur dan membajak menggunakan kerbau sudah menjadi kebiasaannya semenjak kecil. Tetapi pria kelahiran Banjar, Jawa Barat, 2 Juni 1978, ini lebih banyak belajar soal-soal pertanian kepada sang kakek dibanding kepada ayahnya sendiri.

Namun, Kholik sempat merasa malu

mengakui kalau dirinya adalah anak seorang petani. Pasalnya, saat itu anak seorang petani identik dengan orang miskin dan kumal. Karena itu Kholik jarang menceritakan pekerjaan orangtuanya, dan berusaha menutup-nutupi mata pencaharian orangtuanya.

Meski dibayang-bayangi rasa malu sebagai anak petani, tetapi kecintaannya terhadap dunia pertanian tak pernah luntur. Bahkan saat duduk di bangku SLTA Persatuan Guru Indonesia (kini Madrasah Aliyah Negeri Banjar), Kholik sempat mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Kegiatan itu berlangsung seminggu sekali, dan Kholik terpaksa minta izin tidak masuk sekolah karena mengikuti pelatihan tersebut.

Sejak itu kecintaannya terhadap dunia pertanian semakin besar. Terlebih setelah kedua adiknya memilih untuk menggeluti dunia pendidikan dan berdagang. Pada saat yang sama, Kholik mulai menikmati profesinya sebagai petani. “Kami petani menikmati ketenangan hidup. Kami juga bangga, karena tanaman yang kami tanam bukan

untuk keperluan kami sendiri, tetapi juga dibutuhkan orang lain”, tutur Kholik.

Keseriusannya menekuni dunia pertanian mendapat penghargaan dari pemerintah. Tahun 1999, Kholik mengikuti ujian untuk pengiriman petani ke Jepang. Tetapi ia tidak segera diberangkatkan karena saat itu usianya belum mencukupi. Baru di tahun 2001, setelah usianya memenuhi persyaratan, Kholik pun berangkat ke Jepang untuk belajar pertanian di Negeri Sakura selama delapan bulan.

Berbekal pengalaman hidup di Jepang, Kholik pun ingin membagi pengetahuannya itu kepada petani lain di sekitarnya. Asa itu terus ia pupuk hingga akhirnya terwujud pada 2006 dengan berdirinya Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Ikamaja (Ikatan Alumni Magang Jepang),

“Di Jepang saya banyak mengamati dan belajar bagaimana orang Jepang bisa berhasil. Ternyata orang Jepang itu punya karakter, peduli dengan lingkungan serta berdisiplin”, katanya. □

MBO



## Membaca Perbedaan Perjuangan Lewat Buku

Peristiwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bisa jadi ditulis dengan banyak versi. Di antaranya versi Hatta dan Adam Malik. Apa saja perbedaannya?

**U**MUR, jenis kelamin, dan tingkat pengendalian emosi merupakan faktor biologis dan psikologis seseorang ketika bertindak. Hal demikian juga terlihat ketika bangsa Indonesia hendak memerdekakan diri. Dari kelompok yang disebut golongan tua dan golongan muda, mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan kapan bangsa ini hendak memproklamasikan diri, lepas dari penjajahan bangsa asing.

Perbedaan dari golongan tua dan golongan muda dalam detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan itu bisa kita simak saat

acara *Wakil Rakyat Bicara Buku* yang digelar pada Agustus 2018.

Acara yang digelar di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, itu membedah buku karya Mohammad Hatta berjudul: *Sekitar Proklamasi*. Pembahas dan penanggap buku karya Wakil Presiden I Indonesia itu adalah anggota MPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian, sejarawan dari UIM Sodikin, dan pengamat buku Arif Pradono.

Menanggapi karya Hatta, Sodikin mengatakan, buku ditulis pria berdarah Minang itu sebagai upaya untuk meluruskan sejarah menjelang Indonesia merdeka. Diakui

banyak penulis sejarah, termasuk dari orang luar negeri, yang membumbui fakta dengan dongeng sehingga membuat kejadian yang ada menjadi dramatis. Sebagai pelaku sejarah, menurut Sodikin, Hatta menulis kejadian yang ada secara obyektif sehingga kejadian itu tak sedramatis yang dibayangkan orang. "Dari buku ini Hatta meluruskan sejarah yang tak sesuai dengan kenyataan", ungkapnya.

Menjelang Indonesia merdeka, menurut Sodikin, Hatta merupakan satu dari lima orang tokoh yang disebutkan sebagai aktor intelektual. Di BPUPKI dan PPKI, Hatta merupakan sosok yang terlibat langsung dalam sebuah proses perjalanan bangsa. "Ia mempunyai pandangan dan gagasan ke depan tentang sebuah bangsa", ujarnya. Dari sinilah, ia menyebut Hatta sebagai Bapak Bangsa. Sodikin di hadapan peserta mengajak semua untuk merefleksikan isi buku itu. "Apakah kita masih sesuai di jalur harapan bangsa?" tanyanya.

Arif Pradono dalam kesempatan itu menyebut, buku Hatta tak mengedepankan anak muda sebagai penggerak terlaksananya

Proklamasi. Ia membandingkan dengan buku karya Adam Malik yang menyebut anak muda sebagai penggerak kemerdekaan Indonesia. Pradono sendiri mengakui, kalau dalam setiap perubahan yang terjadi di muka bumi, anak mudalah sebagai agen perubahan. Ia menyebut Gajah Mada, Sudirman, aktivis 66, aktivis 98, adalah tokoh-tokoh perubahan di mana kala itu mereka masih tergolong muda. Perbedaan Hatta dan Adam Malik bisa jadi mereka dalam posisi yang berbeda, Adam Malik sebagai bagian dari golongan muda, sedang Hatta dari kelompok yang disebut golongan tua.

Dalam kesempatan itu, Hetifah mengakui bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku sejarah. Setiap generasi memiliki sejarah tersendiri. "Kita menjadi pelaku sejarah di keluarga atau kampus", ujarnya. Sebagai anggota DPR dan MPR, dirinya mengakui merupakan bagian dari sejarah politik di Parlemen. Dia berharap, dari sejarah yang ada kita bisa memaknai peristiwa. "Yang bagus kita lanjutkan", paparnya.

Dalam soal sejarah yang ada bumbunya, dongeng dan legenda misalnya, diakui memang ada unsur seperti itu agar yang tampak di publik menguntungkan. "Sejarah

yang tak terlepas dari dunia politik memang ada unsur kepentingan yang ada", tuturnya. Dirinya pun menyebut banyak cerita lokal yang hidup di masyarakat penuh dengan dongeng dan legenda. "Hal demikian juga perlu digali", harapnya. Meski demikian dirinya menyarankan agar peristiwa sejarah yang ada di Indonesia diproteksi agar tidak ditulis oleh orang asing.

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, acara yang digelar oleh Perpustakaan MPR dengan membedah buku karya Hatta dinilai sangat tepat, sebab dilaksanakan di bulan Agustus. "Apalagi buku yang dibedah adalah karya pelaku sejarah, jadi sumbernya otentik", paparnya. "Jadi kita tahu sumber peristiwanya secara langsung", tambahnya. Acara itu disebut Siti Fauziah merupakan salah satu bentuk Sosialisasi Empat Pilar. Untuk itu, ke depan, acara 'Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat' akan diintensifkan. □

AWG





**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**



## *Awalnya* **Menolong Korban Perang**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk melalui proses yang panjang. Dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden, mengalami penyempurnaan. Semakin kompleksnya masalah bencana membuat penanganan bencana diatur lewat undang-undang. Menolong dan menanggulangi korban bencana menjadi tugas semua.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**ETELAH Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bangsa ini lepas dari penjajahan yang telah membelenggu selama 350 tahun. Meski Indonesia telah merdeka namun segala infrastruktur maupun yang penopang kehidupan berbangsa dan bernegara masih compang-camping di sana-sini. Itu bisa terjadi akibat peperangan, peralihan kekuasaan dari Jepang ke Belanda yang masih nyata di depan mata, serta belum ada kelengkapan institusi yang dibutuhkan oleh negara.

Untuk mengatasi segala permasalahan

yang ada, tiga hari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 20 Agustus 1945, pemerintah membentuk badan yang dinamakan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan ini mempunyai beberapa tugas, antara lain: *Pertama*, menolong penderitaan rakyat akibat perang yang terjadi, khususnya pada Agustus 1945. Pada masa itu rakyat Indonesia banyak yang tergabung dalam institusi militer bentukan Jepang, seperti PETA dan Heiho. Dua angkatan perang bentukan Negeri Sakura itulah yang berjibaku dalam peperangan yang terjadi pada

masanya sehingga banyak korban dari anggota PETA dan Heiho. Korban-korban inilah yang menjadi tanggungan dan tanggungjawab BPKKP untuk memulihkan, merawat, dan menormalkan kehidupan mereka. Tercatat jumlah anggota PETA mencapai 37.000 di Jawa dan 20.000 di Sumatera. Sedang jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang.

*Kedua*, tugas BPKKP adalah mewadahi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Saat sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, anggota dari lembaga itu, yakni Abikoesno Tjokrosoejoso dan Otto Iskandardinata mengusulkan dibentuknya badan pembelaan negara. Sebab dalam situasi yang belum memungkinkan, usulan tersebut ditangguhkan. Namun, tiga hari setelah itu, tepatnya 22 Agustus 1945, usulan dua orang tadi diterima dan diwujudkan dengan dibentuknya BKR. Badan ini dideklarasikan oleh Soekarno pada 23 Agustus 1945. Tugas BKR adalah memelihara keamanan bersama dengan rakyat dan jawatan negara. Anggota dari BKR adalah mereka yang sebelumnya tergabung dalam Heiho, PETA, KNIL, dan institusi militer dan perbantuan lain bentukan Jepang dan Belanda.

Mewadahi BKR dalam BPKKP itu sesuai dengan amanah Anggaran Dasar BPKKP Pasal 2 yang berbunyi: Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itu







FOTO-FOTO: ISTIMEWA

adalah satu. Maka itu di Badan Penolong Keluarga Korban Perang dibentuk satu bagian yang bernama Badan Keamanan Rakyat.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan negara Indonesia yang semakin baik, tantangan yang dihadapi pun berbeda dibanding di saat awal Indonesia merdeka. Bila di awal Indonesia merdeka, korban perang yang menjadi sasaran pertolongan maka setelah tidak lagi terjadi bencana perang maka fokus sasaran pertolongan adalah korban bencana alam. Untuk itu, pemerintah pada 1966 mengeluarkan Keputusan Presiden No. 256 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP). Siapa yang bertanggungjawab dari badan yang sudah mulai tertata ini? Menteri Sosial ditunjuk sebagai penanggungjawab dari aktivitas BP2BAP.

Masalah yang ada pada masa itu bisa dikatakan sangat perlu penanganan yang cepat sehingga Presidium Kabinet pada 1967 mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA). Menteri Sosial pada masa itu adalah Albert Mangaratus Tambunan.

Aksi cepat tanggap dan penanganan yang dilakukan oleh TKP2BA yang tuntas, mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dari luar negeri. Prestasi inilah yang membuat pemerintah meningkatkan status TKP2BA yang awalnya dari Tim Koordinasi menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA). Peningkatan status ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979. Siapa yang bertanggungjawab pada badan ini juga berganti, sebelumnya di bawah Menteri

Sosial, selanjutnya di bawah Menkokesra. Kali pertama Bakornas PBA hadir, Menkokesra Jenderal Surono Reksodimedjo yang menjadi penanggungjawab.

Sebagai badan yang disebut menjadi cikal bakal badan penanggulangan bencana saat ini, Bakornas PBA mempunyai tanggung jawab dan manajemen yang terbilang sudah modern pada masanya. Ia bergerak dalam tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Dalam menjalankan misinya, badan ini juga mendapat sokongan atau dukungan dari kementerian lain. Untuk menjabarkan tindakan di lapangan, Menteri Dalam Negeri — yang saat itu dijabat Jenderal Amir Machmud — mengeluarkan Instruksi Nomor 27 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA). Satuan koordinasi ini yang dibentuk oleh Amir Machmud ini tidak hanya di pusat namun juga di setiap provinsi.

Seiring perkembangan jumlah manusia dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika yang ada, permasalahan yang melingkupi masyarakat pun semakin beragam. Kali pertama badan pertolongan ini dibentuk untuk menolong korban perang, selanjutnya korban bencana alam, maka pada 1990 definisi tentang bencana tidak mengacu pada definisi yang sudah-sudah. Di awal tahun ini, bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial, juga menjadi pikiran Bakornas PBA.

Untuk itu, Bakornas PBA disempurnakan dengan mengubah menjadi Badan



Albert Mangaratus Tambunan



Surono Reksodimedjo





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Penyempurnaan ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 Tentang Lingkup Tugas Bakornas PB diperluas, tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial.

Seperti dipaparkan di atas bahwa permasalahan semakin kompleks maka masalah bencana yang definisinya pun semakin meluas, sehingga juga menjadi tanggungjawab banyak pihak. Tak heran bila Presiden BJ Habibie pada 1999 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Dalam keputusan ini menyebut penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

Bencana sepertinya selalu mengiringi perjalanan umat manusia sehingga manusia harus bisa menangani dan mengatasi bencana. Sikap untuk mengatasi dan menangani bencana membuat badan pertolongan ini harus terus mengembangkan diri agar bisa menyesuaikan atas apa yang akan terjadi. Maka Bakornas PB pun dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Perubahan badan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001. Aturan ini kemudian diperbarui lewat Keputusan Presiden Nomor

111 Tahun 2001.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 disebut Bakornas PBP merupakan wadah yang bersifat nonstruktural untuk penanggulangan bencana. Badan itu berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, namun dipimpin oleh Wakil Presiden dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara, Gubernur yang di wilayahnya terkena bencana atau terjadi pengungsian.

Pada masa itu, bangsa Indonesia masih terbawa dalam suasana reformasi. Salah satu reformasi yang terjadi adalah masalah otonomi daerah. Otonomi daerah juga membawa dampak kepada Bakornas PBP. Yaitu, penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan tugas pemerintah pusat adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar dapat mandiri mengatasi permasalahan bencana yang menimpa.

Di akhir 2004, dunia dikejutkan oleh tsunami besar yang melanda banyak negara yang berhadapan langsung dengan

Samudera Hindia. Dari bencana alam ini, Aceh merupakan daerah yang banyak mengalami korban jiwa, raga, dan harta. Apa yang terjadi itu tidak hanya menimbulkan empati, simpati, dan bantuan dari berbagai belahan dunia untuk Aceh, namun juga membawa perubahan kepada Bakornas PBP.

Peristiwa tsunami di daerah yang disebut Serambi Mekah itu membuat pemerintah berpikir serius tentang manajemen bencana. Dari sinilah, Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB).

Selain berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia rupanya berada juga di jalur gempa. Hal demikian membuat seluruh pihak berpikir untuk menyusun kebijakan yang kuat untuk menangani dan mengatasi bencana. Bila sebelumnya bencana diatur lewat keputusan, peraturan, dan instruksi presiden maka pada 2007 DPR bersama Presiden membuat Undang Undang Tentang Bencana. Dari tugas bersama membuat undang-undang ini, lahir UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang ini sebagai landasan bagi penanggulangan bencana di Indonesia, dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundangan yang ada, serta membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermaawanan, serta menciptakan perdamaian dalam berbangsa dan bernegara.

Dari sinilah selanjutnya membuat pemerintah membuat aturan turunannya lewat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam peraturan ini mengatur fungsi BNPB sebagai pengoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. □

AWG/dari berbagai sumber



# Menolong, Memulihkan, dan Edukasi Bencana

BNPB bertugas tidak hanya menolong dan memulihkan korban dan kawasan dari dampak bencana namun ia juga memberi edukasi mengenai kebencanaan agar masyarakat sigap menghadapi. Edukasi perlu dilakukan sebab Indonesia berada di daerah rawan bencana. Tumbuh kesadaran masyarakat menghadapi bencana.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DALAM sebuah berita *online* tertanggal 27 Agustus 2018 dikabarkan ada sebanyak 125.000 rumah rusak, di antaranya 74.354 rusak berat, dan 51.390 rusak ringan akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah, dalam rekapitulasi sementara, kerugian dan kerusakan akibat bencana itu ditaksir sebesar Rp 8,294 triliun dengan kebutuhannya sebesar Rp 5,451 triliun.

Lebih detail dia menyebutkan, Kabupaten Lombok Barat mengalami kerugian paling tinggi, sebesar Rp 3.822 triliun dengan kebutuhan Rp 2,39 triliun. Sedangkan Kabupaten Lombok Utara Rp 2,974 triliun dengan kebutuhan Rp 2,273 triliun. Untuk membantu penyaluran bencana dari pemerintah, BNPB membantu membukakan rekening BRI kepada para korban. Menurutnya, ada sekitar 12.000 nomor rekening.

Apa yang dilakukan oleh BNPB di Lombok itu merupakan salah satu misi yang dijalankan selama mereka berada di Pulau

Seribu Masjid. Selama gempa di sana, BNPB membuka Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018. Posko-posko yang ada digunakan untuk mengoordinasikan dan pendistribusian bantuan kepada para korban. Saat-saat awal terjadi bencana, jajaran BNPB tiba di Lombok menggunakan pesawat khusus dari Bandara Halim Perdanakusuma. Segala peralatan, seperti helikopter untuk mendukung penanganan darurat dikirimkan. Badan ini terus mendampingi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak bencana dalam mengatasi dan menangani bencana.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, penanganan korban gempa yang mengguncang Lombok berjalan baik. Dia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, kepolisian, BNPB dan lainnya. "Langkah penanganan sudah dilaksanakan dengan baik", ujarnya pada media di awal Agustus 2018.

Kesigapan BNPB dalam mengatasi bencana juga terjadi di setiap daerah. Pada

Juli 2018, saat terjadi banjir di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, BNPB memberi bantuan dana sebesar Rp 200 juta. Badan itu mencatat dampak bencana membuat tanah longsor serta jembatan terputus di Desa Kahayya, Benteng Gattareng, dan Bukit Tinggi, serta pengikisan sungai Salemba. Pengikisan sungai mencapai 15 meter dan lebar 4 meter. Hal demikian membuat beberapa rumah rusak parah.

Sebelumnya apa yang dilakukan di Bulukumba juga dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Pada November 2016 di daerah selatan Bogor, Jawa Barat, terjadi banjir bandang di Cidolog. Akibat air bah yang melanda, ratusan rumah dan sawah terendam. Menurut Bupati Sukabumi Marwan Hamami, banjir di Cidolog terjadi setiap tahun, namun di 2016 disebut sebagai banjir terbesar. Banjir terjadi sebagai akibat dari rusaknya daerah hulu sehingga terjadi pendangkalan di sepanjang sungai Cidolog.

Atas musibah yang terjadi BNPB menyerahkan bantuan sebesar Rp 250 juta.



Bantuan ini, menurut Marwan, digunakan untuk penanggulangan bencana, terutama di daerah terdampak banjir dan longsor. Bantuan yang diberikan oleh badan itu tak hanya berwujud dana, namun juga kebutuhan alat berat untuk melakukan pemulihan.

Apa yang dilakukan oleh badan yang beralamat di Jl. Pramuka, Jakarta Timur, tak hanya pemulihan namun juga antisipasi dan pencegahan bencana. Dalam soal edukasi, BNPB sering mengadakan simulasi atau latihan rutin bersama masyarakat agar mereka sigap menghadapi bencana. Edukasi yang dilakukan salah satunya berlangsung pada Agustus 2018 di Cilacap, Jawa Tengah

acara itu.

Sosialisasi di Cilacap, menurut Kepala Humas BNPB Rita Rosita, sangat penting dengan alasan Cilacap masuk daerah yang memiliki risiko multibahaya kelas tinggi. "Cilacap memiliki skor 215 dalam Indek Risiko Bencana Indonesia", ungkapnya. Untuk itu, BNPB hadir di sana untuk memberikan pengetahuan bencana agar masyarakat paham risiko yang ada. Dia menambahkan, potensi bencana di wilayah BPBD Cilacap antara lain gempa bumi, tsunami, kebakaran, puting beliung, dan kekeringan.

Edukasi dilakukan oleh BNPB tak hanya di Cilacap, melainkan juga di Padang, Sumatera Barat. Pada Mei 2018, Kepala BNPB Willem

memanfaatkan ruang pembelajaran, sekaligus merawat dan juga ikut mengembangkan agar bermanfaat. Sehingga bisa menjadi perilaku yang positif, seperti membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, mengkampanyekan kegiatan di TEB, serta melengkapi berbagai fasilitas lainnya, seperti menanam pohon, menambah fasilitas bermain anak dan buku-buku pembelajaran.

Kesadaran masyarakat akan bencana juga tumbuh. Hal demikian terlihat saat 75 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Bandung, Jawa Barat, beserta dosen, berkunjung ke Diorama BNPB, Graha BNPB, Jakarta, Mei 2018.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

([bnpb.go.id](http://bnpb.go.id)). Siswa sekolah dari SD 03, SD 05, dan SD 08, di kabupaten di tepi laut selatan itu mendapat pemaparan, penjelasan, dan sosialisasi mengenai jenis bencana, pengenalan tugas BNPB dan BPBD, pemutaran film, dongeng edukasi bencana, penjelasan potensi bencana di Cilacap, simulasi kebakaran, dan sebagainya.

Mendapat edukasi dari para pegawai BNPB dan BPBD yang ramah, anak-anak antusias dan tertarik dengan apa yang disampaikan. "Saya senang dengan acara ini karena membuat pengetahuan bencana menjadi bertambah. Jika gempa harus berlindung di bawah meja, lari ke lapangan terbuka. Semoga BNPB sering datang lagi mengajarkan kami" ujar salah satu peserta

Rampangilei meresmikan Taman Edukasi Bencana (TEB) di kawasan wisata Pantai Padang ([bnpb.go.id](http://bnpb.go.id)). Dalam sambutannya, Willem mengatakan, TEB menyajikan konsep ruang terbuka untuk menyampaikan pendidikan kebencanaan melalui kreasi seni, buku-buku bergambar yang menarik dan dipadukan dengan konsep bermain.

Dengan model demikian, maka TEB dapat dikembangkan di daerah lain, khususnya di daerah rawan bencana. Taman itu merupakan sarana untuk kampanye dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang dihadapi. Taman tematik sekaligus berfungsi sebagai edukasi mengenai kebencanaan dengan segala ancamannya.

Dengan adanya taman itu, masyarakat di sana diharap dan dihimbau untuk dapat

Mereka berkunjung ke sana untuk mencari informasi seputar bencana dan perkembangan dalam penanggulangan yang dilakukan BNPB. Dalam diorama disuguhkan pengalaman BNPB dalam menanggulangi bencana longsor di Banjarnegara, kebakaran hutan di Kalimantan, Jambi, Palembang dan bencana alam lainnya.

Menurut Safira, Dosen UPI, pentingnya belajar bencana karena kita tinggal di daerah rawan bencana. Selama ini tidak banyak yang tahu apa yang terjadi dan apa yang harus disiapkan menghadapi bencana. Dia berharap, mahasiswa UPI yang berkunjung ke Diorama BNPB dapat menambah pengetahuannya dalam penanggulangan bencana. □

AWG/dari berbagai sumber



# Satu Misi, Dua Badan

Tugas BNPB dan Basarnas sama, yakni menolong dan menyelamatkan orang saat bencana, namun mereka memiliki undang-undang tersendiri. Di satu lokasi bencana, masing-masing menurunkan regu penolong. Meski saling bahu membahu di lapangan, namun mereka beda korps. Jusuf Kalla mengusulkan BNPB dan Basarnas digabung.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**ENIN, 2 Juli 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, Gunung Agung yang berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, kembali mengalami erupsi. Semburan erupsi itu mencapai tinggi kolom abu sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Akibat erupsi tersebut membuat warga yang terkena dampak bencana alam itu segera lari menyelamatkan diri. Karena mereka semua terburu-buru untuk bisa tiba

di tempat yang aman, dan dalam suana panik mengakibatkan jalan yang mereka lewati mengalami kemacetan. Namun, semua bisa teratasi sebab bala bantuan pertolongan jauh-jauh hari sudah siaga. Pada saat itu, Basarnas (Badan Pencarian dan Pertolongan) mengerahkan personel dari Pos SAR Karangasem menggunakan 1 unit truk personel. Kepala Basarnas Bali, Ketut Gede Ardana menjelaskan, personel di Pos SAR

Buleleng sudah siap dan akan bergerak ke arah Kubu untuk membantu evakuasi warga. "Tim *rescue* dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar yang berkantor di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pun siap untuk dikerahkan," begitu penjelasan Ketut pada media.

Ketut menegaskan, agar masyarakat sigap dan jangan sampai panik agar tidak terjadi kekacauan arus evakuasi. "Pokoknya, tetap berhati-hati saat evakuasi mandiri dan mengikuti arahan dari para petugas yang mengatur," ujarnya (*jatim.tribunnews.com*).

Dalam pertolongan kepada korban bencana alam, aksi heroik Basarnas juga terjadi saat longsor di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Februari 2018. Dalam pencarian korban longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Basarnas tidak hanya menurunkan personel, namun juga ekskavator dan juga helikopter. Dalam berita *detik.com*, 26 Februari 2018, badan itu menurunkan personel sebanyak 535 yang terbagi dalam 4 tim yang bertugas mencari korban di empat lokasi.

Kepala Basarnas Semarang, Nur Isrodin, menjelaskan bahwa badan yang dipimpinnya mengerahkan helikopter HR3603 untuk memantau wilayah longsor. Sedang ekskavator yang ada untuk mengeruk material longsor.

Saat terjadi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Basarnas menurunkan personel dan peralatan secara penuh. Dalam salah satu misinya, pasukan berseragam orange itu mengevakuasi hampir 200 wisatawan yang berada di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Karena yang harus dievakuasi jumlahnya banyak, sedangkan kapal yang tersedia terbatas, sehingga pertolongan terpaksa tak bisa sekaligus, segera dilakukan selanjutnya.

Dalam *hariannusa.com*, 1 Agustus 2018,







FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi mengapresiasi kerja Tim SAR dan Potensi SAR lainnya dalam mengevakuasi korban gempa. Pada saat gempa pertama kali terjadi, tidak sampai setengah jam Kantor SAR Mataram telah mengiriskan tim ke Sembalun, Bayan, dan Sembelia. Tiga wilayah itu merupakan titik terparah.

Di *online* itu, dirinya juga merasa bangga sebab Tim SAR berhasil mengevakuasi 549 pendaki Gunung Rinjani yang terjebak di atas gunung. Mereka terjebak karena terjadi longsor pasca gempa.

Apa itu Basarnas? Dalam *Wikipedia* dipaparkan, terbentuknya Basarnas karena amanat Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 Tentang Badan SAR Indonesia (Basari). Badan ini dibentuk dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. Basari dibentuk dengan jalur tanggung jawab kepada Presiden. Sedang pelaksana dari badan ini diserahkan kepada Pusarnas (Pusat SAR Nasional). Pusarnas dipimpin oleh pejabat di Kementerian Perhubungan.

Sama seperti BNPB, Basarnas dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan. Pada 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT. 002/Phb-80 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Pusarnas menjadi Badan SAR Nasional (Basarnas). Selanjutnya pada 1998, Basarnas mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri

Perhubungan nomor KM. 80 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Basarnas serta KM. Nomor 81 tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR.

Di tahun 2001, Basarnas mengalami perubahan kembali lewat Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).

Tiga tahun kemudian, 2005, SAR mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata



Kerja Kantor SAR. Setahun kemudian, 2016, keluar Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam *Wikipedia* disebutkan, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, Basarnas ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada 16 September 2014 UU Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan disahkan oleh Komisi V DPR.

Dilihat dari misi Basarnas dan BNPB tugasnya sama, yakni menolong orang dari bencana. Untuk itu saat memberi sambutan dalam *Seminar dan Lokakarya Nasional Membangun Masyarakat Tangguh Bencana*, Jakarta, Maret 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kedua badan itu digabung. Karena BNPB dan Basarnas sama-sama menolong orang yang terkena bencana. "Dua badan ini hampir sama tugasnya", ujarnya. "Mungkin pada suatu waktu digabung saja, karena sama-sama menyelamatkan orang dari bencana," tambah alumni Universitas Hasanuddin, Makassar itu. □

AWG/dari berbagai sumber

## Akhmad Kautsar

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara

### Perbanyak Kegiatan Positif untuk Generasi Muda Indonesia

**G**ENERASI muda bangsa adalah generasi penerus kepemimpinan negara Indonesia. Namun, seperti saya dengar dari berbagai pembahasan, baik di media massa, seminar atau pun lainnya, generasi muda Indonesia sangat rentan terhadap upaya perusakan moral dan karakter.

Saya melihat, generasi muda memiliki jiwa yang masih muda, semangat yang tinggi, tenaga yang besar, harus diberdayakan atau setidaknya semangat yang tinggi itu dialihkan ke hal-hal positif.

Saya bersyukur ternyata banyak sekali kegiatan dan aktifitas positif untuk generasi muda bangsa, termasuk yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Negara, seperti yang dilakukan oleh MPR RI pada Agustus 2018 lalu menyelenggarakan lomba Debat Konstitusi.

Di arena lomba Debat Konstitusi itu, peserta dari berbagai perguruan tinggi pilihan yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia berlaga memperebutkan gelar juara nasional. Untuk menjadi yang terbaik, para peserta (mahasiswa) harus berjabaku mempersiapkan diri dengan materi konstitusi. Ini yang membuat peserta, termasuk saya, menjadi hafal dan paham di luar kepala seluruh materi konstitusi. Dan, kami jadi meyakini bahwa perumusan konstitusi itu sangat luar biasa, di mana seluruhnya mencerminkan pembelaan dan memerhatikan rakyat Indonesia.

Saya pribadi sangat terkesan. Saya sangat senang, karena tidak menyangka bisa masuk final nasional dan berlaga untuk mendapatkan gelar juara di Jakarta. Saya juga bangga bisa mewakili daerah saya di tingkat nasional.

Kejuaraan nasional ini juga sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk kembali memahami konstitusi negara kita. Selamat untuk MPR," katanya. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DER



## Ni Putu Mella Manika

Mahasiswi Universitas Udayana Bali

### Lomba Kontitusi Mengajak Pemuda Cinta Negara

**S**EJAUH ini kami, para mahasiswa terlena dengan kemajuan zaman, terutama kemajuan dan modernitas media sosial seperti facebook, instagram, youtube dan lainnya. Di media sosial kebanyakan hanya budaya dan pengetahuan dari Barat, dan kalau toh ada dari dalam negeri cuma hal-hal yang kadangkala nggak penting, seperti tik tok dan lainnya.

Dalam konteks pemahaman kepada bangsa dan Negara, sepertinya di alam modernitas teknologi ini agak kurang, dan dikhawatirkan lama-lama akan hilang. Karena anak-anak muda zaman milenial tidak lagi mengenal bangsanya secara mendalam.

Tapi, saya bersyukur sekali, negara melalui MP:R RI sangat memahami hal tersebut. MPR menggelar yang namanya lomba seputar kenegaraan, seperti Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR. Lalu, lomba Debat Konstitusi dan juga ada lomba Academic Constitutional Drafting yang luar biasa saya apresiasi.

Saya sendiri mengikuti lomba Debat Konstitusi yang saya rasakan membuat saya menjadi lebih cinta tanah air, lebih mengenal lagi konstitusi negara saya sendiri. Saya merasakan, selama mempelajari konstitusi Indonesia untuk persiapan lomba, lama-kelamaan saya menjadi agak lupa dengan hal-hal yang nggak jelas, seperti tik tok dan lain-lainya di media sosial.

Saya rasa, pemerintah mesti memperbanyak kuantitas dan kualitas lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan seputar kenegaraan, seperti yang dilakukan MPR, agar para pemuda Indonesia tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. □

DER



## Politik Dua Kaki, **Cari Untung** atau Tak Loyal Pada Partai

Koalisi pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden sudah terbentuk. Ada partai politik yang mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi, dan ada pula yang menyokong pasangan calon Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Namun, di tengah perjalanan ada sesuatu yang unik, yakni sikap politik yang disebut politik dua kaki. Politik dua kaki adalah partai politik secara diam-diam mendukung semua pasangan. Ini bisa terjadi karena keputusan partai tidak sepenuhnya didukung oleh kader. Kader itu memilih pasangan lain. Melihat yang demikian, pengurus partai tidak bersikap tegas kepada yang membelot, namun malah membiarkan. Akibatnya, ada tuduhan partai tak serius dalam berkoalisi dan bersikap cari keuntungan semata. Apakah ada partai bersikap dua kaki? Berikut pendapat politisi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

**Syarief Hasan** Anggota MPR Fraksi Demokrat

### Dua Kaki: Sukses Pileg, Sukses Pilpres

**P**ARTAI Demokrat di menit terakhir menentukan pilihan kepada pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilu Presiden 2019. Ini berbeda dengan PKS dan PAN yang sudah lebih dahulu bergabung dengan Prabowo-Sandi, sehingga kedua partai ini lebih dahulu menyosialisasikan diri. Demokrat sendiri baru bergabung pada 24 Juli 2018 setelah Prabowo berkunjung ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari sinilah kemudian ada hubungan timbali balik untuk saling mendalami bagaimana koalisi bisa terbangun sehingga pada 29 Juli 2018 kita *conform* merapat ke Prabowo-Sandi secara non-formal. Diformalkan baru pada 10 Agustus 2018. Sebelum menyatakan bergabung ke kubu Prabowo-Sandi, Demokrat menginstruksikan kepada seluruh Ketua DPD Demokrat untuk melakukan survei internal kepada seluruh kader.

Dalam survei itu meminta persetujuan atau pandangan, apakah kita mau mendukung Jokowi atau Prabowo. Jadi kita betul-betul mendengar suara dari bawah dan murni, tidak ada pengondisian lebih dahulu. Hasil survei, dari 34 provinsi untuk seluruh kader, hampir 80% memilih Prabowo. Sisanya itu memilih Jokowi.

Yang 20% itu kebanyakan dari Jawa Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur. Rinciannya, Jawa Timur paling tinggi,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kemudian Papua, lalu Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Bali dan Sulawesi Utara. Menjadi pertanyaan saya kepada para wartawan, apakah kami akan memecat mereka? Kan tidak mungkin, karena kami hanya meminta masukkan. Justru ini yang menjadi kewajiban pengurus pusat untuk meyakinkan kepada mereka bahwa yang 20% itu agar mereka memilih Prabowo dengan berbagai alasan yang kami ajukan. Yang 20% itu mungkin belum tahu, apa dan kenapa mereka hanya dihadapkan kepada dua opsi, Jokowi

atau Prabowo.

Dengan demikian, Demokrat solid mendukung Prabowo-Sandi dan kami yakinkan yang 20% itu agar mendukung Prabowo-Sandi. Sejak September 2018, kita punya waktu kurang lebih 6 bulan. Ke depan, di 2019 ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Demokrat mengatakan kita harus menang di Pemilu Legislatif, sebab ini momen kita juga. Kita harus menang, meraup suara sebanyak-banyaknya. Itu menjadi prioritas.

Prioritas yang lain adalah kita harus

mendukung penuh, mengharapkan, dan mengusahakan secara maksimal, Insya Allah pasangan Prabowo-Sandi menang di Pemilu Presiden 2019. Mana yang lebih utama? Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden? Bagi Demokrat dua-duanya

utama. Sama dengan langkah kaki kiri dan kaki kanan. Dua-duanya berfungsi, dua-duanya dibutuhkan, dan dua-duanya harus maksimal.

Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada semua, wartawan,

secara keseluruhan. Doakan mudah-mudahan Demokrat bisa menjadi salah satu pemenang Pemilu Legislatif dan Insya Allah Prabowo menjadi Presiden dan Sandi menjadi Wakil Presiden. □

AWG

**Maruarar Sirait** Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

## Kita Harus Menjalankan Keputusan Partai

**P**DI Perjuangan di luar pemerintahan pada 2004 hingga 2014. Selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa, PDI Perjuangan tetap konsisten di luar kekuasaan, meski beberapa kali mendapat tawaran untuk masuk kekuasaan. Kita mengucapkan rasa hormat dan terima kasih atas tawaran itu. Jadi, selama 10 tahun kita di luar pemerintahan namun buahnya seperti yang kita rasakan sekarang.

Beberapa survei mengatakan, Pemilu 1999 yang menang adalah PDI Perjuangan. Pada Pemilu 2004 yang menang Partai Golkar, dan Pemilu 2009 pemenangnya Demokrat. Kemudian pada Pemilu 2014, PDI Perjuangan menang kembali. Dari sini menunjukkan tak ada partai yang menang 2 kali berturut-turut. Lebih berat mempertahankan kepercayaan rakyat daripada merebut kemenangan. Dalam kesempatan ini saya katakan, PDI Perjuangan bisa menang 2 kali berturut-turut dengan syarat, keputusannya sesuai dengan kehendak rakyat, kadernya tak ada yang korupsi, sikap politiknya tepat dan simpatik, serta tampil dengan orang-orang yang mengambil keputusan dengan benar dan tepat.

Dalam kaitan Pemilu Presiden, Demokrat mempunyai kekhasan tersendiri. Namun, hal demikian tak mungkin terjadi di PDI Perjuangan. Kami tak diajarkan seperti itu. Saya mempunyai pengalaman mengurus PDI Perjuangan Jawa Barat selama 2 periode. Kemudian 2 periode di tingkat pusat. Dalam Pemilu Legislatif, penentuan nomer urut sangat dinamis. Demikian pula saat penentuan calon kepala daerah dalam Pilkada namun, bila semua telah diputuskan oleh partai, masalah yang ada harus selesai.

Demikian pula saat Pemilu Presiden 2019. Ada dinamika yang luar biasa. Soal calon Wakil Presiden saya mendukung Mahfud



MD. Alasannya, kita memerlukan orang seperti beliau, nasionalis, bisa diterima, dan Jokowi perlu dibantu dari kalangan aktivis, kelas menengah perkotaan. Namun, setelah PDI Perjuangan memutuskan KH Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden maka saya akan loyal pada putusan itu, dan saya bekerja untuk Jokowi dan KH Ma'ruf Amin. Di PDI Perjuangan proses boleh berbeda. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sangat demokratis memberi ruang-ruang keterbukaan, namun begitu sudah diputuskan, kita akan menjalankan keputusan.

Bisa saja ada orang yang berasal dari Kelompok A namun memilih calon Presiden dari Kelompok B. Melihat hal demikian, sikap saya adalah menyakinkan orang itu untuk tetap mendukung calon Presiden sesuai keputusan partai. Misalnya, ada pemilih di Dapil saya yang tidak memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal demikian membuat saya

mendatangi mereka dan meyakinkan untuk memilih pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini justru menjadi tantangan, kerja politik kita di situ. Kalau tidak, tidak ada lagi kerjaan politik.

Bagaimana meyakinkan masyarakat tentu dengan cara yang benar, objektif, dan ilmiah. Dengan menunjukkan prestasi dan kinerja. Kita tidak akan pasrah begitu ada konstituen saya mendukung Prabowo-Sandi. Saya akan bekerja untuk meyakinkan mereka untuk bagaimana mendukung pasangan yang kita dukung. Menurut saya, kerja partai itu seperti itu. Yang saya pahami politik itu memperjuangkan apa yang kita yakini benar dan baik. Bagi kami ukurannya adalah Pancasila, berketuhanan, musyawarah, dan berkeadilan, kemudian rakyat mau apa tidak mendukungnya. □

AWG



**Kota Jambi**

# Merawat **Kebhinnekaan** Melalui Festival Seni Budaya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI bekerjasama dengan SMA Negeri 5 Jambi, Selasa (4/9/2018), menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui Festival Seni Budaya antar SMA se-Provinsi Jambi. Acara yang berlangsung di Lapangan SMA Negeri 5, Jl. Arif Rahman Hakim No. 50 Kota Jambi ini bertema: “Melestarikan Seni Budaya, Merawat Kebhinnekaan Kita.” Beragam kesenian ditampilkan oleh ratusan pelajar se-Jambi.

Anggota MPR Kelompok DPD M. Syukur hadir mewakili pimpinan MPR. Selain M. Syukur, juga tampak hadir Capt. Djoni Rollindrawan (Ketua Fraksi Hanura di MPR), Neng Eem Marhamah Zulfa (Anggota Banggar MPR RI), Fachrori Umar (Plt. Gubernur Jambi), Irjen Pol. Muchlis (Kapolda Jambi), Agus Hariyanto (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), Harun Sohar (Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Jambi).

Selaku panitia pelaksana acara sosialisasi ini, Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menjelaskan kenapa sosialisasi Empat Pilar ini dilakukan lewat pentas seni dan budaya. “Pentas seni dan budaya adalah cara yang tepat untuk anak-anak muda,” jelas Siti Fauziah. Dengan berperan aktif, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan



pentas seni dan budaya ini, kata Siti Fauziah, para pemuda sudah menunjukkan perilaku Empat Pilar. “Karena para pelajar ikut melestarikan budaya. Itulah sikap dan perilaku Pancasila” katanya.

Selain melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni budaya itu, kegiatan yang melibatkan para pelajar ini juga menunjukkan bahwa generasi muda kita telah mengimplementasikan



nilai Pancasila yang lain, yakni Persatuan. “Meski para siswa beragam, namun semua bisa bersatu”, paparnya.

Mewakili Pimpinan MPR RI, M. Syukur dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Empat Pilar diselenggarakan di lapangan SMA Negeri 5, Kota Jambi, karena sekolah ini bisa dijadikan contoh bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika bisa hidup. “Budaya Bhinneka Tunggal Ika ada di sini,” ujarnya dengan bangga.

Kepada para wartawan yang meliput acara ini, M. Syukur mengungkapkan bahwa suatu saat dia menonton televisi, dan menyaksikan di banyak tempat sering terjadi tawuran antarsiswa dan terlibat narkoba. “Tapi di SMA Negeri 5 hidup damai meski beragam,” ungkapnya. Karena itulah, menurut M. Syukur, SMA Negeri 5 Kota Jambi

bisa dijadikan contoh buat sekolah lain. “Ini perlu kita rawat dan jaga,” ucap anggota DPD dari Jambi itu.

Berkumpulnya para siswi di sini, kata M. Syukur lebih lanjut, menunjukkan bahwa para siswa mampu bersatu tanpa memandang asal sekolahnya. “Siapa pun yang ada di sini adalah pelajar Indonesia,” ungkap M. Syukur. Untuk itulah dia mengajak para siswa untuk dapat menjauhi narkoba dan menggunakan sosial media dengan kegiatan yang positif. “Lewat seni dan budaya kita bangun nilai-nilai Empat Pilar,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Muchlis dalam sambutannya menyoroti masalah narkoba yang sekarang ini sedang memasuki masa darurat, khususnya di wilayah Jambi. Oleh karena itu, ia

menyarankan agar kaum muda, termasuk para pelajar, agar berperilaku positif saat menggunakan media sosial agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif.

Dengan mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, Kapolda yang alumni SMA Negeri 3 Jambi berharap, para pelajar dapat memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjaga harkat dan martabat baik untuk pelajar sendiri maupun keluarganya.

Sementara Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar ketika membuka acara ini menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, serta menunjukkan bagaimana cara berbangsa dan bernegara yang benar. □

JAZ



Cipanas, Jawa Barat

# Hidayat Nur Wahid: Rakyat Menentukan Masa Depan Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada kader pemuda Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah Cipanas, Jawa Barat, Jumat (24/8/2018). Dalam kesempatan itu, Hidayat mengharapkan, dalam tahun politik ini setiap warga bangsa agar memahami bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu dia meminta agar rakyat jangan golput.

"Pemilu adalah salah satu bab baru dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam tahun politik ini sangat penting warga bangsa memahami bahwa kedaulatan sekarang ini ada di tangan rakyat," katanya usai menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.

Menurut Hidayat, rakyatlah yang menentukan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Rakyatlah yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih baik melalui peran serta mereka. Karena itu jangan Golput. Jangan juga mengafirkan Indonesia. Jangan juga men-*thogut*-kan Indonesia. Ini adalah negara Anda sendiri, negara kita semua," katanya.

Hidayat menjelaskan, Indonesia adalah

negara warisan perjuangan *founding fathers* dan *founding mothers*. "Kita penting menjaganya melalui peran serta kita. Peran serta itu adalah demokrasi melalui Pemilu," ujar politisi PKS ini.

Dalam sosialisasi ini Hidayat juga menyinggung pentingnya untuk memahami kedaulatan rakyat sesuai ketentuan UUD dan memahami makna dari pemilihan umum dan pemilihan presiden. "Maka harapan saya Pemilu serentak yang akan datang adalah melanjutkan warisan hasil perjuangan dari para tokoh bangsa untuk dinikmati generasi yang akan datang," paparnya.

"Melalui apa? Melalui Pemilu yang ber-

kualitas, Pilpres yang berkualitas, supaya menghadirkan anggota dewan yang berkualitas, pemimpin nasional yang berkualitas," sambungnya.

"Dengan cara itulah kita memastikan bahwa Indonesia bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang," tambah Hidayat.

Bagi Hidayat, sosialisasi ini menjadi bukti bahwa warga bangsa Indonesia melalui ormas-ormas, para pemuda, kalangan terpelajar, sampai ke daerah-daerah, mereka sangat cinta Indonesia, cinta Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Dengan semangat ini kami yakin Indonesia akan terjaga. Tapi penting juga untuk saling berkomunikasi, memberi perhatian atau atensi, dan MPR siap mendukung," ujar Hidayat.

Tujuan sosialisasi Empat Pilar MPR adalah untuk menyegarkan kembali komitmen berbangsa dan bernegara, mencintai Indonesia, keragaman Indonesia, termasuk komitmen bahwa Indonesia sebagai negara hukum, masalah kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan Pemilu. □

BSC



## Launching Program Dakwah Masyarakat

# Tatap Indonesia Berkemajuan dengan Meneladani Para Pahlawan Bangsa

Indonesia merdeka karena peran seluruh elemen masyarakat, termasuk peran para ulama dan umat Islam Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



INDONESIA baru saja memperingati HUT ke-73 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018. Momen hari itu mengingatkan seluruh bangsa akan perjuangan luar biasa tanpa mementingkan ego golongan, ras, dan agama. Salah satunya yang ditunjukkan para ulama dan umat Islam Indonesia dalam meraih satu cita bersama, yakni Indonesia merdeka.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah satu momen yang menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa pernah ada para tokoh bangsa dari kalangan Islam, non Islam sampai kalangan nasionalis yang tidak malu untuk saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati untuk menghadirkan satu terobosan luar biasa hanya untuk kepentingan Indonesia.

Peran dan kiprah kalangan Islam Indonesia, menurut Hidayat Nur Wahid, memang

luar biasa. Dengan pekikan takbir 'Allahu Akbar,' para ulama dan tokoh Islam Indonesia mampu menjadi penyemangat untuk maju menghancurkan penjajah di bumi Indonesia.

"Pekikan takbir sejak dulu merupakan seruan penyemangat untuk diraihnya kemerdekaan Indonesia," kata Hidayat Nur Wahid saat menjadi pembicara dalam acara 'Sarasehan dan Launching Program Dakwah Masyarakat' Pesantren Terpadu Daarul Fikri, di Aula Ponpes Terpadu Daarul Fikri, Cikarang Barat, Bekasi, Senin (20/8/2018).

Dalam acara yang dihadiri oleh para pengurus, para ustad dan ustazah, serta para santri Ponpes Terpadu Daarul Fikri Cikarang ini, HNW menegaskan, sangatlah keliru dan salah jika di era kekinian pekikan takbir disangkutpautkan dengan aksi terorisme, sehingga menimbulkan sikap Islamophobia. "Padahal, pekikan takbir yang kini didengungkan adalah sebagai pengingat kembali kecintaan umat Islam akan NKRI yang dulu sama-sama diperjuangkan dengan segala daya upaya," ujar HNW dalam acara bertema: 'Peranan Dakwah Menuju Masyarakat Madani' ini.

Aksi-aksi Islamophobia seperti itu, menurut HNW, tidak hanya menyakiti para ulama dan umat Islam tapi juga menyakiti ketulusan dan keikhlasan perjuangan para ulama dan umat

Islam dahulu. Sebut saja nama besar Hadratussyaikh KH. Hasyim As'ari dengan fatwa jihadnya melawan penjajah demi Indonesia, Muhammad Natsir dengan mosi integralnya demi Indonesia, Bung Tomo dengan pekikan takbirnya yang terkenal demi Indonesia.

Di sisi lain, HNW mengungkapkan, ada sebagian pihak yang memperkeruh suasana dengan melakukan aksi-aksi Indonesia phobia, antara lain meyakini persepsinya sendiri bahwa Indonesia adalah *thogut*, Indonesia bid'ah, dan lain sebagainya sehingga memancing elemen bangsa lain untuk merespon dengan keras.

Hal-hal seperti itu (Islam phobia dan Indonesia phobia), kata HNW, adalah sama-sama akan menghambat perjalanan bangsa ini ke depan. "Saya berharap, demi masa depan bangsa yang lebih baik, stop Islam phobia dan Indonesia phobia," seru HNW. Maka, jika ada kalangan Islam yang melakukan dakwah jangan lantas dipersepsikan negatif. "Demikian juga kalangan Indonesia phobia harus menghilangkan persepsi negatif tersebut, sebab merdeka dan lahirnya negara Indonesia ada juga kiprah dan peran para ulama," tandasnya. □

DER



## Kabupaten Tanggamus

# Ketua MPR Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**IHADAPAN 400 orang warga Pekon (desa) Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat tetap rukun jelang Pemilu 2019. Tidak perlu ada ribut-ribut, apalagi sampai berkelahi satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya, kontestasi politik itu diikuti sesama anak bangsa, satu saudara, bukan dengan orang lain.

“Pemilu itu seperti pemilihan kepala desa, semua saudara kita. Makanya tidak perlu

ribut-ribut, tidak perlu berkelahi, dan jangan terpecah belah”, pinta Zulkifli Hasan.

Artinya, lanjut Zulkifli Hasan, yang suka terhadap Pak Jokowi silahkan pilih Joko Widodo. Demikian juga yang menyukai Prabowo Subianto silakan memilih Prabowo. Yang penting tidak boleh ada keributan, apalagi perpecahan. Karena baik Jokowi maupun Prabowo, keduanya adalah putera terbaik bangsa Indonesia. Bahkan antara Jokowi dan Prabowo, keduanya berteman baik.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR

Zulkifli Hasan saat melaksanakan dialog Empat Pilar Kebangsaan dengan masyarakat Desa Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Acara tersebut berlangsung di lapangan Desa Pekon Marga Mulya, Rabu (5/9). Dialog Empat Pilar itu merupakan kerjasama MPR RI dengan Karang Taruna Pekon Marga Mulya.

Dalam negara demokrasi, kata Zulkifli Hasan, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya. Karena itu, masyarakat tidak boleh menjual murah kekuasaan untuk





menentukan pemimpinnya itu. Masyarakat juga tidak boleh menentukan pilihannya hanya berdasar uang transpor, kerudung, atau nasi kotak semata.

“Kenali benar siapa yang akan dipilih jangan sampai menyesal di belakang hari. Kenali siapa temannya, asal usulnya, dan juga sepak terjangnya. Semua itu penting untuk menentukan kepemimpinan di masa yang akan datang”, kata Zulkifli.

Itulah sebagian isi pidato yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat melakukan sosialisasi Empat Pilar sekaligus kunjungan kerja (kunker) selama tiga hari di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 5-7 September lalu.

Selain di desa Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat, Ketua MPR juga bertemu dengan anggota Majelis Ta'lim Nuzulul Khikmah Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kelompok Tani Harapan Makmur Pekon Sudimoro, Kecamatan Sewmaka, Paguyuban masyarakat pasar Wonosobo Kota Agung, Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan Bulok, Kelompok Tani Cemerlang Kecamatan Pulau Panggung. Serta mahasiswa baru Politeknik Negeri Lampung (Polinela).

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, selain menyampaikan sosialisasi, Ketua MPR juga menyelipkan pesan agar masyarakat berhati-hati dalam memilih pemimpin pada ajang Pemilu 2019. Efek dari pemilu itu akan dirasakan masyarakat selama lima tahun. Karena itu, Zulkifli meminta masyarakat tidak menjual murah hak demokrasi, hanya dengan uang transpor, nasi kotak, sarung, atau kerudung saja.

Selain itu, Ketua MPR juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam



menghadapi gejolak ekonomi akibat turunnya nilai tukar rupiah dibanding dolar Amerika. Ketua MPR meminta semua pihak tidak saling menyalahkan atau bahkan mencari kambing hitam atas terjadinya peristiwa itu. Sebaliknya, naiknya dolar Amerika itu harus menjadi momentum bela negara, sekaligus untuk mempererat persatuan. Karena imbas kenaikan dolar akan mudah dihadapi kalau seluruh komponen bangsa bersatu.

“Naiknya dolar bisa menyebabkan kesulitan buat kita semua, karena itu kita harus bersatu. Yang punya dolar, juallah dahulu untuk membantu meredakan tekanan terhadap rupiah,” ujar Ketua MPR.

Saat ini, menurut Zulkifli, pemerintah tengah berjuang untuk mengurangi tekanan rupiah terhadap dolar. Berbagai program sudah dilakukan agar penurunan nilai rupiah bisa dikendalikan. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu, antara lain

menghentikan impor barang mewah, dan menunda pembangunan infrastruktur yang memiliki kandungan barang impor sangat besar.

“Kita berharap ada peningkatan nilai ekspor sehingga mampu mendatangkan devisa. Selain itu para eksportir juga diminta memulangkan devisanya. Inilah sikap-sikap yang bisa dilakukan sebagai bagian bela negara”, kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli percaya, kalau semua anggota masyarakat bersatu memenuhi panggilan bela negara untuk memperbaiki nilai rupiah, krisis yang menimpa bangsa Indonesia saat ini akan segera teratasi. Sebaliknya, jika situasi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapat keuntungan pribadi maka kejatuhan nilai rupiah itu akan menimbulkan kesusahan bagi seluruh bangsa Indonesia. □

MBO





## Simposium KAHMI

# MPR Dorong KAHMI Menjadi Pelopor Persatuan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Zulkifli Hasan mengatakan, negeri ini dilahirkan oleh para cendekiawan. Dari tahun 1908 hingga tahun 1945 beragam organisasi, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, organisasi para pemuda yang berlatar daerah, NU, Jamiatul Khair, dan yang lainnya bergiat dan bercita-cita mendirikan Indonesia. Zulkifli Hasan mengemukakan yang demikian saat memberi sambutan dalam simposium yang diselenggarakan oleh KAHMI di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 12 September 2018. “Indonesia dilahirkan oleh para intelektual dan cendekiawan”, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, di tahun 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki gagasan ke depan. Disebut Soekarno, Hatta, dan yang lainnya sudah mencanangkan dan memikirkan demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Pikiran para pendiri bangsa semua termuat pada dasar negara dan konstitusi, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Bangsa lain baru memikirkan hal yang demikian 20 tahun kemudian”, ungkap pria asal Lampung itu.

Meski para cendekiawan itu berbeda asal-usul, agama, dan aliran politik namun, menurut Zulkifli Hasan, mereka tetap memberi keteladanan yakni persatuan. “Meski IJ Kasimo dan Mohammad Natsir

berbeda agama dan partai politik, namun mereka tetap bersahabat”, ungkapnya. Hal demikian juga terjadi antara Bung Karno dan Buya Hamka.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan bahwa bangsa ini merdeka mempunyai tujuan bersatu, berdaulat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Diselenggarakannya Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif disebut sebagai salah satu jalan untuk menuju tujuan itu. Zulkifli Hasan menyayangkan bila realitas pemilu sekarang berbeda dengan tujuan Indonesia merdeka. “Sangat prihatin kalau Pemilu membuat perpecahan”, ucapnya.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dirinya mengajak kepada semua untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada. “Pancasila disepakati sebagai pandangan hidup”, tuturnya. Untuk itu masyarakat diharap menjalankan agar ber-Pancasila. “Perilaku yang ber-Pancasila adalah perilaku yang disinari cahaya ilahi”, ujarnya. Tak hanya itu, bila melaksanakan Pancasila maka akan melahirkan perbuatan memanusiakan manusia dan memperkuat persatuan. “Kita beruntung mempunyai pondasi yang kuat”, kata pria yang hobi olahraga jogging itu.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengupas soal hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat. Disebut pemerintah

mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat. Sikap melayani masyarakat sebab saat dirinya disumpah menjadi pejabat, ia harus patuh dan taat pada Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. Dengan sikap yang melayani maka tak akan ada masyarakat yang kelaparan, tak bisa berobat bila sakit, tak bisa sekolah, dan harus bebas dari rasa takut. Dia mengharapkan, pejabat dan aparat pemerintah harus adil. “Kalau aparatur berpihak maka akan menyebabkan perpecahan”, ungkapnya.

Bila pemerintah mempunyai kewajiban melayani masyarakat maka, menurut Zulkifli Hasan, rakyat juga memiliki kewajiban memilih pemimpin yang baik. “Pilih pemimpin yang baik, jangan pilih pemimpin karena sembako”, tegasnya. “Bila salah memilih pemimpin itu beresiko”, tambahnya. Untuk itu dirinya mengajak KAHMI untuk menjadi pelopor di bidang persatuan, ekonomi, maupun bidang lainnya.

Koordinator Presidium KAHMI, Siti Zuhro, dalam kesempatan sebelumnya menuturkan di tahun politik, diharap semua tak membahas masalah politik saja. “Kita juga perlu membahas soal ekonomi kerakyatan”, ujarnya. Dipaparkan Indonesia sebenarnya negara yang kaya, namun dilihat dari indeks kebahagiaan dan ekonomi, masih kalah dibanding dengan negara-negara Asia. “Kita harus mengupayakan minimal setingkat dengan negara-negara ASEAN”, tuturnya. Ditegaskan agar anggota KAHMI ikut membangun ekonomi umat. “Saatnya kita berkontribusi pada bangsa dan negara”, tambahnya.

Siti Zuhro mengatakan, KAHMI berharap pasangan Capres dan Cawapres yang ada mempunyai visi dan misi ekonomi yang tidak melambung-lambung. “Paling penting visi dan misi ekonomi mereka harus membumi”, tegasnya. Dipaparkan saat ini ada sekitar 122 daerah yang gagal mengelola jalannya pemerintahan. Untuk itu, KAHMI tegas mengatakan, kita jangan gegap gempita saja dalam Pemilu, namun juga harus gegap gempita dalam menyejahterakan rakyat. □

AWG

Kabupaten Semarang

# Lewat Drumblek dan Rodat, Empat Pilar Digaungkan ke Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



MINGGU, 16 September 2018, masyarakat Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berduyun-duyun menuju dan berkumpul di Desa Plumbon. Di bawah sinar matahari nan cerah, di sebuah lapangan desa, mereka menyaksikan pertunjukan kesenian *Drumblek* dan *Rodat*. Kesenian kreasi masyarakat ini termasuk jenis kesenian yang tergolong favorit di sana.

Drumblek merupakan kesenian musik perkusi yang menggunakan instrumen dari piranti yang ada di dalam rumah atau sekitarnya, seperti tong plastik, blek (bekas kaleng roti yang berbentuk bulat), ditambah alat-alat musik terbuat bambu. Para pemusik memainkan alat-alat musik itu dengan berbaris dan berjalan, mirip *marching band*. Para mayoret pria dan wanita memakai hiasan warna warni yang terbuat dari bulu-

bulu ayam yang tersemat di dada dan kepalanya, serta memakai sepatu boot yang menutupi kaki hingga betis.

Sedang rodats adalah paduan suara yang dibawakan oleh sepuluh hingga dua puluh pemain yang menembangkan lagu-lagu bernuansa religi, yang isinya mengajak para penonton atau pendengar untuk mengingat kebesaran Allah. Seni seperti ini disebut sebagai media dakwah untuk masyarakat.

Hari itu pagelaran seni drumblek dan rodats terasa agak istimewa. Selain untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, pagelaran yang diselenggarakan oleh MPR ini juga diisi dengan acara Sosialisasi Empat Pilar MPR. Di antara ribuan penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, terdapat pula anggota MPR dan para pejabat pemerintah setempat. Mereka adalah Anggota MPR Fraksi Nasdem Fadholi, Kapolsek AKP

Mustofa, Dan Ramil Kapten Tarim, Camat Suruh Bambang Arif Wijaya, dan Lurah Plumbon Joko Waluyo.

Atas nama pimpinan MPR Fadholi membuka secara resmi pentas Seni Budaya di Desa Plumbon tersebut. Dalam sambutannya, Fadholi menyatakan, pentas seni budaya ini selain untuk sosialisasi Empat Pilar, juga punya tujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional daerah agar jangan sampai punah.

Selanjutnya, Fadholi mengajak masyarakat untuk mengenal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar itu harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah, itu.

Sementara Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, selaku panitia pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR dengan banyak cara. Salah satunya melalui pentas Seni Budaya tradisional, yang kali ini menampilkan kesenian drumblek dan rodats.

Pentas Seni dan Budaya dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR ini berlangsung sukses. Untuk itu, Siti Fauziah memuji dua jenis kesenian yang disuguhkan itu, yang dinilainya penuh kreatifitas dan merupakan perpaduan beragam unsur. "Kerjasama yang ditunjukkan dalam kesenian ini mencerminkan dari Empat Pilar," tutur Siti Fauziah. □



Kuningan, Jakarta

# Warga Kalbar Perantauan Bersilaturahmi dan Bersosialisasi Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**R**IBUAN warga Kalimantan Barat (Kalbar) yang merantau di Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan kota lainnya berkumpul di kediaman Wakil Ketua MPR Oesman Sapta pada Sabtu 15 September 2018. Mereka hadir di kediaman putera asal Kalimantan Barat di Kuningan, Jakarta, itu untuk acara 'Seprehan Seperantauan Masyarakat Kalbar'. Dalam kesempatan itu pulalah digelar Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sebagai acara yang melibatkan ribuan warga Kalbar, acara itu terasa sangat istimewa. Hadir pula tokoh-tokoh asal daerah itu, seperti Wakil Presiden kesembilan Hamzah Haz, Gubernur Kalbar Sutarmidji,

Rektor Universitas Tanjungpura, serta bupati dan walikota di wilayah Kalbar.

Sutarmidji dalam sambutan mengatakan, sosialisasi Empat Pilar model seperti ini merupakan bentuk kegiatan yang sangat luar biasa. Selain para peserta mendengar langsung materi sosialisasi, juga merupakan bentuk implementasi Empat Pilar. "Dengan hadir dalam acara ini, mengingatkan kita bahwa Kalbar adalah bagian dari NKRI", ujarnya.

Sebelumnya, Hamzah Haz dalam sambutannya mengatakan, sebagai warga bangsa kita harus melaksanakan Pancasila. "Khususnya sila pertama", ungkapnya. Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa ini, menurut pria asal Ketapang, Kalbar, itu perlu mendapat perhatian. Menurut Hamzah Haz, ini ditekankan sebab kalau sila pertama dari Pancasila itu tak diamalkan akan membuat moral bangsa ini jatuh.

Hamzah Haz menyatakan, apa yang dikemukakannya ini sudah disampaikan dua tahun lalu, baik kepada presiden, tokoh umat Islam, maupun tokoh non-Muslim. "Kita perlu memperbaiki moral dengan agama", tuturnya. Sebagai umat mayoritas, dia berharap, umat Islam bersikap yang baik. "Kalau umat Islam baik maka baiklah Indonesia", ucapnya.

Sebagai pembicara dalam sosialisasi, Oesman Sapta memaparkan bahwa nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perekat bangsa. "Ini merupakan pertahanan terakhir bangsa Indonesia", paparnya. Oesman Sapta menegaskan hal demikian karena Indonesia mendapat ancaman intervensi bangsa asing.

Selanjutnya, ia mengharapkan agar semua ingat asal-usul kita. "Kita harus ingat dari mana asal kita", ujarnya. Menurut Oesman Sapta, bila semua anak bangsa ingat asal-usul atau daerahnya, maka Indonesia akan maju. "Saya ingin membangun kampung kelahiran saya, Sukadana, Kayong Utara, Kalbar," ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan, dalam membangun semuanya harus diawali dari daerah.



Oesman Sapta mengakui, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berhasil. Dia menceritakan, dulu orang-orang Kalbar pergi ke Serawak, Malaysia, dan berfoto di sana. Dalam foto itu terlihat keindahan dan bagusnya kota negeri jiran. Sekarang, kata Oesman Sapta, sudah terbalik. "Orang-orang Serawak sekarang pergi ke Kalimantan Barat dan berfoto

keberhasilan pembangunan di perbatasan", ungkap pria kelahiran Sukadana itu.

Kemajuan yang terjadi, menurut Oesman Sapta, karena masyarakat Kalbar selain terbuka juga sangat menjunjung sikap kekeluargaan. "Warga Kalbar tak pernah membeda-bedakan", ungkapnya. "Ini sesuai dengan nilai-nilai Empat Pilar", tambahnya.

Menurut Oesman Sapta, sosialisasi dalam

bentuk seperti itu akan menjadi rutinitas tahunan. "Kita sudah lama melakukan hal yang demikian", katanya. Acara yang meriah itu disebut oleh OSO tak sekadar kumpul-kumpul. "Di sini kita menggalang dana untuk korban gempa Lombok, dan terkumpul Rp 676 juta", ungkapnya. "Nanti akan diserahkan oleh Bapak Gubernur", tambahnya. □

AWG

## Pekanbaru

# OSO Ajak Masyarakat Minang Menjaga dan Melestarikan Budaya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Oesman Sapta yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang mendapat sambutan meriah saat tiba di Ball Room Hotel Grand Central Pekanbaru, Minggu (26/8). Berbagai tetabuhan dan tari-tarian turut menyambut dan menghantarkan Oso hingga memasuki tempat acara.

Saat itu, kehadiran Oso yang bergelar Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo adalah untuk memimpin prosesi Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gebu Minang Provinsi Riau masa bakti 2018-2023. Sekaligus menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan warga Gebu Minang di Provinsi Riau.

Prosesi pelantikan DPW Gebu Minang Provinsi Riau itu ditandai dengan pengucapan sumpah janji dan penyerahan Pataka dari Ketua DPP Gebu Minang kepada Ketua DPW

Gebu Minang Provinsi Riau Arsadianto Rachman. Ikut hadir pada acara itu Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman, beserta ratusan anggota Gebu Minang Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Oso berharap, DPW yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik. Mampu membantu pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya ekonomi kecil dan pasar tradisional. Karena mereka memang butuh bantuan agar sanggup bertahan, dan tidak tergilas oleh kekuatan ekonomi liberal.

"Saya percaya struktur yang baru dilantik mampu bekerja dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat, bisa membantu kemajuan ekonomi dan budaya daerah tanpa melupakan asalnya, yaitu Minang" kata Oso.

Bagi Oso, orang Minang adalah kelompok masyarakat yang suka hidup

damai, berdampingan dan bekerjasama dengan siapa pun. Karena itu, keberadaan orang Minang tersebar di mana-mana, dan bisa berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Mereka bisa melaksanakan usahanya tanpa gangguan sedikitpun dari kelompok lain. Dengan cara begitu, masyarakat Minang telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Semua itu bisa terjadi karena masyarakat Minang memegang prinsip, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di mana pun mereka berada, orang Minang senantiasa berusaha ikut membangun, sehingga mereka bisa hidup tenang, karena tidak suka mencari musuh.

Selanjutnya Oso mengajak semua masyarakat Minang untuk bersatu. Terutama dalam membangun perekonomian dan kebudayaan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Minang. Apalagi, masyarakat Minang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang berbudaya. Karena itu, sudah semestinya, jika keluarga besar Gebu Minang selalu menjaga

dan mempertahankan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya.

“Orang yang berbudaya senantiasa terpanggil untuk menjaga dan melestarikan

budayanya. Itulah semestinya tekad seluruh masyarakat Minang terhadap budaya nenek moyangnya sendiri”, ujar Oso. □

MBO

### DPP IARMI - Untag Semarang

## Di Semarang Ketua MPR Galang Agen dan Pelopor Persatuan

**S**EKALI mendayung dua tiga pulau terlampaui. Begitulah kata peribahasa untuk menggambarkan kegiatan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam melaksanakan amanat undang-undang dalam melaksanakan sosialisasi Empat Pilar. Karena dalam satu kali kunjungan ke daerah, Zulkifli Hasan bisa melakukan sosialisasi ditiga hingga empat tempat sekaligus.

Kegiatan itu salah satunya saat mantan Menteri Kehutanan itu melakukan kunjungan ke Semarang, pada Sabtu (15/9). Dalam sehari kunjungan itu Zulkifli menyampaikan sosialisasi Empat Pilar di dua tempat berbeda, yaitu di Wisma Perdamaian dan Kampus Merah Putih Universitas 17 Agustus Semarang.

Di Wisma Perdamaian, Ketua MPR menyampaikan sosialisai di hadapan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia



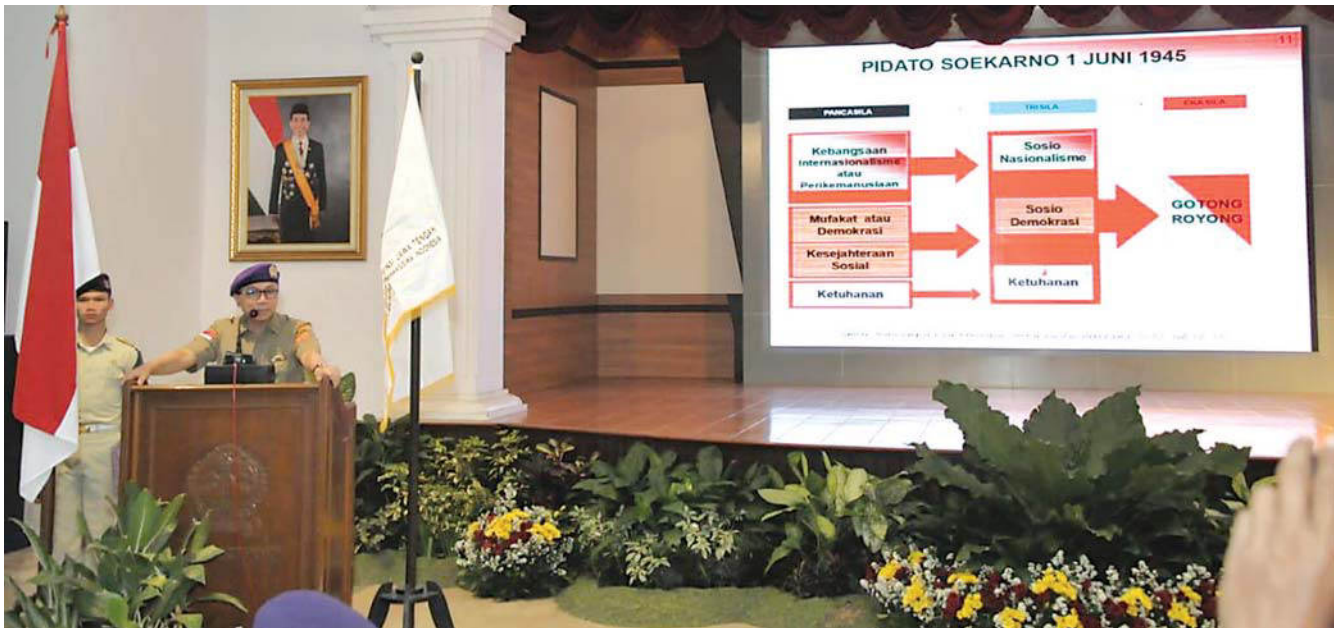
(IARMI). Kegiatan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi IARMI Jawa Tengah periode 2018-2022. Zulkifli Hasan yang juga

Ketua Dewan Pimpinan Nasional IARMI memimpin prosesi pelantikan tersebut.

Prosesi pelantikan DPP IARMI Jawa Tengah itu ditandai dengan penyerahan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



petaka dari Ketua DPN IARMI kepada Ketua DPP IARMI Provinsi Jawa Crisno Haribowo. Pada kesempatan tersebut, Ketua MPR juga menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan kepada sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Saat menyampaikan sosialisasi, Ketua MPR antara lain mengatakan, para pendiri bangsa dan pemimpin Indonesia senantiasa mengajak dan memberikan contoh perilaku yang baik. Bung Karno misalnya, pada 1 Juni 1945, Presiden pertama Indonesia itu sudah berbicara soal kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah mufakat. Selanjutnya, pada 18 Agustus, Bung Karno membahas tentang Hak Azasi Manusia, padahal waktu itu PBB saja belum membahas soal HAM.

Sementara K.H. Agus Salim, tokoh peletak dasar-dasar diplomasi Indonesia menguasai sepuluh bahasa adalah sosok sederhana. Agus Salim memiliki prinsip menjadi pemimpin, berarti siap hidup menderita.

“Bung Karno tidak hanya bicara, tapi juga memberi contoh nyata. Meski berbeda pendapat, tetapi antara Bung Karno dan Bung Hatta saling sayang dan menghormati,” ujar Zulkifli Hasan.

Karena itu, Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meniru dan melanjutkan pemikiran, tindakan dan perilaku para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia, terlebih dalam menghadapi pemilu 2019.

“Pilihan boleh beda, tapi kita tidak boleh terpecah. Kita harus tetap bersatu, karena

pemilu itu memilih di antara sesama anak bangsa”, kata Zulkifli.

Pada kesempatan itu, Zulkifli mengajak jajaran IARMI menjadi pelopor persatuan, dan menghindari perpecahan. Mengajak masyarakat untuk menghindari pertikaian dan tindakan anarkisme.

Ajakan serupa kembali diulang oleh salah satu putera terbaik dari Provinsi Lampung itu sejam kemudian. Di hadapan mahasiswa baru Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Zulkifli Hasan mengajak mahasiswa kampus Merah Putih itu ikut menjadi bagian dari agen dan pelopor persatuan. Apalagi, jelang Pemilu 2019 ini gesekan di antara para pendukung pasangan calon pilpres mulai bersitegang, mereka tak segan menyerang lawannya dengan istilah-istilah



yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan.

“Mahasiswa harus menjadi agen pelopor persatuan. Mahasiswa tidak boleh diam, apalagi setelah melihat Pemilu 2019 berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa”, kata Zulkifli Hasan.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengingatkan, sejak dulu kemajuan Indonesia tak pernah lepas dari peran generasi muda. Sejak 1908 dengan berdirinya Budi Oetomo, Sumpah Pemuda pada 1928, Kemerdekaan Indonesia 1945 hingga gerakan reformasi 1998. Karena itu, menghadapi Pemilu 2019, Ketua MPR mengajak seluruh mahasiswa melanjutkan kiprahnya

mengawal NKRI.

“Dari semenjak sebelum merdeka, pemuda selalu menunjukkan peran pentingnya. Kini bangsa Indonesia kembali memanggil, kita merasakan ada gesekan, karena itu mahasiswa harus menunjukkan perannya mengawal NKRI”, sebut Ketua MPR.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa baru Untag Semarang. Acara tersebut berlangsung di Aula Graha Kebangsaan, Kampus Merah Putih Untag Semarang. Ikut hadir pada acara tersebut Rektor Untag Semarang Dr. Drs. H. Suparno M. Si.

Mahasiswa, kata Zulkifli Hasan, harus

menjadi pelopor dan agen persatuan bangsa. Mahasiswa harus mau dan mampu meng-ajak masyarakat untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena se-sungguhnya pemilu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Se-hingga tidak tepat kalau pilihan pimpinan nasional malah menimbulkan pertikaian.

“Mahasiswa harus mampu mengajak dan memengaruhi masyarakat agar pemilu yang akan berlangsung pada April 2019, bisa berlangsung secara jujur dan adil, tidak ada pertikaian dan perkelahian”, kata Zulkifli Hasan. □

MBO

## PSB di Kota Padang

# Pesan Persatuan dan Perdamaian di Kumandangkan

**D**UA tahun lampau, persisnya 2016, di pelataran Monumen Merpati Perdamaian Muaro Lasak Kota Padang berkumpul perwakilan dari 36 negara di dunia. Dari bibir pantai Muaro Lasak itu mereka menggelorakan semangat perdamaian ke seluruh dunia. Kini, dalam skala nasional, juga dari pelataran momen yang memang dibangun dalam rangka menyukseskan *Multilateral Naval Exercise Komodo 2016*, itu dikumandangkan semangat persatuan dan perdamaian.

Pesan persatuan dan perdamaian itu digelorakan melalui kegiatan seni budaya tradisional Minangkabau. Pageran seni budaya yang dipersembahkan untuk warga masyarakat Kota Padang ini dikemas dalam sebuah kegiatan bertajuk sosialisasi Empat Pilar MPR, pada Sabtu (8/9/2018) dengan mengambil lokasi di Monumen Merpati Perdamaian Muaro Lasak. Berbagai seni budaya Minang dipersembahkan hari itu, seperti Silek Pauh, Tari Gelombang, Tari Piring, dan Randai.

Anggota MPR Fraksi PKS, Dr. Hermanto, SE., MM., atas nama pimpinan MPR membuka secara resmi Pagelaran Seni Budaya (PSB)



tradisional Minang ini. Hadir dalam kesempatan itu anggota MPR Fraksi Demokrat Drs. Guntur Sasono, M.Si.; anggota MPR Fraksi Hanura Capt. Djoni Rolindrawan; anggota Bappenas Dewi Soetjaningai dan Ahmad Khafi Ghana, serta pejabat SKPD dan Forkompimda Kota Padang, serta tamu, undangan, dan masyarakat umum.

Walikota Padang, Mahyeldi Asharullah, juga hadir dan sekaligus menyampaikan sambutan selaku tuan rumah. Menjadikan Kota Padang sebagai tempat Sosialisasi Empat Pilar dengan metode Pagelaran Seni Budaya ini dinilai tepat. “Di Kota Padang terdapat 19 etnis, dan semua etnis bisa berbahasa Minang. Bahkan, ada di antara mereka (etnis non Minang-red) lupa bahasa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ibunya,” ungkap Mahyeldi. “Inilah bukti akulturasi di Kota Padang berjalan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menyatakan, meski Kota Padang telah beberapa kali menjadi tuan rumah even internasional untuk perdamaian dunia, namun kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini juga tak kalah pentingnya. Apalagi, kata Mahyeldi, kegiatan dihadiri oleh tamu-tamu luar biasa, yakni anggota MPR dari Jakarta. “Mudah-mudahan Sosialisasi Empat Pilar ini menghasilkan hal positif sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah,” harap Mahyeldi.

Lalu, atas nama Pimpinan MPR, Hermanto

menyatakan, Sumatera Barat memang kaya dalam hal kegiatan, baik nasional maupun internasional, dalam menggelorakan pesan persatuan dan perdamaian dunia. Monumen Merpati Perdamaian Muaro Lasak ini, lanjut Herman, adalah menjadi salah satu bukti bahwa kita telah melaksanakan perintah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Indonesia turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Kalau kita cermati, lanjut Hermanto, sosialisasi Empat Pilar dengan metode pagelaran seni budaya adalah cara untuk mengungkapkan semangat kesatuan dan persatuan. Karena seni adalah rasa, dan itu

sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, Hermanto berharap, sosialisasi Empat Pilar melalui seni budaya harus terus dikembangkan. “Melalui seni budaya kita harus memahami betul nilai-nilai keberagaman,” kata anggota MPR dapil Sumatera Barat ini.

Sementara Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah selaku panitia pelaksana pagelaran Seni Budaya Empat Pilar MPR menyatakan, sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar, pagelaran seni budaya ini diselenggarakan oleh MPR di berbagai daerah dengan segmen masyarakat dan jenis kesenian di masing-masing daerah.

Siti Fauziah menunjuk salah satu contoh ketika MPR menyelenggarakan pagelaran seni budaya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, beberapa waktu lalu. Di sana ditampilkan salah satu jenis kesenian, yakni seni bertutur Nyanyi Panjang, sebuah kesenian yang hampir punah dengan penutur yang sudah sangat terbatas.

Jadi, menurut Siti Fauziah, pagelaran seni budaya ini adalah juga merupakan upaya MPR untuk ikut melestarikan seni budaya daerah. Karena, dia berpendapat, dalam setiap seni budaya tradisional mengandung nilai-nilai luhur. “Melalui sosialisasi ini kita berharap bisa memberikan makna kepada generasi penerus dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,” katanya. □

SCH





Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

# Jadi Agen Perubahan Beri Pendidikan Politik Masyarakat



FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) selepas pukul 12.00 WITA 13 September 2018, berkumpul di auditorium kampus yang berada di Jl. Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka adalah peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi yang digelar pada hari itu sangat istimewa, langsung disampaikan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Tak heran bila dalam sosialisasi itu hadir Rektor UMKT Prof. Bambang Setiaji dan para pimpinan Muhammadiyah Majelis Wilayah Kalimantan Timur. Di awal sambutan, Bambang Setiaji mengatakan, hadirnya Zulkifli Hasan merupakan kesempatan yang langka. Untuk itu, dia berharap, para mahasiswa menggunakan kesempatan sosialisasi itu dengan baik.

Ketika tampil di depan para peserta sosialisasi, Zulkifli Hasan mendapat sambutan, tepuk tangan yang meriah. Kepada mereka, mantan menteri kehutanan itu menyebut dalam soal pengamalan nilai-nilai Empat Pilar, Muhammadiyah sudah khatam. "Muhammadiyah sudah melaksanakan Empat Pilar", ujarnya.

Dia mencontohkan, sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola Muhammadiyah, terutama yang berada di Indonesia bagian timur, peserta didiknya tak hanya umat Muslim, umat yang lain juga ada. "Bahkan di Indonesia timur peserta didik perguruan Muhammadiyah mayoritas adalah non-Muslim", ungkapnya. Jadi dari sini Muhammadiyah hadir untuk bangsa dan negara.

Tak hanya itu, menurut pria asal Lampung itu, dalam hal memilih ketua, Muhammadiyah menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat sehingga tak ada unsur intimidasi atau iming-iming. Dari semua yang sudah dilakukan oleh organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu, Zulkifli Hasan menegaskan, kalau Indonesia mau maju maka belajarlah pada Muhammadiyah.

Dalam sosialisasi yang diliput oleh beragam media itu, pria yang mempunyai hobi jogging itu mengungkapkan bahwa Indonesia didirikan oleh kaum intelektual. Karena didirikan oleh kaum intelektual maka gagasan berbangsa dan bernegara sangat maju ke depan. "Tahun 1945 kita sudah memikirkan negara kesejahteraan", paparnya. Masalah

ini, menurut Zulkifli Hasan, baru dibicarakan oleh negara lain 20 tahun kemudian.

Sebagai kaum intelektual, para pendiri bangsa benar-benar memikirkan bangsa, negara, dan rakyat. Agus Salim, salah satu pendiri bangsa, bahkan menyebut, menjadi pemimpin adalah jalan menderita. Keteladanan dari para pendiri bangsa, ujar Zulkifli Hasan, tak hanya dalam kepemimpinan. Dalam pergaulan, sikap para intelektual itu dikatakan perlu ditiru. "Meski IJ Kasimo dari Partai Katolik dan Natsir dari Masyumi, namun mereka bersahabat", ungkapnya. Meski Buya Hamka dan Soekarno pernah berseteru, namun ketika Soekarno wafat, Hamka yang menyolatkan. Sikap para pendiri bangsa itu, menurut Zulkifli Hasan, sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, yakni bersatu, berdaulat, adil, dan setara.

Setelah Indonesia merdeka 73 tahun, dia merasakan apa yang diteladankan para pendiri bangsa itu mulai pudar. "Kepemimpinan kita sekarang berbeda dengan masa lalu", paparnya. Zulkifli Hasan berharap, para pemimpin atau pejabat melayani rakyat. Hal demikian perlu, sebab mereka disumpah

untuk taat pada konstitusi. “Taat pada konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut menciptakan perdamaian dunia”, paparnya. Dari sinilah tak boleh ada rakyat kelaparan, tak bisa sekolah, dan tak bisa berobat. “Jadi kalau ada mahasiswa UMKT yang tak bisa bayar uang kuliah, jangan dikeluarkan”, harapnya. “Karena tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa”, tambahnya.

Problem yang dihadapi bangsa ini tak hanya itu. Meski Indonesia negeri yang kaya, ungkap Zulkifli Hasan, namun kita dalam berbagai hal, khususnya kesejahteraan, kalah dengan negara lain. Padahal negara itu tak memiliki kekayaan alam, tambang,

sungai, gunung, dan hutan. “Singapura, sungainya saja buatan”, ungkapnya. Menurut Zulkifli Hasan, majunya sebuah bangsa ditentukan oleh orang atau SDM-nya bukan kekayaan alamnya. “Singapura tak memiliki kekayaan alam, namun mereka memiliki SDM yang mampu menjawab tantangan zaman”, ucapnya.

Untuk itu, Zulkifli Hasan, meminta agar para mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Apalagi kalian kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Kalimantan Timur”, sebutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Zulkifli Hasan sangat penting dikuasai, apalagi di era tarung bebas antar negara ini.

Dirinya meminta mahasiswa tak hanya

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tahun politik ini mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan. Para mahasiswa ditekankan menyampaikan kepada masyarakat hak politik, memilih dan dipilih. “Sampaikan kepada masyarakat tentang hak politik secara bertanggungjawab”, paparnya. Yang dimaksudkan hak politik yang bertanggungjawab adalah masyarakat peduli politik, Pemilu, dengan mengetahui asal-usul calon yang hendak dipilih. “Hak pilih kita jangan ditukar sembako, sarung, dan uang”, tegasnya. Untuk itu dirinya mengharap mahasiswa membantu pendidikan politik pada masyarakat mengenai pentingnya hak dan kewajiban warga negara. □

AWG

## Kongres I PAKIN

# Ajak PAKIN Agar Optimistis di Tahun Politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBAGAI warga negara yang bertanggungjawab diharap tidak pesimistis dan masa bodoh dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat didorong agar memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Asdalah tidak bertanggungjawab kalau kita tidak mau tahu urusan politik.

Demikian dikatakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberi sambutan dalam acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN) di Hotel Balairung, Jakarta, 11 September 2018.

Menurut Zulkifli Hasan, bangsa ini didirikan oleh kaum muda terdidik. Kaum muda terdidik itu kemudian mulai bergerak sejak 1908, 1928, hingga 1945. Pada 1945, menurut Zulkifli Hasan, pendiri bangsa sudah

membicarakan dasar-dasar negara. “Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul”, ujarnya.

Pada masa itu, lanjut Zulkifli Hasan, para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu”, ungkapnya.

Ketika Indonesia di tahun 1945 sudah membicarakan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Lalu, duapuluh tahun kemudian banyak negara juga membicarakan hal demikian. “Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding negara lain”, paparnya.

Pria asal Lampung itu menyesalkan bila

saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok bersikap irasional. Harus diakui bangsa ini memang beragam dan majemuk. “Nah dalam kondisi demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan”, tegasnya.

Negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan. “Pancasila harus menjadi perilaku”, ajaknya. Perilaku yang sesuai Pancasila, menurut mantan Menteri Kehutanan, ini adalah perilaku yang disinari cahaya illahi. “Bukan perilaku yang menghujat”, ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Bang Zul itu mengatakan, di antara kita ada yang beda suku dan agama. “Namun kita satu saudara dalam kebangsaan”, tuturnya. Bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan



inilah diharap penguasa adil dalam hukum. “Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi”, ungkapnya.

Untuk itu dia menegaskan, kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. “Tak boleh ada masyarakat yang kelaparan”, katanya. Ditambahkan jangan sampai jabatan digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpah saat hendak memangku kekuasaan.

“Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi”, tegasnya. Di akhir sambutannya, Zulkifli Hasan mengajak PAKIN untuk ikut memberi sumbang saran demi kemajuan bangsa dan negara.

Sebelumnya, Pengurus PAKIN, JS Budi Suniarto, mengatakan, organisasi yang melakukan kongres selama 3 hari, dari 9 hingga 11 September 2018, sudah dirintis sejak lama. “Kongres I karena rahmat Tuhan dan restu bumi serta manusia me-

laksanakan”, ujarnya. Dia mengungkapkan, dengan terbentuknya PAKIN maka organisasi ini menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi pemuda Khonghucu. “Selama kongres semua berjalan baik karena anggota PAKIN berjiwa besar”, paparnya. Dia berharap agar anggota organisasi bekerja tak hanya untuk umat Khonghucu, namun juga berkarya dalam bidang lain yang ada di masyarakat. □

AWG

## Kabupaten Trenggalek

# Mahyudin: Keadilan Harus Diwujudkan di Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST, MM, melakukan *road show* sosialisasi Empat Pilar MPR ke masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pada Senin dan Selasa (17-18 September 2018). Daerah yang dikunjungi adalah Trenggalek, Ngawi (Jawa Timur) dan Klaten (Jawa Tengah). Di Kabupaten Trenggalek, Mahyudin menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR di Pendopo Kantor Bupati Trenggalek. Sosialisasi dihadiri Bupati Trenggalek yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak didampingi istri, Arumi Bachsin.

Dalam sosialisasi di Trenggalek, Mahyudin menyebutkan, empat sila Pancasila sudah berjalan dengan baik. Hanya keadilan sosial yang masih menjadi persoalan. Pemerintah harus menciptakan rasa adil di seluruh

lapisan masyarakat.

“Ketika semua orang merasa adil maka semuanya akan damai. Persoalannya adalah keadilan sosial. Rasa adil ini perlu diciptakan seluruh lapisan rakyat Indonesia,” kata Mahyudin dalam pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR yang diadakan Gerakan Sosial Center (GSC) Trenggalek. Sosialisasi juga menghadirkan narasumber anggota MPR Dr. Gatot Soedjito.

Menurut Mahyudin, salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah konsep ekonomi yang ditawarkan adalah ekonomi kerakyatan. Tetapi karena tekanan globalisasi, ekonomi Indonesia mengarah pada ekonomi kapitalisme. Kapitalisme inilah yang melahirkan konglomerasi.

“Semula diharapkan adanya *trickle down effect*, tetapi tetesan ke bawah itu tidak terjadi. Akibatnya gini ratio di Indonesia cukup tinggi. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin,” paparnya.

Karena itulah, lanjut Mahyudin, pemerintah harus mendorong rasa adil yang sama agar masyarakat tidak mudah diadu domba. “Yang kecil diangkat, yang besar membantu melalui kebijakan pajak. Rakyat kecil disubsidi seperti subsidi pendidikan, kesehatan,” katanya.

Mahyudin mengatakan, rasa keadilan ini belum tercapai. Masih ada rakyat yang mengalami busung lapar, tidak menikmati listrik, jalan, transportasi. “Karena keadilan belum tercapai maka menjadi potensi untuk mengadu domba rakyat. (Keadilan) Ini harus diselesaikan. Kecemburuan yang terjadi menyebabkan



kita mudah diadu domba,” ucapnya.

Jangan sampai karena adu domba Indonesia menjadi negara seperti Suriah yang dilanda perang saudara. “Ini yang kita (MPR) jaga agar jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Pada petang hari, Mahyudin menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR di di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Ngawi, Jawa Timur. Sosialisasi dihadiri para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Dalam sosialisasi ini, Mahyudin mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilihan presiden. Pesta demokrasi itu harus dihadapi dengan wajar karena pemilihan dilakukan setiap lima tahun.

“Saya sudah keliling mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita berdoa saja, yang penting negara kita sejahtera,” katanya.

Dia juga meminta masyarakat untuk menghormati siapa pun yang terpilih menjadi presiden dalam Pilpres pada April 2019. “Dalam Pilpres nanti siapa pun yang terpilih kita hormati,” ujarnya.

Karena itu, Mahyudin meminta masyarakat untuk tidak perlu melakukan macam-macam, deklarasi ini-itu. “Tidak usah rame dan ribut. Silahkan datang ke kampanye Pilpres. Tidak datang ke kampanye juga tidak apa-apa. Silahkan nanti mencoblos pada hari pemilihan,” pintanya.

Mahyudin mengharapkan masyarakat menghadapi pesta demokrasi secara wajar.

“Menghadapi Pilpres secara wajar saja. Jangan hanya gara-gara beda pilihan, suami istri pisah, persaudaraan terputus,” ujarnya.

“Yang senang dengan Pak Jokowi, ya nanti di TPS monggo pilih Pak Jokowi. Yang tidak suka, ya tidak usah dipilih lagi. Ada masa kampanye pada 23 September 2018 sampai April 2019. Silakan kampanye dengan menjual ide dan gagasan. Silakan, jangan nyerang-nyerang. Jangan hanya gara-gara hastag tagar bisa terjadi keributan,” sambungnya.

Mahyudin meminta masyarakat agar tidak terpancing untuk terpecah belah. “Saya sendiri, kalau Pak Jokowi terpilih, ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau membawa Indonesia lebih baik lagi. Kalau Pak Prabowo yang menjadi presiden, juga alhamdulillah. Ya monggo silakan. Yang penting negara kita tetap utuh, masyarakat bisa lebih sejahtera lagi di masa datang,” katanya lagi.

Menurut Mahyudin, Pilpres adalah pesta demokrasi yang biasa. Rakyat benar-benar berdaulat dan menggunakan kedaulatannya dengan memilih secara langsung. Karena itu, jika terjadi gesekan di bawah adalah karena ada yang memprovokasi.

“Saya percaya ada orang di belakang yang memprovokasi, mengadu domba dan membikin gesekan di bawah. Kita jangan terpengaruh hal-hal seperti itu. Siapa pun presiden-nya, itulah presiden kita,” katanya. □

BSC

## Kurangnya Keteladanan Sebagian Tokoh dan Pemimpin

**W**AKIL Ketua MPR Mahyudin merasa risih ketika menyosialisasikan Empat Pilar MPR di tengah-tengah masyarakat, sementara tidak sedikit anggota MPR yang juga anggota DPR berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak tokoh dan pemimpin yang kurang memberi keteladanan kepada masyarakat.

“Persoalan kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh dan pemimpin bangsa ini merupakan tantangan bangsa Indonesia. (Tantangan) inilah salah satu alasan MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR,” kata Mahyudin dalam sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/9/2018). Sosialisasi kerjasama MPR dengan Yayasan Dharma Utama ini menghadirkan pembicara anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Endang Srikarti Handayani.

Mahyudin mengungkapkan banyak tokoh dan pemimpin bangsa yang ditangkap KPK gara-gara korupsi. Misalnya, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR dan lainnya. “Teman saya Ketua DPR ditangkap. Ketua DPD, anggota DPR, menteri dan gubernur banyak, apalagi bupati tidak terhitung. Semua ditangkap KPK karena korupsi. Kita ini sedang darurat korupsi,” katanya.

Banyaknya tokoh dan pemimpin yang berurusan dengan KPK itulah membuat Mahyudin risih. Pasalnya, tidak sedikit anggota DPR yang juga anggota MPR ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Padahal Mahyudin adalah pimpinan MPR.

“Karena itulah saya kadang-kadang agak risih juga kalau melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Saya menyampaikan ideologi Pancasila dan menanamkan ideologi di tengah-tengah masyarakat, sementara anggota saya (anggota MPR) banyak yang ditangkap karena korupsi,” ujarnya.

“Saya adalah pimpinan MPR. Anggota saya, 692 orang (anggota DPR dan anggota DPD). Tidak habis-habisnya anggota saya ditangkap KPK gara-gara korupsi,” ujarnya. □



## Pimpinan MPR, Sesjen MPR dan Wasesjen MPR Hadiri Opening Ceremony The 18<sup>th</sup> Asian Games 2018



**K**ETUA MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad Basarah, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan Wakil Sekretaris Jenderal MPR Selfie Zaini hadir dalam acara 'Opening Ceremony The 18<sup>th</sup> Asian Games 2018 Jakarta-Palembang', di Stadion Utama Bung Karno (SUBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Acara berlangsung sangat meriah memadukan antara budaya tradisional Indonesia, kekhasan budaya Indonesia, dan modernitas seperti pagelaran tari Ratoh

Jaroe dari Aceh, pagelaran tari kolosal kisah kerajaan Majapahit sampai pertunjukan musik yang dibawakan artis-artis terkini.

Pembukaan Asian Games 2018 ternyata sukses mendapatkan perhatian negara-negara Asia bahkan dunia pun mengakui berhasilnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengakui luarbiasanya acara pembukaan Asian Games.

"Saya nonton juga ya bukan hanya pembukaan, tapi penutupan juga. Sangat membanggakan pagelaran-pagelaran yang dibuat saat pembukaan dan penutupan. Juga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sangat membanggakan pelayanan terhadap tamu-tamu, terhadap para atlet. Prima sekali, sukses penyelenggaraan patut kita syukuri," katanya. □

DER

## Gladi Bersih Sidang Tahunan MPR 2018



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ENYELENGGARAAN Sidang Tahunan MPR 2018 adalah konvensi ketatanegaraan baru dengan agenda pidato kenegaraan Presiden RI di hadapan Sidang Paripurna MPR dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia yang berisi laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Sebagai penyelenggara dan tuan rumah Sidang Tahunan 2018 yang digelar pada 16 Agustus 2018, MPR berusaha memberikan yang terbaik. Untuk itu, Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar sesi gladi bersih rangkaian acara Sidang Tahunan pada 15 Agustus 2018.

Rangkaian acara Sidang Tahunan MPR 2018 digelar lengkap dari

awal hingga akhir. Namun sosok Presiden RI, Wakil Presiden RI, seluruh Pimpinan MPR RI dan tamu VVIP diperankan oleh peran pengganti dari pegawai Setjen MPR RI.

Gladi bersih yang ditinjau langsung Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Evert Enerst Mangindaan itu berlangsung sukses dengan beberapa masukan dari Pimpinan MPR. Menurut Hidayat Nur Wahid, seluruh teknis acara Sidang Tahunan hampir sama persis dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan tahun lalu. Yang berbeda hanya jumlah kursi Pimpinan MPR yang sekarang berjumlah 8 kursi, sedangkan tahun lalu hanya 5 kursi Pimpinan. □

DER



## Ma'ruf Cahyono Pimpin Upacara HUT ke-73 MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono memimpin upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-73 MPR dan DPR RI yang jatuh pada 29 Agustus.

Upacara yang digelar di lapangan upacara kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018), itu dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, para pejabat teras dan para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD. Acara pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya berlangsung khidmat dan lancar.

Usai pengibaran bendera Merah Putih, dilanjutkan dengan prosesi penyematan penghargaan berupa tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI oleh Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono kepada ASN di lingkungan Setjen MPR, DPR dan DPD RI. Satyalencana diberikan kepada ASN yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun.

Satya lencana adalah penghargaan diberikan kepada ASN yang telah mengabdikan kepada negara secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat menjadi teladan bagi ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya.

Dalam sambutannya, Ma'ruf Cahyono mengucapkan selamat HUT ke-73 MPR RI dan DPR RI dan juga atas nama pimpinan Setjen MPR, DPR dan DPD mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI.

"Pengabdian luar biasa tidak mudah sangat diapresiasi negara. Tentu saja penerima penghargaan tersebut adalah para ASN pilihan yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai teladan, tidak hanya di lingkungan kerja karena sebagai abdi masyarakat mudah-mudahan menjadi teladan juga di tengah-tengah masyarakat masing-masing," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Cahyono juga berpesan bahwa semua pasti melewati secara bersama-sama sejarah perjalanan MPR, DPR dan DPD yang banyak sekali dinamika dari mulai berdiri hingga sekarang.

"Maka dari itu, saya mengajak kita semua sebagai ASN untuk bersama-sama terus mendukung wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD supaya mendapatkan tempat yang baik dan apresiasi serta mendapatkan citra baik dari masyarakat Indonesia," tandasnya. □

**DER**





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Viva Yoga Mauladi**, Wakil Ketua Komisi IV DPR

## Kedaulatan Pangan Bagian Penting Kedaulatan Negara

**P**EMERINTAH kembali mengimpor beras untuk kebutuhan dalam negeri. Namun kebijakan impor beras ini mengundang polemik. Pasalnya, Bulog menganggap impor beras tak diperlukan karena cadangan beras dalam negeri mencukupi. Stok beras di gudang Bulog melimpah, mencapai 3 juta ton, dengan rincian 2,4 juta ton yang ada, 400 ribu ton beras impor masuk pada Oktober, dan 4.000 ton per hari serapan gabah petani.

Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai, impor beras diperlukan sebagai antisipasi jika produksi beras dalam negeri tahun ini meleset dari target. Produksi petani dalam negeri kemungkinan meleset dari target 80 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 46,5 juta ton beras. Apalagi stok beras pemerintah disebut-sebut sempat di bawah batas aman (1–1,5 juta ton). Karena itu, Kemendag mengeluarkan izin impor 2 juta ton beras tahun ini.

Membahas polemik itu, pada pertengahan September, MPR bersama Koordinator Wartawan Parlemen menggelar diskusi

seputar impor beras dan bahan pangan lainnya, serta ketahanan pangan. Diskusi menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Bagaimana pandangan dewan terhadap polemik seputar impor beras dan pangan lainnya? Berikut penuturan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait persoalan pangan itu. Petikannya.

**Kebijakan impor beras mengundang polemik. Apalagi ada perbedaan pendapat antara Bulog dan Kementerian Perdagangan terkait impor beras tersebut. Bagaimana penilaian Bapak?**

Jumlah penduduk Indonesia saat ini 260 juta jiwa. Setiap hari, penduduk Indonesia sedikitnya makan tiga kali. Ini menjadi tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan pangan bagi rakyat. Dari sisi legislasi sebenarnya sudah lengkap. Ada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 23 Tahun 2013 tentang Kelautan, UU Hortikultura, UU

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dari sisi legislasi, peraturan perundang-undangan yang sudah diketuk palu DPR bersama pemerintah sudah cukup baik. Persoalannya terletak pada pelaksanaan UU itu. Terkadang terjadi kontradiksi antara UU dan peraturan di bawahnya, seperti Inpres atau peraturan menteri yang tidak mengambil spirit dari UU. Contohnya, Inpres No. 15 tahun 2015. Inpres ini mengatur tentang harga pembelian pokok (HPP) gabah kering giling. Dalam Inpres tertera harga Rp 3.700 per kg. Padahal harga di lapangan sudah mencapai Rp 5.000 – Rp 5.500 per kg. Ini membuat Bulog sebagai operator yang diberi kewajiban menyerap gabah petani terbentur peraturan perundang-undangan sehingga daya serap Bulog berkurang, dan tidak mampu bersaing dengan swasta atau pengijon. Akibatnya, terjadilah impor beras.

Artinya, kebijakan di bawah UU memang sangat memungkinkan terjadinya *abuse of power*. Ada penyimpangan kekuasaan yang

menimbulkan moral hazard di sekitar kebijakan itu. Contohnya, impor beras. Kementerian Pertanian mengatakan, produksi beras mengalami surplus. Kementan tidak hanya melihat dari perspektif ekonomi tentang kenaikan harga beras di pasar. Kenaikan harga bisa disebabkan banyak factor, seperti distribusi, perubahan cuaca, mata rantai yang panjang sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Sementara Kementerian Perdagangan melihat dari perspektif ekonomi, ada *supply* dan *demand*. Ketika terjadi kelangkaan barang maka akan terjadi kenaikan harga. Begitu beras berkurang maka terjadi kenaikan harga beras di pasar. Itulah sebabnya Kemendag mengeluarkan izin impor beras.

Dua kementerian dalam pemerintahan mengajukan kebijakan yang berbeda. Dari sisi kebijakan publik, hal itu tidak mencerminkan sebuah pemerintahan yang baik. Seharusnya pemerintah memiliki data produksi dan konsumsi yang sama. Pada kenyataannya data Kementan dan Kemen dag berbeda. Sehingga muncul prasangka dan kecurigaan di balik impor beras, apalagi menjelang Pemilu dan Pilpres.

**Apakah kalau tidak mengimpor beras akan berdampak pada stok atau cadangan beras nasional?**

Itulah dilema dihadapi Bulog. Kita sudah rapat dengan Dirut Bulog, Budi Waseso. Jadi, Bulog itu memang mandul. Kenapa? Karena sebagai operator, dari sisi kebijakan Bulog tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sisi komersial, Bulog juga belum maksimal. Sedangkan fungsi sosial Bulog juga sudah dimandulkan, karena Raskin sekarang diganti menjadi Rastra yang menjadi tanggungjawab Kemensos. Jadi, Bulog tidak berperan apa-apa. Karena itu, Bulog mengusulkan pada 2019 bantuan pangan non tunai dihapus dan diganti dengan Rastra. Kuasa pengguna anggaran untuk Rastra adalah Bulog.

Jadi, memang semua karut marut dalam persoalan pangan ini. Penyebabnya, pemerintah tidak menindaklanjuti amanat UU Pangan. Dalam UU Pangan pasal 125 disebutkan, pemerintah wajib membuat Badan Pangan Nasional. Badan ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Badan ini juga diberi hak untuk membentuk badan-badan usaha di bawahnya dalam penyediaan pangan, penyerapan pangan, distribusi

pangan, dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Seharusnya pada Oktober 2015 lalu, sesuai amanah UU, badan ini sudah dibentuk. Tapi sampai September 2018, Badan Pangan Nasional belum juga terbentuk. Kita sudah tanyakan ke Menpan, jawabannya di Seskab. Ketika ditanyakan ke Seskab, jawabannya belum diselesaikan. Kalau Badan Pangan Nasional ini terbentuk, saya optimistis tata niaga, mekanisme, prosedur, sistem pangan nasional itu akan *clear* dan *well organized* sehingga akan mengurangi *moral hazard*, dan terutama adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak.

**Kalau masalahnya karena tidak ada Badan Pangan Nasional, mengapa pemerintah tidak langsung secara**



**serius membentuk Badan Pangan Nasional?**

Ya, memang karena pemerintah kelihatannya tidak serius membentuk Badan Pangan Nasional. Sebab, kalau Badan Pangan Nasional ini terbentuk maka akan terjadi perubahan fundamental terhadap struktur dan mekanisme pangan nasional, termasuk "pola permainan" (pengadaan dan distribusi pangan). "Pola permainan" juga bergantung pada konfigurasi politik. Bicara pangan tidak bisa lepas dari politik. Seharusnya pangan dipisahkan dari politik. Tetapi, pada kenyataannya, tidak bisa dipisahkan. Presiden Thailand, putri Thaksin, jatuh karena masalah pangan.

Apalagi, bisnis pangan tidak ada matinya. Selama manusia hidup, pasti perlu pangan. Uang yang beredar untuk kebutuhan

sembilan bahan pangan pokok, perkebunan, hortikultura, mencapai ribuan triliun rupiah. Sebenarnya, Indonesia sebagai negara yang berbasis pertanian dan maritim bisa menjadi negara maju kalau dikelola dengan baik. Tapi, memang ada aspek manajerial, *leadership*, dan politik, sehingga sampai sekarang masih stagnan. Artinya, tidak ada perubahan signifikan untuk memajukan pertanian dan mensejahterakan petani dan nelayan.

**Agar tidak bergantung pada beras sebagai makanan pokok, mengapa tidak dilakukan diversifikasi pangan?**

Pemerintah juga kurang serius dalam program diversifikasi pangan. Sebab, dari sisi anggaran, total anggaran Kementan rata-rata hanya satu persen. Bayangkan, untuk menuju ketahanan, kemandirian, dan



kedaulatan pangan, Kementan yang bertanggungjawab di bidang pangan dan produksi hanya diberi satu persen dari total APBN. Sampai kapan pun rasanya sulit mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Hal-hal berkaitan dengan pangan dan bahan makanan pokok rakyat tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, dari dulu sampai sekarang. Buktinya, anggaran untuk Kementan hanya satu persen dari APBN. Padahal sektor pendidikan sedikitnya mendapat 20% dari APBN. Beberapa negara mengalokasikan minimal 10%. Apalagi lahan pertanian semakin berkurang. Bagaimana mungkin kita membangun kemandirian dan kedaulatan pangan? Padahal kedaulatan pangan adalah bagian penting dari kedaulatan bangsa. □



*Mahyudin, Wakil Ketua MPR*

# Kembali Bermain Tennis

## *Setelah Lama Ditinggalkan*



**B**UKAN karena demam Asian Games 2018 yang baru saja usai membuat pimpinan MPR menjadi rajin berolahraga. Bukan. Di tengah kesibukan yang sangat padat, pimpinan MPR tetap rutin berolahraga. Ketua MPR Dr (HC) Zulkifli Hasan misalnya, di waktu senggang tetap bermain tenis. Begitu pula Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid rajin menekuni olahraga bulutangkis.

Demikian pula pimpinan MPR lainnya, juga menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga. Wakil Ketua MPR **Dr. Mahyudin** bersama anggota Lembaga Pengkajian MPR, **Dr. Baharuddin Aritonang**, pada Rabu sore (19 September 2018) kepergok Majalah *Majelis* sedang bermain tenis di lapangan tenis DPR/MPR yang terletak di sebuah pojok kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadirnya Mahyudin di lapangan tenis ini berarti kembali ke khittahnya. Politisi Partai Golkar ini mengaku, tenis adalah olahraga pilihannya sebelum beralih ke lapangan golf. "Dulu saya bermain tenis. Tapi lama ditinggal, karena beralih ke lapangan golf," kata Mahyudin didampingi Aritonang yang menjadi *sparring partner* di lapangan tenis sore itu.

Meski olahraga tenis lama ditinggalkan, tapi teknik bermain tenis yang ditunjukkan oleh Mahyudin masih terlihat jelas. Maka tak heran bila sore itu Mahyudin yang berpasangan dengan Tarjo (karyawan DPR) membuat lawannya, pasangan Lisong (pelatih tenis) dan Aris (anak lapangan tenis), tak berkutik. Tak tanggung-tanggung, menang dua kali permainan. □

BA/SCH

# Teater

## Tidak Ketinggalan Zaman

**Y**ANG bilang pertunjukan teater sudah ketinggalan zaman dan kuno, mesti membuang jauh-jauh anggapan tersebut. Buktinya, pertunjukan teater yang mengangkat cerita rakyat Jaka Tarub ternyata menjadi tontonan yang sangat menarik. Legenda Jaka Tarub ini diangkat oleh Teater 'Langit 7 Bidadari' guna menyambut Hari Pancasila, yang digelar di Garuda Teater TMII Jakarta, Juni 2018 lalu.

Adalah Steffhanie Michelle Gabriella Tatum alias **Ariel Tatum**, artis cantik kelahiran 8 November, 21 tahun lalu, menjadi salah satu pemeran bidadari dalam pertunjukan teater yang digarap apik seniman Harry De Fretes tersebut. Selain Ariel Tatum, sejumlah artis lain juga terlibat, antara lain Indy Barends, Ersya Mayori, Ririn Ekawati, Kezia Warouw, Sarwendah Tan, Ashanty, Samuel Rizal, dan Jajang C Noor.

*"Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dipercaya menjadi bagian dari 'Langit 7 Bidadari' dan bernyanyi menutup pagelaran seni pertama saya ini," kata Ariel Tatum. Ia mengaku sedikit grogi dan minder. "My god, waktu itu saya grogi banget, apalagi harus beradu akting dengan para senior. Saya takut salah karena ini kisah legenda budaya asli Indonesia. Tapi, akhirnya bisa melewati dan sukses," katanya, awal September lalu, di Jakarta. □*

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Ariel Tatum**



**Anya Dwinov**

# Peserta LCC

## Empat Pilar Luar Biasa

ARTIS cantik **Anya Dwinov** hadir sebagai Master of Ceremony (MC) pada acara final dan grand final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2018 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada 29-30 Agustus 2018.

Sepanjang jalannya lomba, gaya bicara dan teknik Anya dalam memandu rangkaian lomba mampu memecah ketegangan kontestan yang fokus menjawab materi-materi sulit seputar UUD, TAP MPR, dan lainnya untuk memperebutkan gelar Juara Nasional LCC Empat Pilar 2018.

"Saya sudah beberapa kali loh menjadi MC LCC Empat Pilar MPR RI ini. Dari tahun ke tahun saya melihat adik-adik peserta makin pintar, saya kagum luar biasa karena mereka sangat hafal semua pasal," ujar Anya.

Anya berharap, dari para peserta ini akan muncul calon-calon pemimpin bangsa yang cakap dan mampu membawa bangsa ini sesuai cita-cita para pendahulu bangsa. "LCC ini kegiatan baik, berdampak baik, dan perlu didukung seluruh rakyat," katanya. □

DER





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Pelukis Religius O Paolo Tungga Berdakwah Melalui Seni Lukis

**S**ENI adalah bahasa universal, yang bisa diterima oleh semua kalangan, lepas dari ikatan umur, suku bangsa, agama hingga jenis kelamin. Melalui seni orang bisa menerima pengetahuan tanpa harus merasa digurui, menerima kritik tapi dengan senyuman, dan mendapati kebenaran tanpa dihina, serta dijelek-jelekan. Seni mampu mengubah sesuatu yang keras menjadi lembut, sehingga mengenai sasaran tanpa menyakitkan.

Karena itu, O Paolo Tungga memilih seni lukis sebagai media untuk berdakwah. Dengan media seni kanvas, ia menyampaikan kebenaran illahiah. Mengajak manusia ke jalan lurus, tanpa menyakiti apalagi menzolimi. Mengajak manusia untuk berbuat baik tanpa keterpaksaan. Sekaligus menyampaikan peringatan melalui cara yang sopan, tidak dengan ancaman.

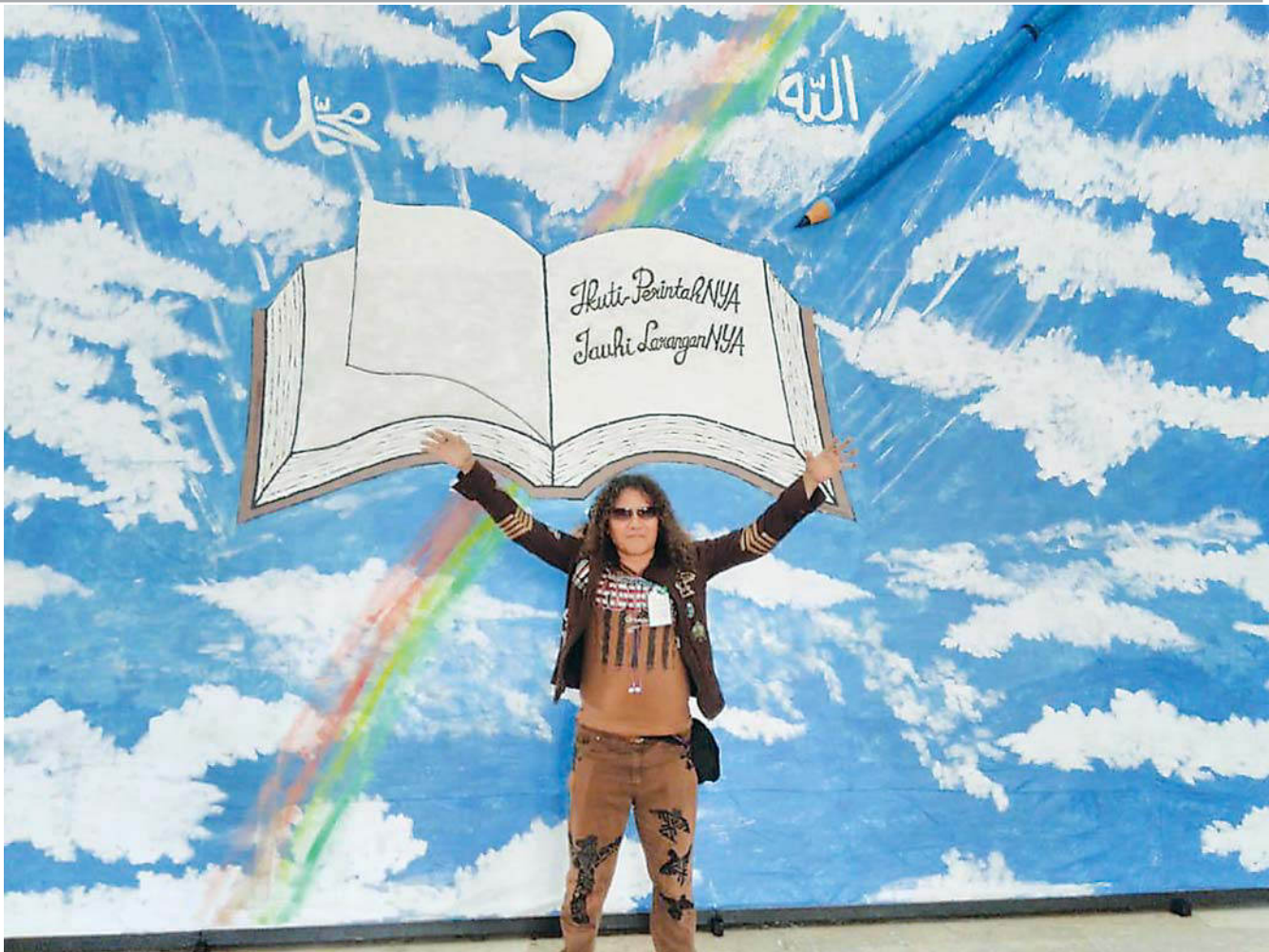
Salah satu karya lukis religius karya O Paolo Tungga mampir di kompleks MPR, DPR,

dan DPD RI Senayan, Jakarta, pada Agustus silam. Persisnya, 16 Agustus 2018 atau bertepatan dengan Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan MPR, atau sehari menjelang perayaan Proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73. Sebuah

lukisan raksasa berukuran 7 x 4 meter dipajang dan menempel di dinding Lobi Nusantara II kompleks Parlemen. Sebuah lukisan bertema Alquran.

“Dari sinilah Alquran itu berasal, dari langit yang bertingkat-tingkat. Kalau kita bisa





melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhkan segala larangan Nya, kita pasti akan selamat dunia akherat”, kata O Paolo mengomentari karya lukisnya.

Karya lukis serupa pernah dibuat dan dipasang di Masjid Istiqlal pada Ramadhan 2016. Kala itu ia mendapat berbagai pujian dari masyarakat, termasuk imam Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nazarudin Umar. Dan, Nazarudin Umarlah yang mengatakan bahwa lukisan itu identik dengan Alquran, karena berisi ajakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah.

“Kali ini saya sengaja membuatnya kembali untuk dipasang di Gedung Parlemen. Karena di sini adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat. Banyak peristiwa terjadi di sini, semoga mereka ingat dan

kembali melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Nya”, kata Paolo.

Selama ini, menurut Paolo, banyak orang yang mengerjakan perintah Allah, tapi juga melaksanakan larangannya. Banyak orang salat, puasa, dan zakat, tetapi korupsi masih tinggi. Banyak orang taat beribadah, tapi kemaksiatan tak kunjung berhenti.

“Mudah-mudahan, ini akan berguna bagi kita semua. Kalau saya pidato atau ceramah belum tentu ada yang mendengarkan. Kalau pun ada yang mau mendengar, mungkin saja ada sebagian yang marah. Tapi melalui lukisan, saya berharap, pesan saya bisa sampai tanpa melukai siapapun”, kata Paolo lagi.

Paolo sendiri sesungguhnya belum terlalu lama berkecimpung dalam dunia lukisan. Pria berdarah Rote, kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 5 Oktober 1965, ini sebelumnya

adalah pelaku seni peran. Baru lima tahun, ia merambah dunia lukis, dan langsung memilih aliran lukis religius, seiring dengan pilihannya untuk menjadi seorang muslim.

Selain lukisan bertema Alquran, Paolo sudah menghasilkan puluhan lukisan lainnya. Tetapi, ia mengakui, tema lukisan Alquran ini merupakan salah satu lukisan yang paling booming, sudah ribuan kali diabadikan berbagai kalangan. Warga Cempaka Putih Jakarta ini berharap, bisa melanjutkan jejak seorang Harry Moekti, rocker yang berhijrah menjadi da'i.

“Melukis adalah panggilan jiwa, tiba-tiba saya bisa melukis, dan memilih aliran lukisan religius. Mudah-mudahan semua ini akan membuat iman saya makin kuat, makin dekat dengan Allah”, harap Paolo. □

**MBO**



Drs. Ayub Khan, M. Si.

# Orang Rumahan Jadi Anggota Dewan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M**ENJADI anggota Legislatif, apalagi di tingkat pusat, merupakan salah satu anugerah terbesar dalam perjalanan karir politik seorang Drs. Ayub Khan, M. Si, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI. Karena, sebagai anggota DPR RI, dia merasa bisa bekerja dan mengabdikan kepada masyarakat secara lebih banyak, jauh melebihi kapasitas anggota DPRD yang pernah dijabatnya pada periode 2009-2014.

Perasaan seperti itu adalah hal wajar, karena sebagai anggota DPR RI Ayub berkesempatan memberikan sumbangsih yang lebih besar ketimbang hanya sebagai anggota DPRD. Sebagai anggota legislatif, Ayub bisa ikut membahas pembuatan undang-undang, khususnya yang terkait dengan Komisi IX. Ia memiliki kesempatan untuk menyalurkan bantuan, sesuai program yang dilakukan mitra komisi IX, termasuk ke daerah pemilihan yang menjadikannya anggota DPR RI.

Beberapa program kementerian dan lembaga yang pernah menyalurkan bantuan bersama Ayub, antara lain bantuan makanan tambahan dan layanan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),

termasuk bantuan pelatihan, peralatan dan pemasaran dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Hingga program tenaga kerja padat karya, yang diberlakukan bagi tenaga kerja musiman. Seperti para petani yang menganggur, saat musim kemarau.

“Sebagai anggota DPR RI, banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, sehingga kita bisa memberi banyak harapan, tetapi bukan obral janji. Khususnya, melalui program yang sesuai dengan mitra komisi IX, di mana saya berada sekarang”, kata Ayub Khan kepada Majalah *Majelis* yang menyambangnya, di Ruang Fraksi Partai Demokrat, beberapa waktu lalu.

Dengan kondisi seperti itu Ayub merasa sebagai anggota legislatif bisa lebih bermanfaat pada masyarakat. Dan, tidak semata-mata hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu ia tegaskan, karena masih banyak yang kerap memandang sebelah mata terhadap peran dan fungsi anggota dewan. Mereka menganggap DPR hanya memboroskan keuangan negara, sementara hasil kerjanya tidak ada sama sekali.

Berbekal kinerjanya selama 2014-2019, Ayub berharap, pada Pemilu 2019 nanti masyarakat masih memberikan kepercayaan bagi dirinya untuk kembali menjadi anggota DPR RI. Apalagi, ia masih



menyimpan keinginan besar, untuk dapat turut berpartisipasi memajukan masyarakat, khususnya daerah pemilihan Jawa Timur IV meliputi Lumajang dan Jember.

“Saat ini masyarakat sudah cukup mengenal saya berkat kegiatan yang saya jalankan. Mudah-mudahan mereka mau memberikan suaranya untuk memilih saya pada Pemilu 2019 nanti”, begitu Ayub berharap.

Saat ini, Ayub merasa lebih optimistis menatap pemilu yang akan datang. Hal itu wajar, selain memiliki modal sosial yang cukup, kondisi Partai Demokrat yang menaunginya juga lebih baik dibanding 2014. Pada 2014, suara Partai Demokrat praktis meredup sebagai imbas keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kasus korupsi. Tetapi, lambat laun, partai yang didirikan SBY itu sudah mulai pulih, dan siap bertarung dalam Pemilu 2019. Bahkan, kehadiran sosok Agus Harimurti Yudhoyono di tengah perpolitikan nasional membuat partai berlambang *mercy* itu makin disegani kawan dan lawan-lawannya.

### Batu Permata

Jauh sebelum menjadi anggota DPR, sesungguhnya banyak yang meragukan kemampuan Ayub dalam berpolitik. Pasalnya, Ayub tidak banyak dikenal masyarakat, karena jarang bersosialisasi. Ia tidak banyak berkecimpung dalam kegiatan kemasyarakatan, apalagi ikut dalam organisasi sosial. Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, pada 2005, anak bungsu enam bersaudara pasangan Muhammad Yunus dan Jubaidah ini lebih dikenal sebagai pengusaha properti dan batu permata.

Tetapi, keterasingan hidup Ayub dari hingar bingar kegiatan sosial politik itu lambat laun mulai pudar. Beberapa kali ia tampak hadir di tengah keramaian rapat umum partai, kampanye atau iring-iringan kader dan simpatisan Partai Demokrat. Ia juga terlihat makin sering hadir dalam pengajian umum, kegiatan sosial, termasuk aktifitas anak-anak muda.

“Saya sadar, untuk meraih sukses dalam dunia politik, kita harus dikenal oleh masyarakat banyak. Karena itu, tidak ada cara lain,





kecuali saya harus bertemu dan berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Inilah yang harus dilakukan, karena model demokrasi kita seperti itu. Calon dengan suara terbanyaklah yang akan keluar jadi pemenang”, kata Ayub.

Setelah bergabung dengan Partai Demokrat pada 2005, Ayub keluar dari kesendiriannya. Saat itu dia dipercaya menjadi Wakil Ketua SDM DPC PD Jember hingga akhirnya menjadi Sekjen DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember. Sejak itu, ia makin banyak bergaul dengan masyarakat dan ikut di berbagai kegiatan sosial. Terlebih setelah dirinya berniat menjadi caleg DPRD Kabupaten Jember.

“Saya memang tidak ikut organisasi sosial apapun, tetapi saya berkepentingan ada di semua organisasi sosial kemasyarakatan. Begitulah saya memosisikan diri, terutama organisasi dan pengajian kaum wanita”, kata Ayub lagi.

Berkat kepintarannya mengambil manfaat dalam bergaul, Ayub

terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2019-2014. Ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Sejak itu alumni IKIP Negeri Malang ini makin sering terlibat dalam kegiatan sosial. Mulai dari menyalurkan bantuan dari pemerintah, memberikan sumbangan kepada anggota masyarakat dan ibu-ibu pengajian, mengisi masa reses sebagai anggota dewan maupun menampung aspirasi masyarakat.

Rupanya menjadi anggota DPRD tak membuatnya puas. Selama berkiprah sebagai anggota legislatif Kabupaten Jember, Ayub merasa apa yang diberikannya kepada masyarakat sangatlah terbatas. Karena itu, ia tak puas hanya menjadi anggota DPRD Jember. Lantaran itu pula pada Pemilu 2014, pria kelahiran Jombang Jawa Timur, 11 November 1965, ini ikut berkompetisi meraih tiket menuju Senayan. Upayanya itu pun berbuah hasil. Ayub didaulat partainya mengisi Komisi IX, sekaligus menjadi Sekretaris Fraksi Partai





Demokrat MPR RI.

Ayub benar-benar memenuhi hasrat sosialnya untuk membantu masyarakat, terlebih di wilayah Lumajang dan Jember yang menjadi daerah pemilihannya. Itu ia buktikan dengan rutinitas mengadakan pertemuan dengan konsituen yang terbilang sangat tinggi. Setiap minggu, ada saja acara yang dia kunjungi, sekaligus menjadikannya sebagai alasan bertemu konsituen. Dan, itu dia lakukan hingga periode keanggotaannya sebagai anggota DPR RI berakhir 2019 nanti.

Jika terpilih kembali pada 2019, Ayub berharap bisa bekerja lebih baik lagi. Pasaunya, ia kerap mendapat kritik karena belum bisa mengunjungi konsituennya secara merata. Padahal, upayanya untuk bertemu konsituen sudah dilakukan dengan maksimal.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



“Mudah-mudahan, Partai Demokrat bisa besar kembali, seperti era awal Partai Demokrat dan dua kali keberhasilan mengantar Pak SBY jadi presiden. Apalagi, sekarang, kami sudah memiliki Pak Agus Harimurti Yudhoyono, sosok yang masih muda dan sangat menjanjikan”, katanya.

### Kutu Buku

Ayub sendiri sebenarnya tidak pernah bercita-cita menjadi anggota legislatif. Bahkan untuk menjadi anggota sebuah parpol pun tidak pernah terbersit. Ia ikut bergabung menjadi kader Partai Demokrat sekedar mengikuti saran dan ajakan temannya untuk berpartai. Itupun awalnya dilakukan hanya sekedar ingin mencoba dan mencari pengalaman, meski akhirnya ia mendapat sukses besar di sana.

Ayub melalui masa kecilnya begitu saja. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah, banyak membaca buku, dan waktu bermainnya sangat terbatas. Maklum, sebagai anak bungsu enam bersaudara, orangtuanya begitu mengkhawatirkan keselamatan Ayub. Kondisi tersebut berlangsung hingga duduk di bangku SLTA.

Saat bersekolah di SMA Negeri 1 Ambulu Jember, Ayub masih belum bisa jauh dari kedua orangtuanya. Bahkan untuk nonton di bioskop pun, ia harus ditemani orangtuanya. Satu-satunya kemandirian yang dia dapat saat SMA adalah dibolehkannya ikut dalam grup band sebagai vokalis.

Tetapi itupun hanya dibolehkan hingga bangku SLTA. “Setelah tamat orangtua saya melarang. Alasannya, kalau sekedar hobi boleh, tapi kalau menjurus ke pekerjaan, yang diutamakan adalah pendidikan”, cerita Ayub.

Karena itu, keberhasilannya menjadi anggota dewan, menurut Ayub, adalah buah kepatuhannya kepada orangtua. Untuk itu, ia akan terus mendedikasikan keberhasilannya menjadi anggota DPR RI kepada kedua orangtuanya, yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberinya banyak bekal menjalani hidup. □

MBO



## Revitalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

**S**ELAMA 73 tahun perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dan dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar negara (*groundnorm*) dan ideologi negara (*staatsidee*) sekaligus pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila lahir dari proses panjang kristalisasi pemikiran, ide, dan gagasan yang dilakukan para pendiri negara (*founding parents*) atas nilai-nilai luhur yang hidup dan mewakili kepribadian bangsa Indonesia.

Menjelang kemerdekaan NKRI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang-sidangnya membahas dasar negara untuk Indonesia merdeka. Berbagai penggalan dan usulan pemikiran tentang cikal bakal Pancasila dihimpun dari tokoh nasional saat itu. Gagasan tentang dasar negara itu disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. BPUPKI yang diketuai Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat itu pada akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila sebagai dasar NKRI merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan

cerminan nilai-nilai luhur yang hidup dan mewakili kepribadian bangsa Indonesia terbukti mampu menjadi perekat yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila merupakan hasil kompromi dan konsensus bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila mampu menggalang dan mewujudkan persatuan bangsa

menuju terwujudnya cita-cita bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Kita perlu belajar dari desintegrasi yang dialami Uni Soviet dan Yugoslavia—dua negara besar, negara daratan yang tentunya wilayahnya tidak terpisah oleh banyak pulau dan memiliki militer yang kuat. Namun Uni Soviet dan Yugoslavia tidak memiliki ideologi negara yang dilahirkan dari hasil kesepakatan bersama. Ideologi negara Uni Soviet dan Yugoslavia merupakan ideologi yang dipaksakan, hingga pada akhirnya ideologi negaranya tersebut tidak mampu membuat Uni Soviet dan Yugoslavia bertahan lama. Dan, seperti yang sama-sama kita ketahui kedua negara tersebut pecah.

Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem hukum yang khas sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi tuntunan dan acuan hukum dan menjadi bingkai bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dijabarkan pada



Oleh:  
**Hidayat Nur Wahid**  
Wakil Ketua MPR RI



Pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

Pada implementasinya dalam segala bentuk hukum atau perundang-undangan di Indonesia harus menjamin, menegakkan, dan diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila menjadi tempat bermula sekaligus tempat tujuan hukum Indonesia. Segala bentuk hukum atau perundang-undangan yang akan diberlakukan terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada era globalisasi, ancaman terhadap sebuah negara tidak hanya ancaman militer dan fisik, melainkan banyak ancaman non-militer yang pada hakekat merupakan bentuk infiltrasi, penguasaan atau penjajahan. Ancaman tersebut di antaranya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya yang juga perlu diperhitungkan, dan menuntut kepekaan serta kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa.

Selain tantangan zaman dengan globalisasi dan era digital, keberadaan Pancasila juga terancam dan tereduksi dengan realitas kehidupan berbangsa yang jauh dari nilai-nilai luhur. Mulai muncul di permukaan berbagai penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan sila pertama mengenai ketuhanan telah dikalahkan oleh kekayaan dan kehormatan duniawi. Sebagian orang mengejar kekayaan hingga melakukan korupsi dengan mengorbankan kepentingan publik. Kondisi ketimpangan sosial akhirnya memunculkan paham sebaliknya, yakni komunisme dan ateisme. Sila kedua, hak asasi manusia yang tanpa batas disanjung tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab diabaikan. Gejala pergaulan

bebas, LGBT, dan berbagai bentuk penyimpangan lain dibela, sementara kondisi anak dan kaum lanjut usia masih banyak yang terlantar. Sila ketiga, keberagaman diangkat ke permukaan tanpa roh persatuan. Seakan kebinnekaan menanggalkan ketunggalikaan. Alih-alih menjaga persatuan, yang terjadi justru perpecahan akibat fanatisme golongan. Sila keempat, musyawarah untuk mufakat berdasarkan isi kepala (hikmah) diganti dengan banyak-banyakan jumlah kepala atau adu kekuatan massa pendukung, sehingga masyarakat mudah tersulut emosi dan mempersempit ruang dialog. Sila kelima, dipinggirkan oleh kapitalisme dan materialisme yang dijadikan rujukan. Kartel dan mafia merajalela, sedangkan keadilan sosial diabaikan.

Revitalisasi Pancasila sangat dibutuhkan dalam arti mengembalikan nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan dalam seluruh sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Merevitalisasi Pancasila adalah sebuah keniscayaan sebagai jawaban atas fenomena merosotnya penghayatan dan pengamalan Pancasila yang tercermin dari maraknya berbagai ketidakadilan, kesenjangan sosial, konflik, korupsi, pelanggaran HAM, diskriminasi dan sebagainya.

Nilai-nilai luhur Pancasila harus direvitalisasi agar selalu menjadi acuan dan panduan setiap perilaku seluruh elemen bangsa sesuai posisi dan statusnya masing-masing. Hakikat Pancasila ada pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bukan simbolnya, karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu warga melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya. □



## Penghargaan Kemenkeu

# Setelah MPR Raih WTP Lebih Lima Kali Berturut-turut

MPR kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan setelah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lebih dari lima tahun berturut-turut.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan kinerja selama lebih lima tahun berturut-turut. MPR mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan RI.

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2019).

Ma'ruf Cahyono mengatakan, bagi MPR penghargaan itu tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi bagian dari capaian akuntabilitas kinerja. WTP adalah penilaian tertinggi atas laporan keuangan kementerian/ lembaga negara menyangkut pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas dan transparansi. "Selama lebih dari lima tahun itulah BPK memberi penilaian kepada MPR predikat WTP berturut-turut sehingga Menteri Keuangan memberikan apresiasi," katanya.

Menurut Ma'ruf, WTP ini menjadi tolok ukur telah bekerjanya sistem birokrasi di MPR, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang semakin baik. Ini selaras juga dengan reformasi birokrasi yang sedang berjalan di MPR. Salah satu area reformasi birokrasi



adalah pengelolaan anggaran yang berorientasi pada akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. "Jadi ini akan menunjang nilai reformasi birokrasi di MPR," ujarnya.

Ma'ruf menambahkan, pengelolaan anggaran yang baik telah menghasilkan kinerja dalam bentuk produktivitas kerja, seperti ditunjukkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata laksana, pelayanan publik, regulasi, dan lainnya. "Sehingga WTP ini benar-benar terasa dalam birokrasi. Kita ingin WTP ini memberi dampak pada hasil kerja kita sehingga memiliki nilai manfaat dan sumbangsih terhadap pembangunan, setidaknya dalam

pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR," tuturnya.

Capaian WTP lebih dari lima kali berturut-turut, lanjut Ma'ruf Cahyono, harus terus dipertahankan. Jauh lebih penting adalah capaian WTP menghasilkan *feedback* untuk perbaikan ke depan. Sebab, WTP bukanlah satu proses yang selesai, tetapi menjadi instrumen untuk pengelolaan anggaran yang lebih ideal lagi sesuai kebutuhan. Seluruh mata rantai pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan di MPR berujung pada penilaian WTP. "Setelah mendapat WTP perlu adanya *feedback* bagi perbaikan ke depan. Oleh karena itu, WTP sesungguhnya awal bagi pengelolaan anggaran yang lebih ideal," ucapnya.

"Karena itu capaian ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan keuangan secara tertib administrasi, tidak ada penyimpangan dan pemborosan, tapi dalam konteks reformasi birokrasi dapat memaksimalkan layanan yang lebih berkualitas, yaitu layanan teknis, administrasi, dan keahlian. Ke depan, pengelolaan anggaran MPR yang baik berkorelasi terhadap peningkatan kualitas di ketiga layanan itu," imbuhnya.

Jika semua berjalan bagus, sambung Ma'ruf, maka MPR memiliki kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas yang semakin baik dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR yang sedang menggiatkan reformasi birokrasi agar sesuai dengan kebutuhan ketiga layanan itu.

"Dengan pencapaian WTP lebih dari lima kali berturut-turut, birokrasi di MPR juga bekerja dan berkinerja semakin efektif dengan SDM yang berkualitas dan sejahtera. Pada gilirannya hasil WTP ini menjadi upaya untuk menciptakan budaya kerja yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta efisien, efektif, produktif, dan tertib administrasi, menuju ke pemerintahan yang baik," pungkasnya. □

BSC